



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

LAMPUNG TENGAH 2020



LAPORAN AKHIR

Strategi Pembangunan Daerah

(Studi Pendekatan Antropologi) Di Kabupaten Lampung Tengah

BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Laporan Akhir Strategi Pembangunan Daerah (Studi Pendekatan Antropologi) Di Kabupaten Lampung Tengah ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian proses penyusunan dokumen laporan secara keseluruhan. Dalam Laporan Akhir ini dibahas hal-hal umum tentang persoalan yang berkaitan dengan kegiatan kajian pembangunan daerah, pendekatan antropologi dan data-data awal yang tersedia di Kabupaten Lampung Tengah serta secara umum menyampaikan metodologi penyusunan laporan tahap demi tahap. Laporan ini juga memaparkan hasil temuan dan pengolahan data yang didapat dari proses pengumpulan data. Selain itu, pada laporan ini juga disampaikan beberapa strategi dan juga rekomendasi bagi Pemerintah Lampung Tengah untuk melaksanakan pembangunan menggunakan pendekatan antropologi.

Besar harapan kami bahwa kajian ini bisa memberikan dampak bagi pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah sehingga cita-cita pembangunan berkelanjutan bisa dicapai. Kami sadar bahwa dokumen ini merupakan dokumen bersama karena merangkum data, gagasan dan pengalaman banyak pihak yang memiliki mimpi sama demi pembangunan yang inklusif dan partisipatif. Namun, jika dalam penyajian terdapat kekurangan kami sangat meminta maaf dan membuka seluas-luasnya masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak.

Terimakasih

Gunung Sugih, 2020

(Tim Penyusun)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	V
BAB I	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 PERUMUSAN MASALAH.....	6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4 SASARAN.....	6
1.5 LOKASI KEGIATAN.....	7
1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	7
BAB II	9
2.1 GAMBARAN WILAYAH STUDI.....	9
2.1.1 <i>Tinjauan Geografis Kabupaten Lampung Tengah</i>	9
2.1.2 <i>Kondisi Topografi dan Keadaan Tanah</i>	12
2.1.3 <i>Kondisi Klimatologi</i>	14
2.1.4 <i>Kondisi Hidrologi</i>	14
2.2 KONDISI PRASARANA	16
2.2.1 <i>Jaringan Jalan</i>	16
2.2.2 <i>Data Perumahan</i>	17
2.2.3 <i>Fasilitas Komersial</i>	18
2.2.4 <i>Sarana Perdagangan</i>	19
2.3 KONDISI KEPENDUDUKAN	20
2.3.1 <i>Jumlah Penduduk Per Kecamatan</i>	20
2.3.2 <i>Laju Pertumbuhan Penduduk Per-Kecamatan</i>	23
2.4 KONDISI PEREKONOMIAN	24
2.4.1 <i>Mata Pencaharian Masyarakat</i>	24
2.4.2 <i>Penghasilan Masyarakat</i>	27
2.4.3 <i>Laju Pertumbuhan Ekonomi</i>	28
2.4.4 <i>PDRB Per Kapita</i>	29
BAB III	32
3.1 KONSEP PEMBANGUNAN	32

1. <i>Teori Modernisasi</i>	34
2. <i>Teori Imperialisme</i>	34
3.2 KEBIJAKAN SOSIAL	41
3.3 PEMBANGUNAN MENURUT KACAMATA ANTROPOLOGI.....	45
3.4 KEBUDAYAAN.....	49
3.5 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN DRAINASE.....	51
BAB IV	60
4.1 LOKASI DAN WAKTU KEGIATAN	61
4.2 JENIS DAN SUMBER DATA	61
4.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA	62
4.4 TEKNIK ANALISA DATA.....	67
4.5 PROSEDUR KAJIAN	68
BAB V	70
5.1 ISU PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2016-2021	70
5.2 ARAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2016-2021	76
5.3 POTENSI BUDAYA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	86
5.4 PEMBANGUNAN DRAINASE DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	95
5.5 STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PENDEKATAN BUDAYA GOTONG ROYONG	97
a. <i>Dukungan Kebijakan</i>	98
b. <i>Kelembagaan</i>	99
c. <i>Sosial Komunikasi</i>	101
d. <i>Pendanaan</i>	103
e. <i>Sentuhan Teknologi</i>	104
f. <i>Infrastruktur</i>	104
g. <i>Sumber Daya</i>	104
BAB VI	105
6.1 KESIMPULAN	106
6.2 REKOMENDASI.....	107
REFERENSI	109
LAMPIRAN	111

DAFTAR TABEL

TABEL 1 BATAS-BATAS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	9
TABEL 2 DISTRIBUSI LUAS WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	10
TABEL 3 PANJANG JALAN MENURUT TINGKAT KEWENANGAN (KM)	16
TABEL 4 KONDISI JARINGAN JALAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	17
TABEL 5 ANALISA KEBUTUHAN LAHAN PERUMAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	17
TABEL 6 JUMLAH PERUSAHAAN PERDAGANGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	18
TABEL 7 JUMLAH PERKEMBANGAN PEDAGANG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	18
TABEL 8 JUMLAH SARANA PERDANGAN MENURUT JENISNYA	19
TABEL 9 LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	22
TABEL 10 JUMLAH PENDUDUK DAN LAJU PERTUMBUHANNYA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	23
TABEL 11 JUMLAH ANGKATAN KERJA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	24
TABEL 12 LAPANGAN KERJA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	25
TABEL 13 JUMLAH PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	26
TABEL 14 PENDAPATAN KOTOR (JUTA RUPIAH) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	27
TABEL 15 PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL KABUPATEN/KOTA MENURUT KELOMPOK LAJU PERTUMBUHAN, 2016.....	28
TABEL 16 PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA (PERSEN) 2012-2016	29
TABEL 17 PDRB PER KAPITA KABUPATEN/KOTA (RIBU Rp.), 2014-2018	30
TABEL 18 MISI 1: MENINGKATKAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KETENTRAMAN WARGA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL YANG BERLANDASKAN DEMOKRASI, Keadilan, dan Keragaman Budaya.....	81
TABEL 19 MISI 2: MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS BERBASIS PENGEMBANGAN WILAYAH YANG TERPADU	83
TABEL 20 MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SESUAI POTENSI DAN KEARIFAN LOKAL.....	84
TABEL 21 MISI 6: MENYELENGGARAKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PRO RAKYAT	85
TABEL 22 SENSUS PENDUDUK MENURUT SUKU BANGSA DI LAMPUNG (BPS, 2011)	87
TABEL 23 SEBARAN PENDUDUK LAMPUNG ATAS DASAR SUKU BANGSA PENDATANG.....	87
TABEL 24 POTENSI BUDAYA DILIHAT DARI KEDEKATAN NILAI KESUKUAN (MODIFKASI KESUMA, 2017).....	93

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 PETA JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN	20
GAMBAR 2 PETA PROYEKSI PENDUDUK.....	21
GAMBAR 3 KOMPONEN-KOMPONEN ANALISIS DATA MODEL DESKRIPTIF.....	68
GAMBAR 4. TUJUH ELEMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS MASYARAKAT.....	98

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya, pembangunan merupakan suatu upaya terencana untuk mencapai perbaikan dalam segala bidang yang melibatkan banyak pihak, pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dan masyarakat sebagai objek maupun subjek pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat merupakan kumpulan individu-individu manusia yang memiliki peran penting. Dalam pembangunan, masyarakat menjadi pelaku dan sekaligus objek dari aktivitas pembangunan itu sendiri. Perencanaan pembangunan untuk memacu kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya berorientasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur, namun harus bisa memberdayakan masyarakat (Bambang S.B, Kepala Bappenas). Tanpa adanya pelibatan masyarakat maka tujuan membangun masyarakat mustahil untuk dicapai. Untuk bisa melibatkan masyarakat maka

pendekatan harus disesuaikan menurut kondisi sosial dan budaya di daerah target pembangunan.

Menurut sudut pandang antropologi, pembangunan adalah bagian dari kebudayaan manusia karena melibatkan eksistensi dari sejumlah tindakan manusia. Mengacu kepada hal tersebut maka pembangunan seharusnya bukan hanya terkait hal infrastruktur fisik berupa bangunan saja, namun juga harus mampu membangun masyarakat dan peradaban manusia. Pendekatan antropologi dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk membuat kebijakan pada suatu permasalahan pada pembangunan Indonesia dan ikut serta dalam perencanaan program pemerintah. Bahkan Robert dan Sherly (1991) menyebutkan bahwa antropologi harus bekerja dalam seluruh tahap proyek pembangunan yang dimulai dari mencari dan menentukan kebutuhan masyarakat, memformulasikan kebijakan dan memilih alternatif solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat, hingga merencanakan dan melaksanakan proyek sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan. Idealnya, masyarakat terlibat dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.

Konsep utama pembangunan selama ini adalah upaya untuk memajukan perekonomian yang artinya adalah keluar dari garis kemiskinan. Seiring dengan konsep ini, maka sudah semestinya pembangunan ekonomi harus melihat aspek kultural dalam melihat keanekaragaman masyarakat dalam sebuah negara. Hal ini didasari juga oleh fakta penting bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, maka tentunya pendekatan pembangunan di suatu daerah akan berbeda dengan daerah yang lainnya. Aspek kultural ini terlihat dari betapa beragamnya suku di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Menurut survey BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2010, diketahui bahwa Indonesia memiliki setidaknya 1.340 suku yang terbagi ke dalam 300 kelompok etnik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Suku-suku tersebut memiliki kebudayaannya masing-masing. Kebudayaan merupakan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dari hasil belajar. Hal ini berarti seluruh tindakan manusia merupakan "kebudayaan". Kentjaraningrat (2009) mengemukakan mengenai wujud kebudayaan

yaitu: suatu ide, gagasan, nilai, norma, peraturan; kompleks aktivitas serta tindakan berpola manusia; benda-benda hasil karya manusia.

Pemerintah pusat juga sudah memulai melaksanakan pembangunan dengan pendekatan antropologi. Misalnya, Menkopolkam pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa pembangunan di wilayah Papua akan menggunakan pendekatan budaya dengan cara membagi Papua menjadi tujuh wilayah adat sesuai dengan suku-suku besar di Papua. Selain itu, pembangunan di Papua akan dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan mengutamakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara melibatkan masyarakat Papua terutama masyarakat lokal.

Menurut Sugeng (2007), untuk menerapkan pembangunan dengan pendekatan antropologi maka setidaknya ada empat hal yang menjadi pertimbangan; (1) perbedaan dan potensi sumberdaya alam, (2) sumberdaya manusia, (3) lingkungan budaya dan (4) posisi geostrategis. Jika pemerintah daerah mampu memetakan potensi budaya dan kemudian membuat terobosan maka bisa meningkatkan perekonomian di daerahnya.

Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Lampung yang menjadi pintu masuk pulau Sumatera. Keragaman di provinsi ini bukan tanpa sebab, salah satunya disebabkan oleh program transmigrasi sejak zaman kolonial Belanda. Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari dua unsur, yakni masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang. Masyarakat pribumi sebagai penduduk asli (lokal) yang sudah lama menetap, sedangkan pendatang merupakan pendatang dari berbagai provinsi di Indonesia yang telah tinggal dalam waktu yang lama dan menetap di Lampung Tengah. Menyebarnya suku-suku tersebut ke Lampung Tengah karena adanya program transmigrasi terjadi dalam kurun waktu 1952-1970 yang utamanya berasal dari Pulau Jawa dan Pulau Bali dengan jumlah 6.189 KK atau sebanyak 26.538 jiwa pada tahun tersebut.

Beragam suku bangsa tersebut telah menyebar ke berbagai kecamatan di mana terdapat kampung-kampung dominan suku-suku tertentu seperti terdapat kampung yang paling dominan dihuni oleh masyarakat suku Jawa, kemudian disusul oleh suku Sunda, sebagian adalah suku Bali, serta suku asli Lampung dengan menonjolkan ciri

khasnya masing-masing. Namun, terdapat dua kecamatan yang memiliki keragaman suku dan memiliki posisi penting yaitu Kecamatan Gunung Sugih dan Terbanggi Besar. Kecamatan Gunung Sugih merupakan Ibu kota Kabupaten dan pusat pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan Kecamatan Terbanggi Besar berperan sebagai pusat perekonomian dan bisnis masyarakat Lampung Tengah. Mengingat betapa pentingnya dua daerah tersebut maka penelitian ini akan dilaksanakan di dua kecamatan tersebut yang selanjutnya disebut dengan istilah Terbagus (Terbanggi Besar dan Gunung Sugih).

Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, kedua daerah tersebut juga mewakili citra Kabupaten Lampung Tengah. Selain tuntutan pemerataan pembangunan yang harus menyentuh daerah marjinal, pembangunan juga perlu memperhatikan proporsionalitas. Maksud proporsionalitas adalah daerah yang menjadi ikon dan pusat kegiatan harus masuk dalam skala prioritas pembangunan. Untuk itu, citra wilayah yang bersih dan nyaman perlu dijaga di kedua daerah ini.

Jika dilihat dari segi infrastruktur, maka Wilayah Terbagus harus memiliki jalan dan drainase yang baik sebagai penopang kegiatan sehari-hari. Dimana jalanan seharusnya kuat dan tidak berlubang serta adanya drainase yang mampu mengaliri air hujan agar tidak banjir atau menggenang saat hujan datang. Menyadari pentingnya hal ini, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mulai berbenah memperbaiki kondisi jalan dan drainase, khususnya di daerah Pasar Bandar Jaya. Sebelumnya, daerah Bandar Jaya yang merupakan pusat bisnis memiliki kesan kumuh dan tidak tertata. Tidak adanya drainase yang berfungsi dan jalan yang rusak menambah terjadinya kemacetan, terlebih di saat hujan. Sejak tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mulai menata kebersihan kota ini dengan membangun 128 meter drainase yang membentang di halaman Pasar Bandar Jaya. Selain pembuatan drainase, dibangun juga trotoar di beberapa bagian atas drainase yang ditutup dengan plat beton.

Untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan maka pada tahun 2015 telah disepakati 17 goals dan 169 sasaran pembangunan oleh 190 negara dalam bentuk sebuah dokumen setebal 35 halaman yang disebut dengan ***Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)***. Agenda ini berlaku

selama 15 tahun mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2030 yang juga menggantikan agenda sebelumnya yang bernama *Millenium Development Goals* (MDGs). Bahagijo (2015) menyatakan bahwa tanpa partisipasi masyarakat, agenda SDGs akan bernasib sama (gagal) dengan agenda MDGs. Lebih lanjut, Bahagijo juga menjelaskan bahwa masyarakat sipil dengan keahliannya masing-masing dapat membantu pemerintah agar lebih tajam melakukan pemetaan masalah di lapangan, membuat solusi dan implementasi, serta melakukan pengawasan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, kelompok-kelompok marjinal seperti perempuan, anak dan masyarakat adat perlu dilibatkan. Karena terdapat prinsip utama dalam SDGs yang dikenal dengan “*no one leaves behind*”, atau “tidak ada seorang pun yang ditinggal”

Dalam kaitannya dengan pembangunan drainase di Kabupaten Lampung Tengah, maka sudah seharusnya konsep partisipasi masyarakat yang mengedepankan kearifan lokal menjadi motor penggerak pembangunan bersama pemerintah daerah. Konsep “Gotong royong” yang menjadi program unggulan Bupati Kabupaten Lampung Tengah bisa menjadi pintu awal terciptanya pembangunan partisipatif. Bentuk kecil partisipasi masyarakat terwujud dalam bentuk kritikan dan laporan kepada pemerintah. Seperti yang terjadi pada April 2019, dimana masyarakat mengadukan terjadinya penyumbatan pada drainase Bandar Jaya akibat sedimentasi dan sampah. Bupati kemudian melakukan peninjauan dan kemudian mengajak masyarakat untuk bergotong royong membersihkan drainase.

Dengan berbagai penjelasan di atas, pendekatan antropologi bisa digunakan untuk memberdayakan budaya yang ada agar berkontribusi menyukseskan pembangunan dan meningkatkan perekonomian. Dengan memahami kondisi suatu masyarakat, maka pemerintah dapat memilih pendekatan yang tepat untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya. Pembangunan drainase di daerah Plaza Bandar Jaya merupakan studi kasus yang dipilih karena Pemerintah Daerah Lampung Tengah akan menyusun *Grand Design* pembangunan kawasan perkotaan. Dengan adanya kajian ini diharapkan mampu menawarkan pilihan pendekatan ke masyarakat yang sesuai dengan kearifan lokal.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan budaya apa yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam?
2. Apakah pendekatan yang digunakan oleh pemerintah Daerah kabupaten Lampung Tengah sudah efektif dan sesuai dengan kearifan lokal?
3. Apa saja potensi budaya yang ada yang bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan?
4. Bagaimana implementasi dan respon masyarakat terhadap Program Gotong Royong di Kabupaten Lampung Tengah?
5. Apa langkah-langkah yang harus ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah terhadap perbedaan budaya demi menyukseskan pembangunan yang partisipatif?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukan kajian ini adalah untuk menyusun suatu pendekatan yang tepat dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah dengan mengambil fokus kajian di sekitar Plaza Bandar Jaya.

Adapun Tujuan kajian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pendekatan kebudayaan dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah
2. Membuat pendekatan yang tepat sehingga pembangunan bisa berjalan sesuai harapan.
3. Memetakan potensi kearifan lokal yang ada di daerah Bandar Jaya
4. Mengetahui respon masyarakat terhadap Program Gotong Royong yang diterapkan di Kabupaten Lampung Tengah.
5. Menyediakan panduan umum pembangunan terhadap budaya yang ada di Kabupaten Lampung Tengah

1.4 Sasaran

Kajian ini memiliki sasaran sebagaimana berikut:

1. Diketuainya potensi budaya di Wilayah Bandar Jaya yang berpeluang membantu pembanguna daerah
2. Diketuainya pendekatan yang tepat ke masyarakat agar pembangunan bisa berjalan lancar.
3. Tersedianya rumusan strategi dalam rangka menyukseskan pembangunan berbasis kebudayaan lokal.

1.5 Lokasi Kegiatan

Kegiatan Kajian Penyusunan Strategi Pembangunan Daerah Melalui Pendekatan Anthropologi di Kabupaten Lampung Tengah ini berlokasi di wilayah seputar Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah.

1.6 Sistematika Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Strategi Pembangunan Daerah Melalui Pendekatan Anthropologi di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 dilaksanakan dengan tatacara sebagai berikut:

1. Konsultan pelaksana pekerjaan melakukan observasi di lapangan terkait hasil pembangunan di daerah Bandar Jaya. Pembangunan yang diamati dikhususkan pada pembangunan drainase di Plaza Bandar Jaya.
2. Konsultan pelaksana pekerjaan menyusun data sekunder terkait potensi kebudayaan.
3. Konsultan pelaksana kegiatan dengan arahan para pihak dan instansi menentukan responden yang akan dimintai keterangan terkait proses pembangunan yang dilakukan di Bandar Jaya.
4. Konsultan pelaksana kegiatan dengan arahan para pihak dan instansi terkait melakukan analisa terhadap hasil in-depth interview..
5. Menyusun pedoman dan strategi pembangunan berlandaskan kearifan lokal di Lampung Tengah.

Laporan Pendahuluan Penyusunan Strategi Pembangunan Daerah Melalui Pendekatan Anthropologi di Kabupaten Lampung Tengah ini dibuat dalam beberapa bab utama

yang berisi penjelasan dan pembahasan sistematis. Adapun garis besar penjelasan masing-masing bab yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, maksud dan tujuan dari kegiatan perencanaan, sasaran, lokasi kegiatan, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 Gambaran Umum

Terdiri dari dua pembahasan utama yaitu Tinjauan Umum dan Potensi dan Masalah. Dalam tinjauan umum digambarkan mengenai karakter dasar lokasi perencanaan dalam konteks kondisi lahan dan demografis yang berkaitan dengan pembahasan kebudayaan di Lampung Tengah.

Bab 3 Tinjauan Aturan Teknis Dan Akademis

Bagian yang membahas tentang definisi terkait kebudayaan dan pembangunan yang berlandaskan kearifan lokal.

Bab 4 Metodologi

Merupakan pembahasan khusus mengenai tatacara penyusunan rencana secara sistematis dan data pendukung yang diperlukan berkaitan dengan Penyusunan Strategi Pembangunan Daerah Melalui Pendekatan Anthropologi di Kabupaten Lampung Tengah.

Bab 5 Hasil Kajian

Berisi pembahasan mengenai hasil temuan di lapangan baik dari data primer maupun sekunder, analisa data dan hasil kajian berupa potensi budaya, pendekatan pembangunan dan persepsi masyarakat terhadap keterlibatan dalam pembangunan.

Bab 6 Rekomendasi Dan Saran

Berisi rekomendasi mengenai pedoman pembangunan berbasis masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM



2.1 Gambaran Wilayah Studi

2.1.1 Tinjauan Geografis Kabupaten Lampung Tengah

Secara astronomis, Lampung Tengah terletak antara 104° 35' sampai 105° 50' Bujur Timur dan 4°30' sampai 4°15' Lintang Selatan. Ditinjau secara geografis, Kabupaten Lampung Tengah terletak di bagian tengah Provinsi Lampung dan memiliki batas-batas sebagai berikut:

Tabel 1 Batas-Batas Kabupaten Lampung Tengah

Sebelah Utara	Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Barat
Sebelah Selatan	Kabupaten Pesawaran Kabupaten Lampung Timur

Lampung Selatan
 Sebelah Timur Kabupaten Pringsewu
 Kota Metro
 Sebelah Barat Kabupaten Tanggamus
 Kabupaten Lampung Barat

Kabupaten Lampung Tengah memiliki 28 Kecamatan dengan 290 kampung/kelurahan. Secara total, Kabupaten Lampung Tengah dengan ibukota Gunung Sugih, memiliki areal seluas 4.789,82 Km² dengan distribusi luas wilayah dalam Tabel 1 (Lampung Tengah Dalam Angka, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan, 2020). Wilayah Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah agraris yang sebagian besar penduduk memiliki atau pencaharian di sektor pertanian. Lampung Tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata + 46 meter di atas permukaan laut.

Tabel 2 Distribusi Luas Wilayah Kabupaten Lampung Tengah

Kecamatan	Luas Wilayah		Penduduk		Kepadatan Penduduk <i>per km²</i>
	<i>Km²</i>	%	<i>jumlah</i>	%	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Padang Ratu	204,44	4,27	47 972	4,65	235
2. Selagai Lingga	308,52	6,44	31 593	2,67	102
3. Pubian	173,88	3,63	40 954	3,46	236
4. Anak Tuha	161,64	3,37	35 697	3,02	221
5. Anak Ratu Aji	68,39	1,43	15 537	1,31	227
6. Kalirejo	101,31	2,12	63 490	5,36	627
7. Sendang Agung	108,89	2,27	36 397	3,08	334
8. Bangun Rejo	132,63	2,77	55 831	4,72	421
9. Gunung Sugih	130,12	2,72	62 716	5,30	482

10. Bekri	93,51	1,95	25 349	2,14	271
11. Bumi Ratu Nuban	65,14	1,36	28 728	2,43	441
12. Trimurjo	68,43	1,43	49 359	4,17	721
13. Punggur	118,45	2,47	36 310	3,07	307
14. Kota Gajah	68,05	1,42	31 943	2,70	469
15. Seputih Raman	146,65	3,06	46 296	3,91	316
16. Terbanggi Besar	208,65	4,36	108 553	9,17	520
17. Seputih Agung	122,27	2,55	46 423	3,92	380
18. Way Pengubuan	210,72	4,40	37 251	3,15	177
19. Terusan Nunyai	302,05	6,31	44 843	3,79	148
20. Seputih Mataram	120,011	2,51	46 133	3,90	384
21. Bandar Mataram	055,28	22,03	72 976	6,17	69
22. Seputih Banyak	145,92	3,05	42 079	3,56	288
23. Way Seputih	77,84	1,63	17 060	1,44	219
24. Rumbia	106,09	2,21	33 865	2,86	319
25. Bumi Nabung	108,94	2,27	31 068	2,63	285
26. Putra Rumbia	95,02	1,98	17 430	1,47	183
27. Seputih Surabaya	144,60	3,02	44 748	3,78	309
28. Bandar Surabaya	142,39	2,97	32 824	2,77	231
Lampung Tengah	4 789,82	100,00	1 183 27	100,00	247

Sumber: Lampung Tengah Dalam Angka, 2020

Dengan luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Bandar Mataram yaitu 1.055,28 km² disusul oleh Kecamatan Selagai Lingga dan Terusan Nunyai. Sedangkan Kecamatan Bumi Ratu Nuban memiliki luas wilayah terkecil yaitu 65,14 km².

2.1.2 Kondisi Topografi dan Keadaan Tanah

Berdasarkan data dalam Lampung Tengah Dalam Angka, Secara topografis, Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 5 (lima) bagian (Badan Pusat Statistik, 2020) yaitu:

1. Daerah topografi berbukit sampai bergunung, yang terletak di Kecamatan Padang Ratu dengan ketinggian rata-rata 1.600 m
2. Daerah topografi berombak sampai bergelombang, dengan ciri-ciri khusus terdapat bukit-bukit rendah yang dikelilingi dataran yang sempit, dengan kemiringan 8° sampai 15° dengan dan ketinggian antara 300-500 m dari permukaan laut. Jenis tanaman perkebunan di daerah ini antara lain kopi, cengkeh dan lada, dan tanaman pangan yang tumbuh baik di daerah ini adalah padi, jagung, kacang-kacangan dan sayur-sayuran
3. Daerah dataran Aluvial, datarn ini sangat luas, meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai timur, juga merupakan bagian hilir dari sungai-sungai besar seperti Way Seputih dan Way Pengubuan. Dengan ketinggian berkisar antara 25 sampai dengan 75 m, daerah ini memiliki kemiringan antara 0° sampai dengan 3°
4. Daerah rawa pasang surut, terletak di sepanjang Pantai Timur Kabupaten Lampung Tengah dengan menggenangnya air menurut pasang surut air laut dengan ketinggian antara 0,5 sampai dengan 1 meter di atas permukaan laut
5. Daerah River Basin atau Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Lampung Tengah ada dua dari lima DAS di Provinsi Lampung yaitu dari Sungai Way Seputih dan Sungai Way Sekampung.

Kabupaten Lampung Tengah yang terletak di bawah garis khatulistiwa 5° Lintang Selatan beriklim Tropis-Humid dengan angin laut bertiup dari Samudra Indonesia dengan kecepatan angin rata-rata 5,83 Km/Jam, memiliki temperatur rata-rata berkisar antara 26° C - 28° C pada daerah dataran dengan ketinggian 30-60 meter.

Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami adalah 33° C dan juga temperatur minimum 22° C. Sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 15-65 meter dpl dan mempunyai kemiringan lereng antara 0-2% (92,29%).

Keadaan lereng bervariasi, mulai datar, landai, miring, dan terjal, dengan pengelompokan sebagai berikut :

- Lereng 0-2%, terletak pada ketinggian 50 meter dpl yang hampir tersebar di seluruh wilayah (92,16%).
- Lereng 2-15%, terletak pada ketinggian 50-100 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Padang Ratu, dan Kalirejo.
- Lereng 15-40%, terletak pada ketinggian 100-500 meter dpl yang tersebar antara lain di Kecamatan Padang Ratu, dan Kalirejo.
- Lereng diatas 40%, terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter dpl yang tersebar hanya di Kecamatan Padang Ratu, dan Kalirejo.

Berdasarkan karakteristik topografi tersebut, maka wilayah tanah usaha di Kabupaten Lampung Tengah dapat dikelompokkan menjadi 5 golongan yaitu :

a. Tanah Usaha Khusus I

Tanah usaha ini terletak pada ketinggian 0 – 7 m dpl yang tersebar di daerah-daerah pertemuan air. Sebagian besar daerah ini tergenang air secara periodik atau terus-menerus tergantung pada besar kecilnya volume air yang tertampung di tempat tersebut.

b. Tanah Usaha Utama IA dan B

Terletak pada ketinggian 7-40 m dpl yang dipergunakan untuk bendungan-bendungan besar dan pada ketinggian ini sebagian besar digunakan untuk usaha pertanian sawah.

c. Tanah Usaha Utama IC

Terletak pada ketinggian 50-100 m dpl, yang merupakan daerah persawahan yang relatif baik, akan tetapi biasanya daerah yang bisa diairi relatif berkurang.

d. Tanah Usaha Utama ID

Terletak pada ketinggian 100-500 m dpl dengan permukaan yang sudah agak bergelombang.

e. Tanah Usaha Utama II

Terletak pada ketinggian 500-1000 m dpl yang merupakan daerah peralihan antara daerah yang beriklim panas dengan yang beriklim sedang.

2.1.3 Kondisi Klimatologi

Secara umum di Kabupaten Lampung Tengah di seluruh kecamatan hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim di Kabupaten Lampung Tengah termasuk dalam kategori iklim A, yaitu iklim hujan tropis, dengan ciri temperatur bulanan rata-rata lebih dari 18 °C, suhu tahunan 20 °C – 25 °C dengan curah hujan bulanan lebih dari 60 mm. Namun demikian, dibanding dengan kawasan lain di Kabupaten Lampung Tengah, Kawasan TERBAGUS (Terbanggi, Bandar Jaya, Gunung Sugih) yang saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi memiliki jumlah hujan dibawah rata-rata, yaitu sekitar 80 – 100mm.

Kabupaten Lampung Tengah termasuk beriklim tropis basah yang mendapat pengaruh dari angin musim (Monsoon Asia). Berdasarkan data di dalam RTRW Kabupaten Lampung Tengah, diambil dari data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung menunjukkan bahwa temperatur Kabupaten Lampung Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir berada pada kisaran 20 – 28°C dengan suhu rata-rata pertahun 26,30C dan kelembapan udara rata-rata di wilayah ini berkisar 80 – 88 persen. Dari sumber yang sama, dijelaskan bahwa temperatur udara di Kabupaten Lampung Tengah relatif stabil dan tidak pernah menunjukkan perubahan yang ekstrim, hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan di Kabupaten Lampung Tengah relatif baik dan nyaman.

2.1.4 Kondisi Hidrologi

Secara Hidrologi sungai-sungai di Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam Wilayah Sungai (WS) Way Seputih dan Way Sekampung Keadaan hidrologi di

Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh beberapa sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Salah satu sungai yang menjadi perhatian di Kabupaten Lampung Tengah adalah sungai Way Seputih yang membentang sejauh 193 Km dan melintasi 12 kecamatan. Sungai Way Seputih ini dikategorikan sebagai salah satu dari 7 (tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas wilayah DAS Way Seputih sendiri adalah 749.299,201 Ha yang meliputi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. Wilayah DAS Way Seputih terbesar adalah di Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 461.922,201 Ha atau 61,65% dari luas DAS Way Seputih.

Kabupaten Lampung Tengah memiliki 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Way Seputih dan DAS Way Sekampung. Uraian mengenai dua DAS tersebut adalah sebagai berikut:

1) Way Seputih

Luas	: 7.550 Km ²
Panjang seluruh sungai	: 965 Km
Jumlah cabang sungai	: 14 cabang
Densiti Pola Aliran	: 0,13
Frekuensi Pola Aliran	: 0,0019

2) Way Sekampung

Luas	: 5.675 Km ²
Panjang seluruh sungai	: 623 Km
Jumlah cabang sungai	: 12 cabang
Densiti Pola Aliran	: 0,11
Frekuensi Pola Aliran	: 0,0021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka kedua sungai besar tersebut di atas termasuk dalam kriteria sungai golongan III (kelas 3) yang peruntukannya untuk pertanian dan perikanan.

Tidak kurang dari 19 (delapan belas) sungai dan anak sungainya terdapat di Kabupaten Lampung Tengah. Sungai – sungai tersebut membelah dan membentang wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan total panjang sungai – sungai secara keseluruhan adalah 813 Km melebihi panjang garis keliling Kabupaten Lampung Tengah (517,077 Km).

2.2 Kondisi Prasarana

2.2.1 Jaringan Jalan

Kondisi jalan di Kabupaten Lampung Tengah pada dasarnya cukup tersedia dan sangat memadai. Hal ini dapat terlihat dari keadaan jalan yang rata-rata telah mengalami pengerasan.

Tabel 3 Panjang jalan menurut tingkat kewenangan (Km)

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2017	2018	2019
Negara	217,38		
Provinsi	282,88		
Kabupaten/Kota	1196,82	1343,33	1343,33
Jumlah/Total	1697,08	1343,33	1343,33

Sumber: Lampung Tengah Dalam Angka (2020)

Di sisi lain, jalan negara secara umum dalam kondisi yang baik karena telah dilakukan perbaikan yang signifikan di beberapa ruas jalur utama. Jalan utama seperti di Tegineneng dan Bandar Jaya juga telah mengalami perbaikan yang besar sehingga memberikan dampak yang dirasa langsung oleh masyarakat. Hasil pembangunan ini membuat kemacetan secara berangsur menghilang. Kemacetan juga berkurang disebabkan oleh adanya pembuatan Jalan Tol Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan. Para pengemudi khususnya truk dan bis lintas kemudian banyak memilih melalui jalur ini untuk mempersingkat waktu tempuh. Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar atau Jalan Tol Bakter adalah jalan tol sepanjang 140,94 kilometer yang merupakan ruas tol terpanjang kedua di Indonesia yang rutenya dimulai dari Pelabuhan Bakauheni (Kabupaten Lampung Selatan) hingga Terbanggi

Besar (Kabupaten Lampung Tengah). Jalan tol ini merupakan jaringan dari Jalan Tol Trans Sumatra.

Tabel 4 Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Lampung Tengah

Kondisi Jalan	2017	2018	2019
Baik	537,04	804,75	731,221
Sedang	161,78	17,35	89,191
Rusak	160,14	47,793	40,133
Rusak Berat	337,86	473,44	482,783
Jumlah	1196,82	1343,33	1343,33

Jika merujuk kepada Tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa jalan dalam kondisi baik mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, sebanyak 44% jalan dalam status baik, kemudian pada tahun 2018 mengalami perbaikan ruas sebanyak 267 Km sehingga persentase jalan dengan kondisi baik meningkat menjadi 60%. Namun, setelah berselang selama 1 tahun, dimana pada tahun 2019 kondisi jalan baik menurun ke angka 54% atau terdapat 73 Km yang mengalami penurunan status.

2.2.2 Data Perumahan

Berdasarkan analisa seperti yang dimuat dalam laporan RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031, secara total luas kebutuhan lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan perumahan adalah seluas 772,67 Ha, dengan asumsi perhitungan menggunakan perbandingan 1:3:6, yang artinya komposisi antara tipologi luas bangunan besar 64-72 m², sedang 36-45 m² dan kecil 21-36 m². Besaran kebutuhan lahan untuk perumahan tersebut dapat menjadi acuan timbulnya volume tindakan kriminal keluarga yang harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 5 Analisa Kebutuhan Lahan Perumahan Kabupaten Lampung Tengah

No	Jenis Kegiatan	Kebutuhan Lahan (Ha)	Keterangan
A	Daya tampung	299.980,36	
B	Kebutuhan Pengembangan		
1	Kawasan lindung	143.684,90	Minimal 30% dari luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah

2	Kawasan Budidaya		
2.1	Perumahan	772,67	Dihitung berdasarkan perbandingan kavling 1:3:6
2.2	Prasarana (jalan)	2415,33	
2.3	Sarana	688,44	
C	Total Kebutuhan (B1+B2)	147.561,34	
	Sisa lahan (A-C)	152.419,02	

2.2.3 Fasilitas Komersial

Potensi timbulan tindakan kriminal yang dihasilkan oleh kegiatan komersial dapat diukur dari besarnya jumlah fasilitas perdagangan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dari tabel berikut dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan perdagangan terus mengalami peningkatan jumlah secara cukup signifikan dalam kurun waktu empat tahun. Peningkatan yang terjadi meliputi jumlah sekitar 30%, atau rata-rata 7,5% setiap tahunnya.

Tabel 6 Jumlah Perusahaan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah

Klasifikasi <i>Classification</i>	2008	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Perseroan Terbatas <i>Incorporation Limited</i>	158	190	211	281
2. Koperasi <i>Cooperative</i>	590	652	666	775
3. Commanditaire Vennootschop <i>Limited Partnership</i>	-	-	-	-
4. Firma <i>Firm</i>	6 452	7 931	8 271	9 421
5. Perdagangan <i>Trade</i>	-	-	-	1
Jumlah/Total	7500	9 090	9 481	10 846

Sumber: Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 7 Jumlah Perkembangan Pedagang Kabupaten Lampung Tengah

Klasifikasi <i>Classification</i>	2008	2009	2010	2011
---------------------------------------------	------	------	------	------

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pedagang Kecil					
<i>Small Retailer</i>		8 521	8 984	9 736	10 171
2. Pedagang Menengah					
<i>Agent</i>		213	220	228	250
3. Pedagang Besar					
<i>Wholesale</i>		80	81	85	90
Jumlah/Total		8 814	9 285	10 049	10 511

Sumber: Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Tengah

2.2.4 Sarana Perdagangan

Fasilitas umum yang sangat terkait langsung dengan aktifitas masyarakat adalah sarana pasar. Pasar juga menjadi pemeran utama dalam pemenuhan kebutuhan supply sehari-hari masyarakat di Lampung Tengah. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah secara bertahap menghadirkan sarana pasar yang aman dan nyaman. Salah satu contohnya adalah perbaikan yang dilakukan di Plaza Bandar Jaya. Lokasi ini mengalami perbaikan besar-besaran pada kurun waktu 2017-2019. Dengan adanya perbaikan ini diharapkan mampu memperlancar arus perekonomian di Bandar Jaya serta lokasi di sekitarnya.

Jenis Sarana Perdagangan	2016	2017	2018	2019
Pasar Kampung	75	75	75	75
Pasar Daerah	9	9	9	9
Mall/Supermarket/Minimarket	90	123	14	14
Jumlah	84	2017	232	232

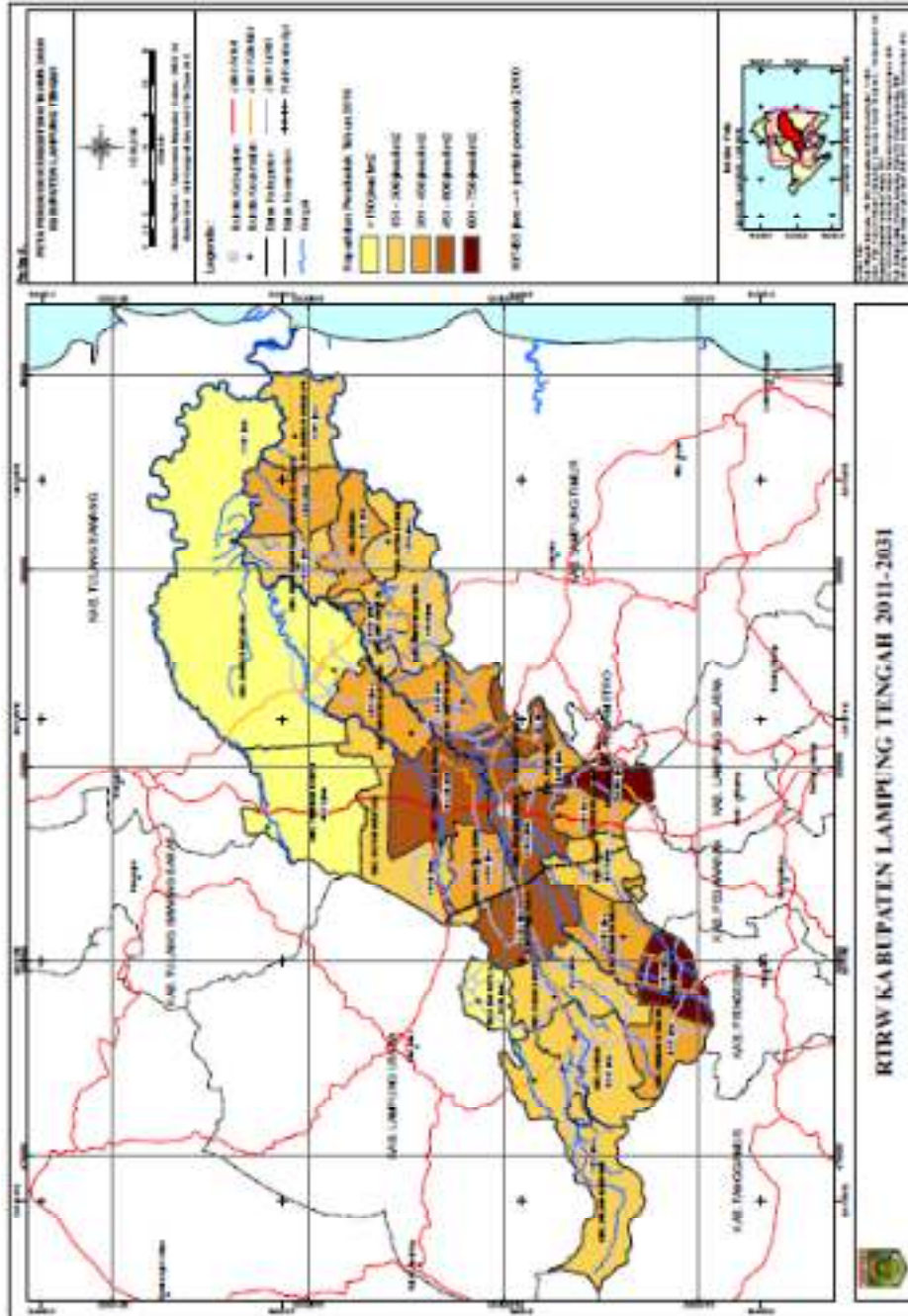
Tabel 8 Jumlah sarana perdangan menurut jenisnya

Sumber: Lampung Tengah Dalam Angka, 2020.

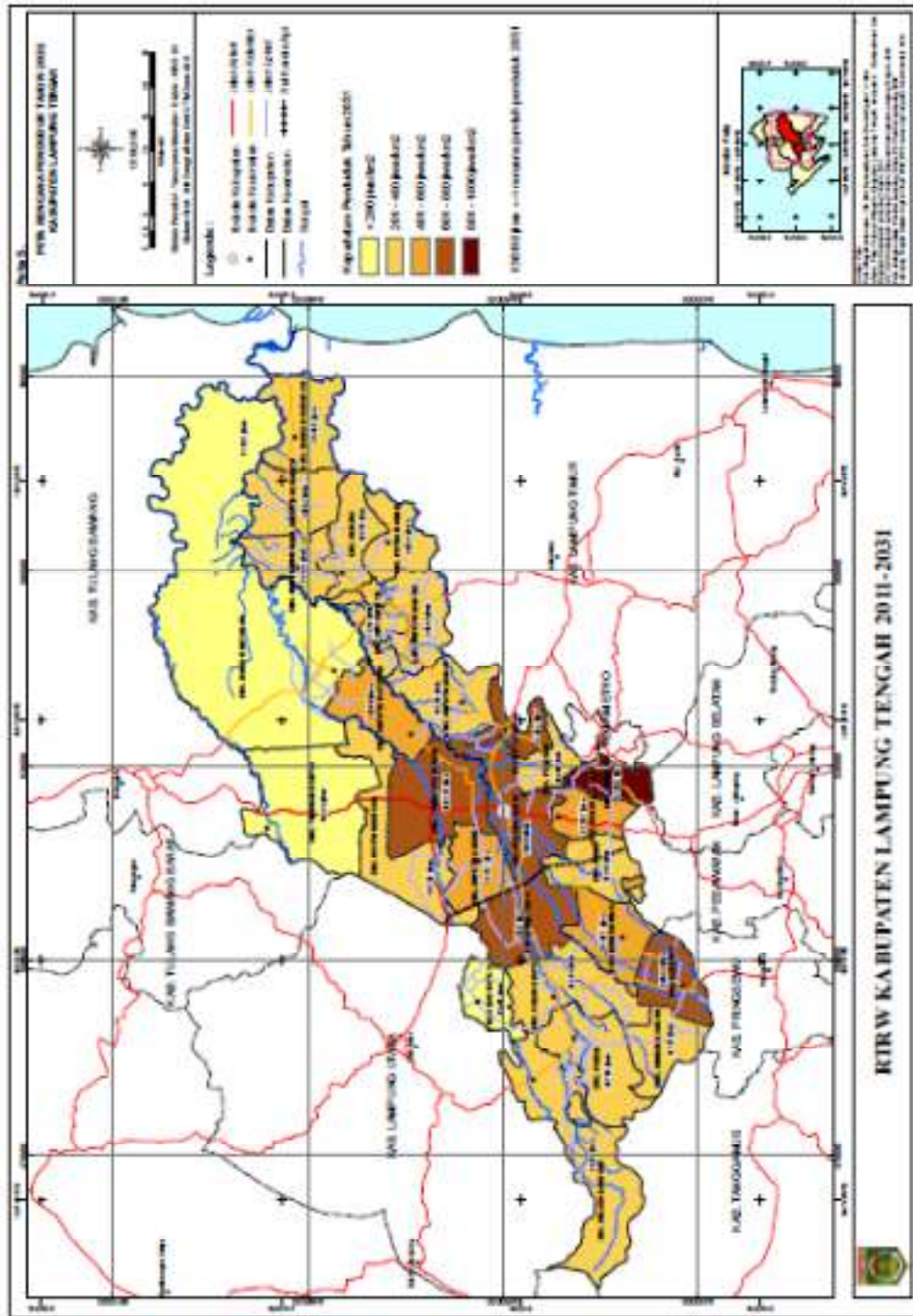
2.3 Kondisi Kependudukan

2.3.1 Jumlah Penduduk Per Kecamatan

Gambar 1 Peta Jumlah Penduduk per Kecamatan



Gambar 2 Peta Proyeksi Penduduk



Berdasarkan hasil sensus penduduk yang tertuang dalam dokumen Lampung Tengah Dalam Angka 2019 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 1.271.566 jiwa. Dari angka tersebut, dua kecamatan dalam Kawasan Terbagus memiliki jumlah-jumlah penduduk yang besar. Kecamatan Terbanggi Besar merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar yaitu dengan jumlah penduduk sebesar 122.626 jiwa, sedangkan Kecamatan Gunung Sugih memiliki jumlah penduduk sebesar 69.001 jiwa. Data mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Table 9 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Lampung Tengah

Kecamatan Subdistrict	Luas Wilayah Total Area		Penduduk Population	
	<i>Km²</i>	<i>%</i>	<i>jumlah</i>	<i>%</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1. Padang Ratu	204,44	4,27	49 887	4,65
2. Selagai Lingga	308,52	6,44	33 866	2,67
3. Pubian	173,88	3,63	42 448	3,46
4. Anak Tuha	161,64	3,37	38 131	3,02
5. Anak Ratu Aji	68,39	1,43	16 151	1,31
6. Kalirejo	101,31	2,12	67 983	5,36
7. Sendang Agung	108,89	2,27	37 935	3,08
8. Bangun Rejo	132,63	2,77	57 688	4,72
9. Gunung Sugih	130,12	2,72	69 001	5,30
10. Bekri	93,51	1,95	27 389	2,14
11. Bumi Ratu Nuban	65,14	1,36	31 801	2,43
12. Trimurjo	68,43	1,43	52 028	4,17
13. Punggur	118,45	2,47	39 810	3,07
14. Kota Gajah	68,05	1,42	34 163	2,70
15. Seputih Raman	146,65	3,06	49 505	3,91
16. Terbanggi Besar	208,65	4,36	122 626	9,17
17. Seputih Agung	122,27	2,55	50 852	3,92
18. Way Pengubuan	210,72	4,40	44 733	3,15
19. Terusan Nunyai	302,05	6,31	44 121	3,79
20. Seputih Mataram	120,011	2,51	48 594	3,90
21. Bandar Mataram	055,28	22,03	79 024	6,17

22. Seputih Banyak	145,92	3,05	46 010	3,56
23. Way Seputih	77,84	1,63	18 827	1,44
24. Rumbia	106,09	2,21	36 187	2,86
25. Bumi Nabung	108,94	2,27	32 400	2,63
26. Putra Rumbia	95,02	1,98	18 531	1,47
27. Seputih Surabaya	144,60	3,02	47 326	3,78
28. Bandar Surabaya	142,39	2,97	34 549	2,77
Lampung Tengah	4 789,82	100,00	1 271 566	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2019

2.3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Per-Kecamatan

Tabel 10 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhannya di Kabupaten Lampung Tengah

Kecamatan Subdistrict	Penduduk Population			Laju Pertumbuhan Penduduk Population Growth Rate (%)	
	SP 2010	Proy 2010	2018	2010-2018	2016-2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Padang Ratu	47 457	49 696	49 887	0.66	0.47
2. Selagai Lingga	31 253	33 610	33 866	1.04	0.85
3. Pubian	40 514	42 303	42 448	0.62	0.43
4. Anak Tuha	35 314	37 859	38 131	0.95	0.80
5. Anak Ratu Aji	15 370	16 091	16 151	0.61	0.46
6. Kalirejo	62 808	67 478	67 983	0.98	0.83
7. Sendang Agung	36 006	37 779	37 935	0.65	0.50
8. Bangun Rejo	55 232	57 513	57 688	0.54	0.39
9. Gunung Sugih	62 043	68 260	69 001	1.32	1.17
10. Bekri	25 077	27 155	27 389	1.10	0.94
11. Bumi Ratu Nuban	28 419	31 436	31 801	1.40	1.25
12. Trimurjo	48 829	51 741	52 028	0.79	0.64
13. Punggur	35 920	39 400	39 810	1.28	1.13
14. Kota Gajah	31 600	33 914	34 163	0.97	0.82
15. Seputih Raman	45 800	49 147	49 505	0.97	0.82
16. Terbanggi Besar	107 389	120 912	122 626	1.65	1.50
17. Seputih Agung	45 925	50 333	50 852	1.27	1.12
18. Way Pengubuan	36 851	43 776	44 733	2.43	2.27

19. Terusan Nunyai	44 362	44 254	44 121	-0.07	-0.21
20. Seputih Mataram	45 638	48 332	48 594	0.78	0.63
21. Bandar Mataram	72 190	78 327	79 024	1.13	0.97
22. Seputih Banyak	41 627	45 550	46 010	1.24	1.09
23. Way Seputih	16 877	18 618	18 827	1.36	1.21
24. Rumbia	33 501	35 928	36 187	0.96	0.81
25. Bumi Nabung	30 734	32 265	32 400	0.65	0.51
26. Putra Rumbia	17 243	18 409	18 531	0.89	0.74
27. Seputih Surabaya	44 267	47 048	47 326	0.83	0.68
28. Bandar Surabaya	32 471	34 364	34 549	0.77	0.61
Lampung Tengah	1 183 427	1 261 498	1 271 566	1.61	0.80

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2019

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa laju pertumbuhan penduduk terbesar ada di Kecamatan Way Pengubuan 2,27% dan terkecil ada di Terusan Nunyai -0,21%.

2.4. Kondisi Perekonomian

2.4.1 Mata Pencaharian Masyarakat

Tabel di bawah ini memperlihatkan perbandingan besarnya angkatan kerja dan tidak bekerja serta memperlihatkan secara umum persentase angka pengangguran di Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 11 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Lampung Tengah

Jenis Kegiatan <i>Type of Activity</i> (1)	2010 (2)	2011 (3)	2018
I. Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>	647 898	580 330	671 308
1. Bekerja/ <i>Working</i>	631 320	552 750	17 300
2. Penganggur/ <i>Unemployed</i>	16 578	27 580	
II. Bukan Angkatan kerja <i>Not Economically Active</i>	258 523	271 018	245 607

(Sekolah, Mengurus Rumah tangga dan Lainnya)

*(Attending School, Housekeeping
and Others)*

Jumlah/Total	906 421	851 348	934 245
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja <i>Labor Force Participation Rates</i>	71,48	68,17	73,71
Tingkat Pengangguran <i>Unemployment Rates (%)</i>	2,56	4,75	2.52

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Tengah Dalam Angka 2019

Pada tabel berikutnya dapat dilihat jenis/tipologi mata pekerjaan utama yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dan proporsi jumlahnya ditinjau berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Dalam tabel tersebut tipologi mata pencaharian penduduk dibagi dalam tiga lapangan pekerjaan utama; pertanian, industri dan jasa. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa secara umum pertanian merupakan lapangan pekerjaan utama dan terbesar di Kabupaten Lampung Tengah bagi laki-laki maupun perempuan.

Tabel 12 Lapangan Kerja di Kabupaten Lampung Tengah

[Diolah dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2013

Lapangan Pekerjaan Utama <i>Main Industry</i> (1)	Laki-laki <i>Male</i> (2)	Perempuan <i>Female</i> (3)	Jumlah <i>Total</i> (4)
<i>Pertanian/Agriculture</i>	208633	95705	304338
<i>Industri/Industry</i>	20221	17269	37490
<i>Jasa-jasa/Services</i>	7584	6426	14010
Jumlah/Total	236438	119400	355838

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah

Secara khusus melihat pada lapangan industri, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat cukup banyak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang tersebar di 28 kecamatan. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut cukup banyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan tabel berikut ini dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan terbanyak ada di Kecamatan Terbanggi Besar yang menyerap tenaga kerja sebanyak hampir 30.000

orang. Jumlah perusahaan paling sedikit ada di Kecamatan Seputih Mataram yaitu sebanyak dua buah dan mempekerjakan hanya sebanyak 26 orang saja.

Tabel 13 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Lampung Tengah

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jumlah Perusahaan <i>Number of Establiment</i>	Jumlah Tenaga Kerja <i>Number of Man Power</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1. Padang Ratu	15	528
2. Selagai Lingga	10	130
3. Pubian	20	40
4. Anak Tuha	20	200
5. Anak Ratu Aji	20	55
6. Kalirejo	9	82
7. Sendang Agung	18	46
8. Bangun Rejo	13	29
9. Gunung Sugih	29	1 217
10. Bekri	13	806
11. Bumi Ratu Nuban	15	309
12. Trimurjo	50	448
13. Punggur	29	167
14. Kota Gajah	19	88
15. Seputih Raman	27	59
16. Terbanggi Besar	170	27 988
17. Seputih Agung	3	7
18. Way Pengubuan	13	78
19. Terusan Nunyai	11	3 710
20. Seputih Mataram	2	26
21. Bandar Mataram	3	283
22. Seputih Banyak	16	282
23. Way Seputih	15	78
24. Rumbia	13	677
25. Bumi Nabung	15	149
26. Putra Rumbia	15	42

27. Seputih Surabaya	12	84
28. Bandar Surabaya	15	23
Jumlah/Total	610	37 631

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah

2.4.2 Penghasilan Masyarakat

Pendapatan masyarakat penduduk Kabupaten Lampung Tengah secara umum, seperti juga telah diperlihatkan data-data sebelumnya, adalah bersumber dari pertanian. Tabel berikut ini memperlihatkan proporsi besarnya jumlah penghasilan kotor penduduk Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan lapangan usaha yang dilakukan. Angka yang ada diperlihatkan untuk mewakili besaran juta rupiah.

Tabel 14 Pendapatan Kotor (Juta Rupiah) di Kabupaten Lampung Tengah

Kategori	PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA			
	2015	2016	2017	2018
(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,079,879.67	14,675,525.18	15,262,870.70	15,787,646.77
(B) Pertambangan dan Penggalian	1,744,627.21	1,857,460.87	1,970,294.52	2,083,260.28
(C) Industri Pengolahan	8,731,752.98	9,245,936.85	9,748,220.73	10,314,772.98
(D) Pengadaan Listrik dan Gas	33,408.43	39,230.43	47,352.43	51,548.55
(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,571.68	15,173.70	15,775.73	15,829.32
(F) Konstruksi	3,843,179.86	4,241,862.82	4,640,545.77	5,036,459.35
(G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,370,499.04	4,458,948.02	4,547,397.00	4,820,929.05
(H) Transportasi dan Pergudangan	1,016,191.28	1,098,740.80	1,181,290.32	1,248,788.63
(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	371,589.55	395,275.00	418,960.46	454,423.99
(J) Informasi dan Komunikasi	1,239,822.86	1,443,405.28	1,646,987.70	1,788,669.07

(K) Jasa Keuangan dan Asuransi	627,315.57	649,592.48	671,869.40	696,588.59
(L) Real Estate	765,272.97	806,971.25	848,669.53	893,517.41
(M,N) Jasa Perusahaan	42,850.36	44,073.00	45,295.65	47,228.60
(O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	600,427.70	627,658.63	654,889.56	687,946.44
(P) Jasa Pendidikan	872,026.33	909,480.40	946,934.47	1,027,090.47
(Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	201,990.27	214,492.83	226,995.39	240,477.17
(R,S,T,U) Jasa lainnya	218,393.67	225,546.64	232,699.61	248,847.79
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	38,773,799.41	40,949,374.19	43,107,048.96	45,444,024.47

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2019

2.4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tercermin dari besarnya persentase peningkatan/penurunan PDRB *adh konstan* terhadap PDRB *adh konstan* tahun sebelumnya. Penggunaan PDRB *adh konstan* dimaksudkan untuk menghilangkan pengaruh perubahan tingkat harga barang dan jasa. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi wilayah menggambarkan tingkat perkembangan riil atau perkembangan volume produksi barang dan jasa di wilayah bersangkutan.

Dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya, pada tahun 2016 tercatat tujuh kabupaten/kota memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Provinsi Lampung (5,15 persen) yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi di Kabupaten Lampung Timur (4,20 persen). Jika seluruh kabupaten/kota diklasifikasikan menurut kelompok laju pertumbuhannya, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2016 terlihat pada Tabel 2.3. berikut :

Table 15 Pertumbuhan Ekonomi Regional Kabupaten/kota menurut Kelompok Laju Pertumbuhan, 2016

Laju	Kabupaten/Kota	Jumlah
------	----------------	--------

Pertumbuhan (%)		Kabupate/kota
(1)	(2)	(3)
2,0-4,9	Lampung Timur	1
5,0-5,9	Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesisir Barat, Metro	13
6,0-6,9	Bandar Lampung	1

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Selengkapnya perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam periode 2012- 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 16 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota (Persen) 2012-2016

Kabupaten	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Lampung Barat</i>	6,37	6,87	5,56	5,32	5,01
<i>Tanggamus</i>	9,19	6,76	5,90	5,50	5,18
<i>Lampung Selatan</i>	5,96	6,41	5,80	5,38	5,22
<i>Lampung Timur</i>	4,24	8,96	2,87	4,58	4,20
<i>Lampung Tengah</i>	5,95	6,46	5,68	5,38	5,61
<i>Lampung Utara</i>	5,64	6,46	5,80	5,43	5,10
<i>Way Kanan</i>	5,55	5,28	5,67	5,27	5,14
<i>Tulang Bawang</i>	5,29	6,75	5,54	5,02	5,42
<i>Pringsewu</i>	6,44	6,43	5,75	5,22	5,04
<i>Pesawaran</i>	5,87	6,20	5,59	5,03	5,07
<i>Mesuji</i>	5,57	6,18	5,69	5,24	5,10
<i>Tulang Bawang Barat</i>	5,75	6,37	5,50	5,35	5,27
<i>Pesisir Barat</i>	-	5,54	5,10	4,94	5,31
<i>Bandar Lampung</i>	6,65	6,90	6,92	6,33	6,43
<i>Metro</i>	6,69	6,89	6,13	5,87	5,90
Provinsi Lampung	6,44	5,77	5,08	5,13	5,15

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2016

2.4.4 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita penduduk diperoleh dengan membagi besaran PDRB masing masing wilayah dengan banyaknya penduduk pertengahan tahun di wilayah bersangkutan.

Indikator ini dengan segala kelemahannya lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Dengan tingkat perekonomian yang tertinggi dan jumlah penduduk yang relatif kecil, maka Kota Bandar Lampung dalam periode 2014-2018 tercatat sebagai penerima PDRB per kapita terbesar, bahkan lebih tinggi dari PDRB per kapita Provinsi Lampung. PDRB per kapita penduduk Lampung pada tahun 2018 meningkat sebesar 7,75 persen menjadi Rp.39,86 juta bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan dalam periode yang sama PDRB per kapita Kota Bandar Lampung tahun 2018 meningkat sebesar 7,37 persen menjadi Rp.53,67 juta bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penduduk Lampung Barat tercatat sebagai penerima rata-rata pendapatan terkecil dalam kurun waktu tahun 2014-2018. Tahun 2016, PDRB per kapita Lampung Barat meningkat sebesar 9,09 persen menjadi Rp. 19,08 juta bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selengkapnya PDRB per kapita masing-masing kabupaten/kota dalam kurun waktu 2014-2018 terlihat pada berikut:

Table 17 PDRB Per Kapita Kabupaten/kota (Ribu Rp.), 2014-2018

Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Lampung Barat</i>	16 041,05	17 493,08	19 083,92	20 638,92	22 172,85
<i>Tanggamus</i>	17 986,99	19 394,13	21 241,67	22 960,88	24 696,38
<i>Lampung Selatan</i>	29 388,90	32 298,44	35 511,43	38 838,06	41 886,56
<i>Lampung Timur</i>	29 573,92	30 379,62	32 188,08	35 475,00	38 807,03
<i>Lampung Tengah</i>	36 145,14	39 446,80	44 121,30	48 588,32	52 097,07
<i>Lampung Utara</i>	25 535,80	27 786,73	30 785,92	33 673,26	36 585,83
<i>Way Kanan</i>	21 392,14	23 244,79	25 279,90	27 516,81	29 515,10
<i>Tulang Bawang</i>	35 259,41	37 703,10	41 349,20	45 171,09	48 526,68
<i>Pesawaran</i>	25 665,52	27 478,46	29 825,45	32 119,06	34 602,56
<i>Mesuji</i>	34 000,42	37 260,48	41 209,04	24 812,20	26 612,48
<i>Pringsewu</i>	19 208,01	20 773,18	22 780,22	45 225,46	49 036,21
<i>Tulang Bawang Barat</i>	28 219,81	30 714,94	33 868,64	36 722,65	39 629,71

<i>Pesisir Barat</i>	19 684,31	21 561,20	23 727,17	25 974,41	27 986,51
<i>Bandar Lampung</i>	36 771,14	40 262,89	44 843,79	49 981,55	53 665,39
<i>Metro</i>	25 639,52	28 014,60	31 092,90	33 655,47	35 684,20
<i>Provinsi Lampung</i>	28 755,17	31 195,87	34 260,61	36 998,24	39 864,05

BAB III

TINJAUAN ATURAN TEKNIS DAN

AKADEMIS



3.1 Konsep Pembangunan

Hingga saat ini, konsep pembangunan telah menjadi ideologi yang menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam upaya mengejar pertumbuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan sangat berhubungan dengan sosiologi pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya merupakan usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih tenteram, serta lebih menjamin kelangsungan hidup di hari depan. Dalam konteks ke-Indonesia-an, harapan tersebut diwujudkan dengan kata “adil” dan “makmur”. Dalam konteks ini, tentu saja setiap pembangunan menghendaki adanya perubahan dan perubahan merupakan proses dan usaha yang diarahkan dengan maksud mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Dengan demikian, proses atau usaha pembangunan memiliki arti humanisasi, yaitu memanusiakan manusia atau masyarakat (Arbi Sanit, 1987: 112).

Pembangunan adalah proses yang historikal (Gunawan Sumodiningrat, dkk., 2005: 1). Sebuah proses yang bergulir dari waktu ke waktu, tidak pernah berhenti, dan perubahan itu sendiri tidak pernah berganti. Perubahan ke arah perbaikan memerlukan pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dengan sendirinya, pembangunan merupakan proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia. Pembangunan tidak dapat berhenti atau dihentikan karena manusia hidup selalu dipenuhi oleh suasana perubahan. Inti pembangunan bukan hanya terjadinya perubahan struktur fisik atau material, melainkan juga menyangkut perubahan sikap masyarakat. Pembangunan harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan aspek-aspek materi dari kehidupannya sehari-hari.

Pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas. Secara sederhana, pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta pembangunan bangsa. Secara terminologis, pembangunan identik dengan istilah *development*, *modernization*, *westernization*, *empowering*, *industrialization*, *economic growth*, *europanization*, bahkan terma *political change*. Identifikasi tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang *multiinterpretable* sehingga istilah tersebut sering disamakan dengan beberapa terma lain yang berlainan arti (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004: 23).

Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu. Pembangunan adalah upaya memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada. Pembangunan juga berarti seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu

mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan.

Secara teoretis, pembangunan dapat dijelaskan dalam dua paradigma, yaitu teori modernisasi dan imperialisme seperti dijelaskan di bawah ini:

1. Teori Modernisasi

Teori ini mengutamakan aspek ekonomi dan sosiologi. Rostow dalam teori ekonominya menyatakan pembangunan lebih ditekankan pada tahapan pertumbuhan ekonomi (*the stages of economic growth*). Berbeda dengan pandangan ekonomi, dalam pandangan sosiologi, pembangunan lebih ditekankan pada perubahan besar pada sektor nonekonomi yang menyangkut perubahan yang mengandung berbagai macam perbedaan. Perbedaan dalam konsep pemikiran ini adalah perbedaan watak atau karakter antara bangsa di negara maju dan negara sedang berkembang. Dengan demikian, pembangunan dapat dijelaskan pada perubahan karakter atau mentalitas bangsa untuk mengambil sampel dari negara-negara industri maju ini. Akan tetapi, apakah negara berkembang dapat dipaksakan untuk meniru negara industri maju dengan perbedaan kultural di antara keduanya. Selain itu, jika pembangunan lebih dititikberatkan pada persoalan antara pertumbuhan tahapan ekonomi dan watak atau karakter antarbangsa, sehingga timbul skala prioritas, manakah yang hendak didahulukan antara membangun karakter dan pertumbuhan ekonomi?

2. Teori Imperialisme

Teori imperialisme yang berpijak pada konsep pemikiran Marxis lebih berasumsi bahwa kekayaan milik negara Barat adalah hasil dari pencurian. Neo-Marxisme berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang adalah kemiskinan dan keterbelakangan yang erat sekali dengan faktor historis, yaitu eksploitasi, pemerasan, dan penjajahan. Ini merupakan kenyataan dalam sejarah karena kemiskinan negara-negara berkembang memang disebabkan faktor-faktor yang bersifat struktural. Dengan kata lain, kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan sengaja diciptakan oleh struktur politik dalam masa kolonialisme Barat.

Melihat definisi tersebut, jelas bahwa pembangunan merupakan perubahan, perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik atau usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat. Kemajuan ini sering dikaitkan dengan kemajuan material sehingga pembangunan sering diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat di bidang ekonomi. Hal ini pula yang mengaitkan beberapa pengertian pembangunan dengan ukuran ekonomi. Dalam literatur-literatur ekonomi, pembangunan didefinisikan sebagai proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan real per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya (Afifuddin, 2010: 67). Para ahli ekonomi secara berbeda mendefinisikan pembangunan sesuai dengan seleranya sehingga definisi tentang pembangunan pun sedemikian banyak dan berbeda satu sama lain. Sekalipun demikian, secara garis besar istilah pembangunan dapat dikelompokkan dalam dua bagian berdasarkan periode waktunya, yaitu pandangan lama berdasarkan ukuran ekonomi tradisional dan pandangan baru ekonomi pembangunan.

Ruang lingkup pembangunan, yaitu sebagai berikut.

1. Pembangunan di Bidang Ekonomi

Pembangunan ekonomi (*economic development*) sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pembangunan ekonomi berfungsi dalam rangka mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan bangsa dan negara. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu bangsa atau negara. Adapun pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapat nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan pendapatan masyarakat.

Perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar

pendapatan dan tingkat *output* produksi yang dihasilkan. Adapun pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan nilai produksi, melainkan juga terdapat perubahan dalam struktur produksi, alokasi pembiayaan, dan jenis alat produksi yang digunakan. Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut.

a. Sumber daya alam. Memang sangat diakui bahwa sumber kehidupan manusia hampir dapat dikatakan bersumber dari alam, kekayaan alam, kesuburan tanah, kondisi iklim atau cuaca, potensi hutan, potensi tambang, potensi laut, dan sebagainya, yang sangat memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bagi negara yang bersangkutan, terutama ketersediaan bahan baku produksi sehingga proses pengolahannya senantiasa berkelanjutan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

b. Sumber daya manusia. Salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara adalah melalui jumlah dan kualitas penduduk atau manusia. Jumlah penduduk atau manusia yang besar merupakan pasar potensial untuk dijadikan sasaran memasarkan hasil-hasil produksi yang telah dilakukan, sementara kualitas penduduk atau manusia sangat menentukan seberapa besar produktivitas yang dapat dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, terutama manfaatnya kepada bangsa dan negara serta masyarakat pada umumnya.

c. Permodalan. Sumber daya modal yang memadai merupakan faktor penunjang dalam rangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sumber daya modal sangat dibutuhkan suatu bangsa, negara, pemerintahan, untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

d. Lapangan kerja. Pengangguran karena tidak tersedianya lapangan kerja merupakan masalah utama terhadap pertumbuhan dan pembangunan di bidang ekonomi.

Sebaliknya, ketersediaan lapangan kerja bagi pencari kerja akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bagi negara yang bersangkutan.

e. Keahlian atau kewirausahaan. Pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi sehingga bisa langsung digunakan masyarakat sangat diperlukan keahlian atau kemahiran untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Sekalipun demikian, masyarakat dalam sebuah negara atau bangsa yang memiliki keahlian, tetapi tidak memiliki jiwa kewirausahaan, tidak akan menyelesaikan masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat tercapai apabila masyarakat memiliki keahlian pada bidang tertentu dan memiliki jiwa kewirausahaan.

f. Kestabilan politik. Kondisi politik suatu negara yang berubah-ubah sulit untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan di bidang ekonomi. Hal ini disebabkan kestabilan politik merupakan modal dasar untuk melakukan berbagai aktivitas untuk mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat dalam sebuah negara atau bangsa.

g. Kebijakan pemerintah. Pertumbuhan dan pembangunan di bidang ekonomi kebijakan pemerintah turut memegang peranan. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah yang tidak mendukung aktivitas di bidang ekonomi sudah pasti mengalami kemerosotan pertumbuhan dan pembangunan di bidang ekonomi. Demikian pula sebaliknya, apabila kebijakan pemerintah itu mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan dan pembangunan akan dapat berlangsung dengan baik.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, khususnya di Indonesia telah banyak memberikan kemajuan, baik di bidang kehidupan fisik maupun nonfisik. Akan tetapi, pada kenyataannya, kondisi perekonomian Indonesia masih sangat rentan terhadap kondisi eksternal dan internal, terutama yang berkaitan pada bidang pasar finansial dan pasar komoditas. Kemajuan ekonomi yang telah dicapai ternyata sangat tidak merata secara adil antardaerah ataupun antarkelompok sosial ekonomi. Etika perekonomian senantiasa menekankan pada persepsi secara kolektif tentang sesuatu yang dianggap baik dan adil, untuk masa kini ataupun mendatang, tetapi juga tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan oleh semua anggota masyarakat. Pembangunan tidak hanya

berfokus pada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga pada terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik, pemerataan, dan keadilan sosial. Fondasi moral kebijakan pembangunan ekonomi harus dapat memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia.

2. Pembangunan di Bidang Politik

Konfigurasi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang politik yang dilakukan oleh para evaluator bertujuan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu aktivitas di bidang pembangunan sehingga fenomena yang tergambar dalam kehidupan masyarakat dalam sebuah negara atau bangsa mengharuskan terciptanya dua jenis kekuatan. *Pertama*, kekuasaan yang dilakukan oleh kaum politisi

bahwa untuk menetapkan suatu kebijakan dalam pelaksanaan dari berbagai jenis pembangunan lebih banyak diwarnai atau ditentukan oleh kemauan atau kekuasaan politik. *Kedua*, kekuatan yang tercipta atas ketentuan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh kaum birokrasi yang mengatasnamakan publik untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat, tetapi sesungguhnya lebih berorientasi pada memenuhi desakan atau tuntutan kebutuhan ataupun keinginannya sendiri. Pembangunan di bidang politik senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan ideologi pembangunan, bahkan lebih diperkuat yang tujuan dan sasarannya bahwa semua manfaat dari hasil pembangunan pada akhirnya akan diperluas pada semua sektor dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang kita pahami sebagai argumentasi kesejahteraan atau manfaat diteteskan ke bawah (*trickle down effect*) sehingga melahirkan ungkapan bahwa perusahaan besar memiliki kewajiban mengasuh perusahaan kecil, orang kaya mengasuh orang miskin, dan sebagainya.

Apabila kita memerhatikan hasil kajian dan pengalaman dari berbagai pihak, jelas bahwa pernyataan politik terhadap kepentingan masyarakat pada kenyataannya hanya merupakan topeng. Hal tersebut disebabkan tujuan utamanya adalah memenuhi kepentingan kelompok tertentu. Orientasi pembangunan politik seperti ini tidak menyejahterakan masyarakat, tetapi justru semakin menyengsarakan masyarakat

dalam kemiskinan, terutama mereka pada masyarakat pada level bawah secara individual. Kenyataan ini dijadikan isu sentral bagi partai politik untuk menciptakan propaganda kepada golongan masyarakat tersebut dalam menjalankan aksi politiknya.

3. Pembangunan di Bidang Sosial

Tujuan utama pembangunan di bidang sosial (*social development*) adalah mengurangi penderitaan manusia, baik yang disebabkan oleh bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya, maupun yang disebabkan oleh perbuatan manusia dengan pemikiran dan tindakan melalui program yang dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pembangunan sosial merupakan salah satu bentuk pendekatan pembangunan secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan kehidupan manusia yang dilandasi adanya rasa keadilan, kedamaian, dan terwujudnya kesejahteraan, yaitu memenuhi kebutuhan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, dan kebutuhan sosial. Secara kontekstual, pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan daripada pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, tetapi dinikmati sekelompok kecil orang saja.

Beberapa program pemerintah yang menjadi pusat perhatian dalam kaitannya dengan program pembangunan sosial, mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan, dengan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, misalnya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Program pembangunan nasional harus dilakukan secara sistematis, rasional, efektif, dan efisien, yang sasaran utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat atau manusia Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bagi Negara Republik Indonesia yang mengisyaratkan bahwa untuk terwujudnya kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah melalui usaha pembangunan sosial.

Pembangunan sosial dapat dilakukan secara individual atau perseorangan ataupun secara kolektif atau kelompok. Pembangunan sosial juga merupakan suatu proses yang mengangkat hubungan kekuasaan-kekuatan yang berubah menjadi hubungan pemberdayaan antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosialnya. Usaha pelaksanaan pembangunan dalam rangka memenuhi taraf kesejahteraan sosial perlu terus dikembangkan karena sebagian besar rakyat Indonesia belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diharapkan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh elemen bangsa untuk pemenuhan kesejahteraan sosial menjadi isu secara nasional. Asumsinya bahwa kemajuan bangsa ataupun keberhasilan suatu rezim pemerintahan tidak lagi dilihat hanya meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi karena kemampuan penanganan terhadap masalah kesejahteraan sosial pun menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan, seperti penanganan masalah kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial ataupun korban bencana alam dan sosial.

4. Pembangunan di Bidang Lingkungan

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan serta berkelanjutan dengan jalan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam pada satu pihak dan sumber daya manusia pada pihak lain. Pelaksanaan pembangunan lingkungan dapat dilakukan dengan cara menyeraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang tersedia dengan tidak menciptakan adanya perusakan kondisi alam lingkungan, baik secara geografis maupun demografis. Kunci utama keberhasilan pembangunan lingkungan hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang dasar hukumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembangunan atau pembenahan faktor lingkungan bukanlah suatu hal yang baru, tetapi telah ada sejak manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya karena kehidupan manusia sangat bergantung pada lingkungannya. Demikian pula, sebaliknya bahwa kelestarian lingkungan sangat bergantung juga pada peranan manusia terhadap pembenahannya. Pembangunan lingkungan dapat dilihat dari segi sumber daya alam, misalnya pembukaan lahan untuk pertanian, pembuatan bendungan air untuk irigasi,

dan sebagainya yang bertujuan untuk menciptakan pemenuhan kebutuhan manusia agar bisa hidup lebih sejahtera. Dengan syarat, pemanfaatan sumber daya alam yang secara berlebihan agar tidak membawa malapetaka bagi manusia itu sendiri.

Selanjutnya, fenomena pembangunan lingkungan yang berkaitan dengan tumbuhan, yang semakin lama semakin memprihatinkan karena manusia tidak lagi memerhatikan dampak lingkungan atas usaha yang dilakukan dengan eksploitasi hutan-hutan yang tidak dilandasi nilai-nilai etika dan estetika. Eksploitasi hutan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu senantiasa menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat atau dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan ataupun etika dan estetika yang dianut oleh masyarakat setempat. Penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, yang mengatasnamakan pembangunan lingkungan, tetapi sebenarnya merusak lingkungan baik dilihat dari segi alam sehingga melahirkan bencana alam, memusnahkan kelangsungan hidup tumbuhan tertentu yang selanjutnya akan menyengsarakan masyarakat bersangkutan.

3.2 Kebijakan Sosial

Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah sehingga perbaikan dan peningkatan kualitas hidup manusia dapat tercapai. Suatu perangkat pedoman yang memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat pula disebut sebagai kebijakan. Lebih lanjut, kebijakan yang dirancang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kualitas hidup masyarakat tersebut didefinisikan sebagai kebijakan sosial (Midgley and Livermore, 2009 : x). Midgley kemudian membagi kebijakan sosial kedalam dua aspek. Pertama, kebijakan sosial dipahami sebagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah, yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan harkat manusia.

Kedua, kebijakan sosial dipahami sebagai kegiatan akademik yang mencakup deskripsi, eksplanasi, dan evaluasi terhadap kebijakan sosial. Melihat pendapat Midgley tersebut, dapat dikatakan bahwa kebijakan sosial berkaitan dengan kesejahteraan

masyarakat atau kesejahteraan sosial. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Zastrow (2010 : 2) yang mengemukakan bahwa tujuan dari kesejahteraan sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, kesehatan, dan rekreasional pada setiap individu di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dari kebijakan sosial disusun program-program pelayanan sosial kepada masyarakat. Lebih lanjut, kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dapat dimaknai secara sempit dan secara luas. Secara sempit, kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah antara lain dapat dilihat dari program-program pelayanan sosial dalam bidang kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Deacon (2002 : 4) yaitu pelayanan sosial di bidang kesehatan, pelayanan sosial di bidang pendidikan, pelayanan sosial di bidang perumahan, serta layanan sosial personal. Secara luas, kebijakan sosial dimaknai sebagai kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*), yakni apa yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi kualitas hidup manusia (Di Nitto, 2003 : 2). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dikategorikan menjadi *public assistance*, *social insurance*, *social service*, serta isu-isu yang mempengaruhi pemenuhan layanan kesejahteraan sosial. Terkait dengan kebijakan sosial, terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan dalam mengkaji kebijakan sosial yang diterapkan oleh pemerintah. Pada umumnya kajian terhadap kebijakan sosial dilakukan untuk mengetahui apakah telah terjadi perubahan atau perbaikan terhadap kondisi kehidupan klien atau kelompok sasaran program. Dengan kata lain, penelitian yang terkait dengan kebijakan sosial tersebut lebih diarahkan pada implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan sosial.

Penelitian mengenai evaluasi kebijakan dilakukan pada program-program yang dijalankan oleh pemerintah (Mujiyadi dan Sumarno, 2013; Suradi, 2012; Habibullah dan Noviana, 2013; Widodo, dkk., 2010; Sumarno dan Roebiyantho, 2013; Anasiru, 2011; Supeno, 2006). Selain evaluasi kebijakan sosial, penelitian lain mengenai kebijakan sosial diarahkan pada implementasi dari kebijakan sosial (Astuti, 2013; Padmini, dkk., 2013; Purwanto dan Syawie, 2013; Fatony, 2011; Suradi, dkk., 2013). Kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut adalah bahwa kebijakan dan program pelayanan telah banyak dilakukan namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan pencapaian tujuan program. Meskipun kebijakan sosial, yang menjadi pedoman dalam penyusunan program, telah dirancang dengan baik, tidak berarti

pelaksanaannya akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut dapat diinterpretasikan oleh pihak-pihak yang terkait. Terutama, bagaimana suatu kebijakan diinterpretasikan menjadi pedoman yang lebih aplikatif untuk menjadi panduan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Untuk memahami interpretasi pada kebijakan tersebut dapat dilihat dari pandangan Jamrozik mengenai level dalam kebijakan sosial. Jamrozik (2001 : 51-52) menjelaskan bahwa kebijakan sosial merupakan suatu rangkaian proses, yang meliputi tiga level, yaitu level politik (*political sphere*), level administratif (*administrative sphere*), dan level operasional (*operational sphere*). Level politik merupakan proses perencanaan dan formulasi kebijakan (*policy planning and formulation*). Level administratif merupakan proses interpretasi dan penyusunan kebijakan menjadi serangkaian kegiatan yang lebih operasional. Proses intepretasi tersebut sebagai kerangka kerja untuk level operasional dimana pelayanan sosial (*service delivery*) yang sebenarnya dilaksanakan langsung kepada masyarakat (*service-receiving public*).

Blackmore and Griggs (2007 : 1), yang mendefinisikan tujuan kebijakan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (meskipun seringkali mengalami kegagalan) serta untuk memenuhi kebutuhan individu seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial. Pemenuhan kebutuhan individu dan peningkatan kesejahteraan sosial ini menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial sangat kental dalam kebijakan sosial. Dari pandangan tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan sosial memiliki dua sasaran utama yakni peningkatan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan individu.

Pemisahan dua sasaran tersebut menunjukkan bahwa kebijakan sosial tidak hanya terkait dengan layanan-layanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial. Melainkan juga dengan upayaupaya yang mendorong terciptanya kesejahteraan sosial di masyarakat. Pandangan lain mengenai pemahaman kebijakan sosial juga dapat dilihat dari pendapat Jamrozik mengenai definisi kebijakan sosial. Kebijakan sosial dikemukakan oleh Jamrozik (2001: 37) sebagai sebuah mekanisme untuk mengalokasikan sumberdaya yang ada pada masyarakat dengan

tujuan untuk mencapai outcome tertentu sesuai harapan nilai-nilai dominan masyarakat serta tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditentukan. Lebih lanjut, dijelaskan oleh Jamrozik bahwa kebijakan sosial pada hakekatnya berurusan dengan pengaturan hubungan sosial yang bertujuan untuk menegaskan nilai-nilai dan kepentingan tertentu. Hal tersebut dilakukan melalui implementasi pendekatan yang sesuai yang didesain untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Berbeda dengan Jamrozik, Midgley and Livermore (2009 : 5) membagi kebijakan sosial kedalam dua aspek. Pertama kebijakan sosial dipahami sebagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah, yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan harkat manusia. Kedua, kebijakan social dipahami sebagai kegiatan akademik yang mencakup deskripsi, eksplanasi, dan evaluasi terhadap kebijakan sosial. Pandangan Midgley tersebut diperkuat oleh pendapat Deacon (2002 : 4-8) yang menyatakan bahwa kebijakan sosial sebagai suatu kajian dan analisis seringkali dipandang tidak memiliki hubungan yang erat dengan ilmu sosial lainnya seperti ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, dan ilmu politik. Namun, pandangan tersebut terbantahkan ketika melihat pada manfaat dari jaminan sosial atau administrasi dari sistem layanan kesehatan. Pendukung kajian kebijakan sosial justru melihat bahwa kajian tersebut memiliki hubungan yang erat dengan ilmu sosial lainnya ketika mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan menggunakan kerangka kerja analitisnya dan penekanan pada isu keadilan sosial dan kebutuhan manusia.

Bahasan dan kajian kebijakan sosial dapat dilihat dari beragam cara dan saling mengikat satu dengan lainnya. Pada satu sisi, ini merupakan kebijakan dan praktik dalam menyelenggarakan layanan kesehatan, layanan jaminan sosial atau perlindungan sosial, layanan pendidikan, dan layanan perumahan. Sementara kajian kebijakan sosial ini dianggap sebagai bagian dari sektor kebijakan yang dikembangkan di negara-negara kesejahteraan, kajian ini mulai tumbuh dan diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang (Hall and Midgley, 2004; Mkandawire, 2005). Ketika diterapkan di negara-negara tersebut, perlu dilakukan modifikasi untuk mengubah kerangka berpikir dan merangkul masyarakat miskin sehingga kesejahteraan sosial dapat diwujudkan (Gough and Woods, 2004). Karena itu kajian kebijakan sosial merupakan bagian dari kajian

negara kesejahteraan dan kajian pembangunan pada pengembangan negara kesejahteraan. Pemisahan kedua konsep tersebut akan mengaburkan tentang pemahaman kajian pembangunan di negara kesejahteraan serta kebijakan sosial dalam konteks pembangunan yang hanya fokus pada kemiskinan, akibatnya akan melupakan isu keadilan dan universalisme. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan sosial memiliki dua sasaran utama yakni peningkatan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan individu yang terkait dengan layanan dalam bidang pendidikan, layanan dalam bidang kesehatan, layanan dalam bidang perumahan, dan layanan jaminan sosial.

3.3 Pembangunan Menurut Kacamata Antropologi

Dalam hubungan terapan, penelitian dasar dilangsungkan untuk masalah-masalah yang umum dari perubahan sosial dan budaya, dan untuk meningkatkan masalah-masalah dalam penggunaan pengetahuan. Ahli antropologi terapan melakukan penelitian dasar supaya memperoleh pemahaman terhadap perilaku manusia secara lebih besar, khususnya dihubungkan pada masalah kebijaksanaan. Dengan begitu, peranan secara umum dari antropologi terapan sebagai penengah antara pengetahuan dan penggunaannya, yaitu lebih dekat dengan proses pengambilan keputusan pengenalan inovasi. Menurut Rogers dan Shoemaker (1981: 41-43), tipe pengetahuan dalam tahap pengenalan inovasi yaitu kesadaran / pengetahuan mengenai adanya inovasi, pengetahuan “teknis”, dan pengetahuan “prinsip”. Pengetahuan/kesadaran akan menimbulkan kebutuhan atau sebaliknya kebutuhan dapat menimbulkan kesadaran adanya inovasi. Pengetahuan “teknis” meliputi informasi yang diperlukan mengenai cara pemakaian atau penggunaan suatu inovasi. Hal ini untuk mengantisipasi sebagai suatu pentingnya adanya program yang mempunyai kelanjutan yang efektif, yaitu perlu adanya suatu program lanjutan yang efektif untuk setiap proyek yang dimulai. Proyek/program perlu pengetahuan teknik, yaitu pengetahuan ketrampilan untuk kelangsungan proyek kaitannya dengan perawatan, berarti untuk pengadopsian pengetahuan juga harus dibarengi dengan pengetahuan ketrampilan/ teknis (Ihromi, 1990:134).

Selanjutnya, pengetahuan berkenaan dengan prinsip-prinsip berfungsinya suatu inovasi. Seseorang mengadopsi dan menggunakan inovasi tanpa memiliki pengetahuan “prinsip”, tetapi kemudian seseorang untuk meramal kegunaan inovasi dalam jangka panjang lebih mudah jika pengadopsian dilengkapi dengan pengetahuan “prinsip”, misalnya teori kuman merupakan dasar vaksinasi (Rogers dan Shoemaker, 1981:43). Contoh ini sangat baik sebagai contoh masuknya ahli antropologi terapan dalam program imunisasi. Salah satunya misalnya masalah etiologi sehubungan dengan pemahaman teori kuman sebagai dasar vaksinasi. Ide yang dibawa oleh *provider* (pembawa program) tentang etiologi penyakit campak adalah virus. Masyarakat penerima program (*recipient*) mempunyai konsep sakit (etiologi penyakit) campak bahwa campak adalah penyakit lumrah yang biasa diderita oleh anak-anak (Kasnyiah, 1986/87; 1992).

Perubahan dalam sistem ide memerlukan penetapan kembali isi, perubahan dalam organisasi, dan perubahan dalam premis- premis dan nilai. Hal ini menempatkan perubahan dalam dasar-dasar dan perubahan dalam cara-cara yang diterapkan mereka. Eksplorasi proses-proses perubahan adalah tantangan yang utama untuk antropologi. Dimensi penting dari proses akulturasi adalah kesesuaian antara dua sistem budaya yang terlibat. Tanpa model struktur budaya yang baik, akan sulit, tetapi jika kedua sistem ide premis dan nilai umumnya secara pasti, atau dapat dicocokkan bersama-sama, atau sebaliknya, mungkin tidak dapat dilaksanakan (Keesing dan Keesing, 1971:354). Antropologi dapat berperan serta banyak dalam mengkaji masalah-masalah ekonomi pembangunan, lebih-lebih kalau pembangunan nasional tidak hanya dikonsepsikan sebagai pembangunan ekonomi saja, tetapi juga sebagai pembangunan semesta yang menyangkut semua sektor kehidupan nasional, termasuk sektor kehidupan sosial, politik, agama, dan budaya. Walaupun demikian, pada awal perjalanan kariernya, antropologi terapan cenderung lebih menangan pada perubahan-perubahan di bidang pertanian, pendidikan dan kesehatan.

Peranan yang utama ahli antropologi terapan dalam pembangunan adalah melaksanakan penelitian terhadap masalah-masalah pembangunan. Pelaksanaan ini guna membantu perencanaan pembangunan yang biasanya dilaksanakan bersama oleh

para ahli dalam berbagai disiplin ilmiah. Di samping itu, yang dilaksanakan oleh para pelaksana pembangunan yang memperhatikannya, dan oleh para pegawai pemerintah yang bekerja dalam badan-badan perencanaan nasional atau daerah. Jadi, ahli antropologi dapat dan harus terlibat dalam perencanaan pembangunan/perubahan mulai dari awal perencanaan, yaitu untuk mencari tahu faktor-faktor apa saja yang sekiranya menjadi pendorong atau penghambat kalau akan diadakan perubahan atau pembangunan. Masalah tersebut menyangkut studi kelayakan (layak atau tidak) proyek itu dilaksanakan, bukan saja studi kesiapan prasarana fisik, yaitu lokasinya layak atau cocok, jaraknya, sarana transportasi dan sebagainya; tetapi perlu diteliti pula keadaan sosialnya seperti keadaan lingkungan sosial sebagai sumber tenaga kerja, sikap penduduk terhadap perubahan dan kemajuan, dan seterusnya. Dengan cara inilah antropologi dapat melakukan penelitian yang bermakna (Koentjaraningrat, 1993:223-224). Keterlibatan antropologi dalam studi kelayakan ini yang sering disebut sebagai peran antropologi dalam kegiatan intervensi kepada masyarakat. Istilah studi kelayakan sosial budaya belum populer, sepopuler studi kelayakan lingkungan (SDA), sedangkan studi kelayakan sosial budaya yang menyangkut pada masalah manusianya (SDM).

Selanjutnya, pada taraf sewaktu proyek pembangunan itu telah berjalan, perlu diadakan penelitian mengenai akibat sosial dari pembangunan suatu industri misalnya, yaitu perubahan sosial budaya yang positif, dan akibat-akibat sampingan yang negatif seperti terjadinya pencemaran alam atau ketegangan-ketegangan etnik antara angkatan kerja industri itu, atau angkatan kerja pendatang dan penduduk asli, yang seringkali berlatar belakang kebudayaan yang berbeda (Koentjaraningrat, 1993:224). Oleh karena itu, peranan ahli antropologi: "bertanggung jawab" pula pada jalannya pembangunan tersebut. Dengan kata lain, posisi ahli antropologi dalam rangka pembangunan atau modernisasi, khususnya pada pengenalan ide-ide baru, ahli antropologi harus dilibatkan.

Keterlibatan ahli bidang antropologi mulai dari perencanaan sampai dengan pasca pembangunan: yaitu berkaitan dalam masalah-masalah intervensi dan evaluasi dari program yang direncanakan sesuai dengan tugas-tugas antropologi terapan dalam

perubahan perilaku dan kebudayaan. Hal ini dapat digunakan sebagai parameter keberhasilan program.

Tampaknya, suatu masalah jika dilihat secara sederhana tidak sukar untuk dipecahkan, tetapi kenyataannya, luar biasa sukar, paling sedikit dalam masyarakat yang kompleks mengingat kepentingan pokok dari kelompok penduduk yang berbeda tidaklah sama. Dalam perspektif antropologi, masalah tersebut dikaji dengan konsep holistik yang merupakan pusat untuk pemahaman secara antropologis karena peristiwa manusia harus dilihat dalam konteks yang luas yang terjadi secara alami dan yang harus dilihat dari arti sifat orang kepada kehidupan mereka, khususnya pada sekitar kebudayaan mereka (Chambers, 1985:3).

Salah satu bidang yang menjadi fokus kajian antropologi adalah pembangunan. Dalam perspektif antropologi, pembangunan adalah bagian dari kebudayaan. Pembangunan adalah eksistensi dari sejumlah tindakan manusia. Sementara, kebudayaan merupakan pedoman bagi tindakan manusia. Dengan demikian berdasarkan pemahaman antropologi, pembangunan berorientasi dan bertujuan untuk membangun masyarakat dan peradaban umat manusia. Pembangunan berisi suatu kompleks tindakan manusia yang cukup rumit yang melibatkan sejumlah pranata dalam masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (1980) bahwa hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Dalam pembangunan, masyarakat menjadi pelaku dan sekaligus objek dari aktivitas pembangunan. Keterkaitan atau korelasi antara masyarakat dan pembangunan akan terjadi melalui pengendalian dari kebudayaan. Di dalam kebudayaan, tatanan nilai menjadi inti dan basis bagi tindakan manusia. Fungsi elemen nilai (*cultural value*) bagi pembangunan adalah untuk mengevaluasi proses pembangunan agar tetap sesuai dengan standar dan kadar manusia. Pembangunan dapat diartikan sebagai proses menata dan mengembangkan pranata-pranata dalam masyarakat, yang didalam pranata tersebut berisi nilai-nilai dan norma-norma untuk mengatur dan memberi pedoman bagi eksistensi tindakan masyarakat. Sejumlah pranata tersebut, antara lain pendidikan, agama, ekonomi, politik, ekologi, akan membentuk suatu keterkaitan fungsional guna mendukung, melegitimasi dan mengevaluasi kompleks tindakan manusia tersebut. Dengan kata lain, pembangunan

akan menyinggung isu pemeliharaan nilai dan norma masyarakat, namun sekaligus membuka ruang bagi isu perubahan sosial.

Dewasa ini, praktik pengembangan masyarakat telah bergeser paradigmanya dari yang awalnya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berparadigma berkelanjutan (*sustainable development*). *Community development* dibuat dan diselenggarakan dengan bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat dimana transformasi sosial dapat berlangsung secara berkelanjutan. Antropologi mempelajari kultur dalam masyarakat. Kultur diwujudkan dengan ideational dan behavioral. Ideational membentuk perilaku yang khas dalam masyarakat dan behavioral melihat bagaimana tingkah laku yang berjalan dalam masyarakat. Kultur membentuk masyarakat dalam bertindak dan mempengaruhi bagaimana masyarakat ikut serta dalam pembangunan. Koentjaraningrat pernah mengatakan istilah kebudayaan, sistem nilai budaya dan sikap mental adalah termasuk ke dalam konsep kultur, menurut aliran *cultural developmentalism* (2005:19). Penguasaan akan konsep kultur sesuatu yang mendasar keperluannya bagi antropologi. Antropolog mengenalkan keadaan dunia luar tanpa meninggalkan kultur yang ada dalam masyarakat dan mengatasi hambatan berupa adat istiadat dan sikap mental yang kolot, pranata-pranata sosial dan unsur-unsur kebudayaan tradisional, harus digeser disesuaikan dengan kultur kemajuan demi keperluan hidup masa kini.

3.4 Kebudayaan

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal ini berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah “kebudayaan” karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri, beberapa refleksi, beberapa tindakan akibat proses fisiologi, atau kelakuan membabi buta. Koentjaraningrat (2009: 144-150) mengemukakan bahwa kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu;

1. Suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya,

2. Suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola manusia dalam masyarakat, dan
3. Benda-benda hasil karya manusia.

Ketiga wujud kebudayaan yang dijelaskan oleh Koentjaraningrat di atas saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Namun, untuk keperluan penelitian perlu diadakan pemisahan diantara tiap-tiap wujud tersebut. Penelitian ini akan memfokuskan pada wujud kebudayaan yang pertama yaitu serangkaian ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan hal-hal lainnya yang mempengaruhi pola berfikir dari warga masyarakat tempat kebudayaan yang bersangkutan itu berkembang.

Semua kebudayaan senantiasa mengalami perubahan, baik lambat, cepat, tidak terencana, maupun direncanakan. Perubahan kebudayaan yang direncanakan juga akan membawa konsekuensi, baik positif maupun negatif. Untuk dapat menentukan manfaat secara menyeluruh dari perubahan terencana, penting sekali memahami berbagai segi yang sangat mendasar dari kebudayaan masyarakat setempat yang kemungkinan besar akan mengalami pengaruh dari program tersebut (Ihromi, 1990:121-122). Relativisme kebudayaan adalah juga bagian dari perspektif antropologi yang sangat erat bersatu pada konsep holistik. Ahli antropologi percaya bahwa perbedaan kebudayaan dan gaya hidup hanya dapat dipahami dalam hubungannya pada integritas yang khas (Chambers, 1985:3). "Cara yang khas" dari ilmu antropologi yaitu menekankan pentingnya relativisme kebudayaan dalam menilai cara-cara yang berkaitan dengan cara-cara ukuran Barat atau menurut yang diperkirakan sebagai ukuran universal dalam kebutuhan untuk menginterpretasikan bentuk-bentuk asli dalam konteks budaya tempat bentuk itu ada. Penekanan pada relativisme kebudayaan oleh ahli antropologi itu merupakan suatu landasan pokok bagi bantuan teknis yang sukses dalam bidang kesehatan dan bidang-bidang lain.

Kebudayaan adalah sistem keseimbangan yang rumit yang tidak akan berubah begitu saja, sehingga inovasi yang nampaknya baik bagi suatu bidang (misalnya, pertanian) kemudian menimbulkan perubahan-perubahan kedua dan ketiga di bidang lain (misalnya kesehatan) yang dampaknya melebihi keuntungan yang diharapkan. Hampir selalu terdapat implikasi-implikasi yang tak terduga pada inovasi yang

terencana, beberapa diantaranya ada yang baik, namun banyak yang kemudian tidak diinginkan. Dubos menyebutkan model implikasi yang tak terduga ini dengan istilah ekologi. Semua inovasi teknologi yang berhubungan dengan praktek-prekatek industri, maupun dengan pertanian atau kedokteran, akan mengganggu keseimbangan alam. Kenyataannya menguasai alam sama artinya dengan mengganggu keteraturan alam (DuBos, 1965:416).

3.5 Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Drainase

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan menjelaskan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. upaya investasi dalam pemulihan ekonomi, baik di dalam negeri maupun diluar negeri, dan dipandang sebagai pertumbuhan utama mesin industri konstruksi saat ini. Sayangnya, banyak dari proyek ini tidak berhasil karena perencanaan awal yang buruk (*Gibson, Asce, Bingham, & Stogner, 2010*) perencanaan dan penyediaan infrastruktur cenderung diatasi di sektorkhusus, yang mengabaikan saling ketergantungan antar sektor dan memfokuskan pada penyediaan proyek daripada kinerja sistem. Jaringan infrastruktur merupakan salah satu dampak paling nyata di lingkungan masyarakat, karena infrastruktur sebagian besar terdiridari aset jangka panjang. Perencanaan dan desain dapat mengunci pola pembangunan yang tidak berkelanjutan. Untuk mengarahkan menuju sistem infrastruktur yang lebih berkelanjutan memerlukan transformasi pemikiran dan metodologi. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang atau badan pemerintah untuk merencanakan secara efektif rehabilitasi fasilitas infrastruktur (*"A Decision Support System for Infrastructure Rehabilitation Planning," 1831*). Perencanaan sistem drainase merupakan bagian integral dan penting dari jalan, pembangunan drainase umumnya dirancang berdasarkan rumusan rasional, menggunakan intensitas curah hujan durasi pendek. Area drainase ditentukan dengan menggunakan rencana lokasi dan peta topografi. Perencana sering

mengabaikan analisis kapasitas drainase dalam proses perancangan. Akibatnya, banyak sistem pembuangan mengalir kurang dari kapasitas desain karena limpasan air hujan tidak bisa masuk ke saluran pembuangan. Kapasitas saluran masuk yang tidak memadai dapat menyebabkan banjir di jalan yang menimbulkan genangan baru. Analisis limpasan air hujan dan serapan permukaan tanah merupakan bagian dalam perencanaan.

Faktor ketinggian, elevasi dan kedalaman sangat menjadi penentu keberhasilan perencanaan drainase. Banyak sistem drainase yang mahal mengalir di bawah kapasitas karena inlet yang tidak memadai. Desain sistem drainase dimulai dengan perhitungan limpasan (*Boswell, 2004*) Dalam konsep penerapan manajemen strategi perencanaan Saluran Air dan Jalan, perlu diketahui tujuan utama dari perencanaan yang akan dilakukan yang mengacu pada perencanaan jalan dan drainase.

Tujuan dari perencanaan jalan adalah :

1. Melakukan rencana penanganan jalan yang baik dengan cara yang efektif, efisien dan ekonomis
2. Membuat dan mengembangkan jaringan jalan yang berwawasan lingkungan
3. Memberdayakan peran serta masyarakat dengan membangkitkan semangat gotong royong
4. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan jalan

Tujuan dari perencanaan sistem drainase khususnya di perkotaan adalah :

1. Mengendalikan dan meminimalkan dampak banjir
2. Mengendalikan erosi
3. Meminimalkan dampak dari aliran limpasan pada kualitas air sungai
4. Mempertahankan proses alami daerah ekologi, dan konservasi sumber air
5. Dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan strategi seperti sosialisasi mengenai pentingnya tanggung jawab bersama yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan.

Mengintegrasikan sistem drainase, dengan cara:

- Mengintegrasikan sistem drainase utama dengan memperhatikan dampak terhadap perencanaan tersebut
- Mengintegrasikan ruang terbuka publik untuk memaksimalkan drainase dan akses kepada masyarakat.

Untuk merencanakan pembangunan Saluran Air dan jalan yang baik perlu menentukan manajemen Strategi, agar pembangunan lebih terarah, tepat sasaran dan memberi manfaat sehingga masyarakat dapat jaminan lingkungan yang sehat dan bersih. Sasaran-sasaran yang ditetapkan untuk mendukung keberhasilan perencanaan sasaran ini terdiri atas 9 (Sembilan) tugas :

1. Menjabarkan misi yang akan dilaksanakan, meliputi rumusan untuk mencapai tujuan.
2. Mendata dan menganalisa opsi yang paling dikehendaki dengan cara mengevaluasi
3. Mencari sumber daya untuk mendukung opsi yang ada pada lingkungan yang ekstrim.
4. Memilah dan mengevaluasi opsi dengan cara menilai prioritas berdasarkan misi.
5. Menentukan Sasaran untuk waktu yang lama sehingga muncul strategi penangan.
6. Mengembangkan sasaran jangka pendek tahun yang prioritas penanganannya cepat sesuai dengan strategi umum
7. Membuat exit strategi program dan kegiatan sehingga ada kejelasan anggaran sesuai dengan sumber daya, struktur, teknologi dan tugas
8. Menilai keberhasilan strategi sebagai bahan masukan pengambilan keputusan.

Tugas tersebut dapat mendukung manajemen perencanaan, maka manajemen perencanaan infrastruktur saluran air dan jalan meliputi beberapa kegiatan, yaitu:

Perencanaan, arah penengangan, struktur organisasi, dan manajemen pengawasan atas suatu tujuan dan penangan-penangan yang berhubungan dengan suatu strategi. Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peran penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan hidup dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Penyelenggaraan jalan berdasarkan azas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. Uraian ringkas penyelenggaraan jalan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tersebut adalah :

1. Pengaturan Jalan meliputi:

- a) Pembentukan peraturan sesuai dengan kewenangannya;
- b) Perumusan kebijakan perencanaan;
- c) Penyusunan perencanaan umum;
- d) Pengendalian penyelenggaraan jalan.

2. Pembinaan Jalan meliputi:

- a) Penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria dan pedoman pembinaan jalan;
- b) Pelayanan dan pemberdayaan sumber daya manusia;
- c) Penelitian dan pengembangan jalan;

3. Pembangunan Jalan meliputi:

- a) Pemrograman dan penganggaran;

- b) Perencanaan teknis;
- c) Pengadaan tanah;
- d) Pelaksanaan konstruksi;
- e) Pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

4. Pengawasan Jalan meliputi:

- a) Kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan;
- b) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan;
- c) Pemenuhan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Masalah pengadaan tanah merupakan bagian dari penyelenggaraan jalan dan sub bagian dari pembangunan jalan. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, pada paragraf 4 Pengadaan Tanah, pasal 90 menjelaskan bahwa jalan umum dibangun di atas tanah yang dikuasai oleh negara. Dalam hal pelaksanaan konstruksi jalan umum di atas hak atas tanah orang, pelaksanaan konstruksi jalan umum dilakukan dengan cara pengadaan tanah. Pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan atau perbaikan alinyemen. Pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum.

Drainase saluran terbuka adalah sistem saluran yang permukaan airnya terpengaruh dengan udara luar (atmosfir). Drainase saluran terbuka biasanya mempunyai luasan yang cukup dan digunakan untuk mengalirkan air hujan atau air

limbah yang tidak membahayakan kesehatan lingkungan dan tidak mengganggu keindahan. saluran ini yang lebih cocok untuk drainase air hujan yang terletak di daerah yang mempunyai luasan yang cukup, ataupun untuk drainase air non-hujan yang tidak membahayakan kesehatan/ mengganggu lingkungan.

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Drainase secara umum didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan dalam suatu konteks pemanfaatan tertentu. Drainase berasal dari bahasa Inggris *drainage* yang mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas, dimana drainase merupakan salah satu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsur dari perasana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Saluran terbuka berfungsi untuk menyalurkan air yang belum tercemar atau kualitasnya tidak membahayakan. Lokasinya terletak pada daerah yang masih tersedia lahan seta tidak pada daerah yang sibuk.

a. Menurut Sejarah Terbentuknya

Sistem drainase terbuka ini termasuk kedalam Drainase Alamiah (*Natural Drainase*). Drainase yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan-bangunan penunjang seperti bangunan pelimpah, pasangan batu/beton, gorong-gorong dan lain-

lain. Saluran ini terbentuk oleh gerusan air yang bergerak karena gravitasi yang lambat laun membentuk jalan air yang permanen seperti sungai.

b. Menurut Letak Bangunan

Sistem drainase terbuka ini termasuk kedalam Drainase Permukaan Tanah (*Surface Drainage*). Saluran drainase yang berada di atas permukaan tanah yang berfungsi mengalirkan air limpasan permukaan. Analisa alirannya merupakan analisa open *chanel flow*

c. Menurut Fungsi

1. Single Purpose, yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan satu jenis airbuangan, misalnya air hujan saja atau jenis air buangan yang lainnya seperti limbah domestik, air limbah industri dan lain – lain. 2. Multi Purpose, yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan beberapa jenis air buangan baik secara bercampur maupun bergantian.

d. Menurut Konstruksi

Sistem drainase terbuka ini termasuk dalam Saluran Terbuka. Saluran Terbuka yaitu saluran yang lebih cocok untuk drainase air hujan yang terletak di daerah yang mempunyai luasan yang cukup, ataupun untuk drainase air non-hujan yang tidak membahayakan kesehatan/ mengganggu lingkungan.

B. Tujuan Drainase

Drainase memiliki beberapa tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman.
2. Pengendalian kelebihan air permukaan dapat dilakukan secara aman, lancar dan efisien serta sejauh mungkin dapat mendukung kelestarian lingkungan.
3. Dapat mengurangi/menghilangkan genangan-genangan air yang menyebabkan bersarangnya nyamuk malaria dan penyakit-penyakit lain, seperti: demam berdarah, disentri serta penyakit lain yang disebabkan kurang sehatnya lingkungan permukiman.

4. Untuk memperpanjang umur ekonomis sarana-sarana fisik antara lain : jalan, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dari kerusakan serta gangguan kegiatan akibat tidak berfungsinya sarana drainase.
5. Menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
6. Melindungi alam dan lingkungan seperti tanah, kualitas udara dan kualitas air.
7. Menghindari bahaya, kerusakan materil, kerugian dan beban-beban lain yang disebabkan oleh amukan limpasan banjir.
8. Memperbaiki kualitas lingkungan
9. Konservasi sumber daya air

C. Pola Jaringan Drainase

1. Siku

Dibuat pada daerah yang mempunyai topografi sedikit lebih tinggi dari pada sungai. Sungai sebagai saluran pembuang akhir berada akhir berada di tengah kota.

2. Pararel

Saluran utama terletak sejajar dengan saluran cabang. Dengan saluran cabang (sekunder) yang cukup banyak dan pendek-pendek, apabila terjadi perkembangan kota, saluran-saluran akan dapat menyesuaikan diri. Saluran drainase adalah salah satu bangunan pelengkap pada ruas jalan dalam memenuhi salah satu persyaratan teknis prasarana jalan. Saluran drainase jalan raya berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap kering. Pada umumnya saluran drainase jalan raya adalah saluran terbuka dengan menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan air menuju *outlet*. Distribusi aliran dalam saluran drainase menuju *outlet* ini mengikuti kontur jalan raya, sehingga air permukaan akan lebih mudah mengalir secara gravitasi.

Semakin berkembangnya suatu daerah, lahan kosong untuk meresapkan air secara alami akan semakin berkurang. Permukaan tanah tertutup oleh beton dan aspal, hal ini akan menambah kelebihan air yang tidak terbuang. Kelebihan air ini jika tidak dapat dialirkan akan menyebabkan genangan. Dalam perencanaan saluran drainase harus

memperhatikan tata guna lahan daerah tangkapan air saluran drainase yang bertujuan menjaga ruas jalan tetap kering walaupun terjadi kelebihan air, sehingga air permukaan tetap terkontrol dan tidak mengganggu pengguna jalan. Genangan di ruas jalan masih sering terjadi di beberapa kota, khususnya kota padat penduduk. Genangan di ruas jalan akan mengganggu masyarakat yang menggunakan ruas jalan tersebut untuk melakukan aktivitas perekonomian. Jika masalah genangan tersebut tidak teratasi, maka dapat memungkinkan terjadi bencana yang lebih besar hingga merugikan masyarakat setempat baik harta benda maupun nyawa.

D. Fungsi Drainase

Kegunaan dengan adanya saluran drainase ini antara lain (Suripin, 2004) :

1. Untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.
2. Sebagai pengendali air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air/banjir.
3. Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal.
4. Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada.
5. Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.
6. Mengeringkan bagian wilayah kota yang permukaannya lahannya rendah dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negative berupa kerusakan infrastruktur kota dan harta benda milik masyarakat.
7. Mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air terdekat secepatnya agar tidak membanjiri/menggenangi kota yang dapat merusak selain harta benda masyarakat juga infrastruktur perkotaan.
8. Mengendalikan sebagian air permukaan akibat hujan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik.
9. Meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah.
10. Mengeringkan daerah becek dan genangan air
11. Mengendalikan akumulasi limpasan air hujan yang berlebihan
12. Mengendalikan erosi, kerusakan jalan dan bangunan-bangunan.

BAB IV

METODOLOGI



Menurut Sugiyono (2013:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi (2013:153), Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif biasanya disebut juga dengan metode penelitian naturalistik,

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga dengan metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2014). Kegiatan Kajian Penyusunan Strategi Pembangunan Daerah Melalui Pendekatan Anthropologi di Kabupaten Lampung Tengah ini dilakukan dengan memadukan data, kajian teori berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur yang dianggap perlu untuk menunjang kegiatan.

4.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan Kajian Penyusunan Strategi Pembangunan Daerah Melalui Pendekatan Anthropologi di Kabupaten Lampung Tengah ini dilakukakan di wilayah administrasi Kabupaten Lampung Tengah dengan mengambil kasus pembangunan di Wilayah Bandar Jaya. Untuk lebih mengetahui beberapa informasi penting maka dilakukan *in-depth interview* ke beberapa narasumber. Kajian ini secara administrasi berlangsung selama 90 hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya kontrak.

4.2 Jenis dan Sumber Data

Sebagai bagian penting dalam kajian ini, data-data yang dibutuhkan dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Yang dimaksud data primer adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti berdasarkan pengamatan di lapangan sedangkan data sekunder merupakan bagian data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber kajian atau laporan peneliti sebelumnya. Data primer dan data sekunder saling berkolaborasi dan mendukung untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan.

Data primer dalam kajian ini termasuk di antaranya adalah hasil *in-depth interview* kepada nara sumber kunci seperti masyarakat dan stakeholder yang berkepentingan. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam kajian ini meliputi data pembangunan jalan dan drainase di Wilayah Plaza Bandar Jaya dan hasil penelitian terdahulu.

4.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan natural setting, sumber data primer dan teknik pengumpulan data yang banyak berperan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kajian kali ini;

1. Observasi Partisipatif

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan pengamatan peneliti dapat melihat kejadian sebagaimana subyek yang diamati mengalaminya, menangkap, merasakan fenomena sesuai pengertian subyek dan obyek yang diteliti.

Menurut Spradley (1980), tujuan observasi adalah memahami pola, norma dan makna dari perilaku yang diamati, serta peneliti belajar dari informan dan orang-orang yang diamati. Selanjutnya Spradley mengemukakan bahwa yang diamati adalah situasi sosial yang terdiri dari tempat, pelaku dan aktivitas. Tempat adalah di mana observasi dilakukan, dapat di rumah, lingkungan, sekolah, kelas, bengkel dll. Pelaku adalah orang-orang yang berperan dalam masalah yang diteliti, seperti, guru, pengawas, siswa, orang tua siswa, petani, buruh, masyarakat dll. Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku yang sedang diteliti, seperti, kegiatan belajar mengajar, belajar, bekerja dan kegiatan lainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Untuk dapat melakukan observasi dengan baik, peneliti harus memahami bentuk atau jenis observasi, sehingga mendapatkan data yang akurat sesuai apa yang sebenarnya terjadi di lapang. Ada beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan.

Bungin (2006) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur. Menurut Susan dalam Sugiyono (2006) dalam observasi partisipatif peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktifitas mereka. Jadi Observasi partisipasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan di mana observer atau peneliti benar-benar berada dalam keseharian pelaku yang diteliti atau *informan*, keberadaan peneliti dapat terlibat secara aktif maupun tidak aktif.

Spradley (1980) membagi partisipasi atau keterlibatan peneliti menjadi empat yaitu; (1) partisipasi pasif, di mana peneliti datang mengamati tetapi tidak ikut terlibat kegiatan yang diamati; (2) partisipasi moderat, di mana peneliti kadang ikut aktif terlibat kegiatan kadang tidak aktif; (3) partisipasi aktif, di mana peneliti terlibat aktif dalam kegiatan yang diteliti; (4) partisipasi lengkap, di mana peneliti sudah sepenuhnya terlibat sebagai orang dalam, sehingga tidak kelihatan sedang melakukan penelitian. Untuk mendapatkan data yang akurat sebaiknya menggunakan observasi dengan partisipasi lengkap, karena sebagai orang dalam peneliti leluasa mengamati dan mendapatkan makna sesungguhnya dari apa yang diamati.

Sementara observasi tidak berstruktur adalah observasi di mana peneliti belum tahu secara pasti apa yang akan diamati, sehingga pengamatan dilakukan tanpa menggunakan *instrument* baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan, oleh karena itu peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati fenomena atau dinamika pelaku yang diteliti. Sedangkan observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa fenomena atau event sekaligus.

Dalam melakukan observasi, peneliti harus dapat memusatkan perhatian dan akhirnya memilih hal-hal yang secara khas menemukan gambaran sesuatu yang bermakna. Pada permulaan observasi peneliti mengamati secara menyeluruh dan dengan ruang lingkup yang luas, kemudian memusatkan diri pada hal-hal yang menjadi fokus penelitiannya dan akhirnya memilih hal-hal yang khas dan yang paling relevan

untuk diamati dengan lebih cermat. Hal ini seperti yang dikemukakan Spradley (1980) yang mengungkapkan bahwa tahapan observasi ada tiga yaitu; (1) observasi deskriptif, di mana peneliti mengamati semua yang ada secara menyeluruh, mendeskripsikan semua yang diamati, observasi ini disebut juga sebagai grand tour observation; (2) observasi terfokus, di mana pengamatan difokuskan pada aspek tertentu yang menjadi fokus penelitian, observasi ini disebut juga sebagai mini tour observation. dan; (3) observasi terseleksi, di mana peneliti menyeleksi fokus yang ditemukan secara lebih rinci lagi.

Selanjutnya Spradley mengatakan, ketika melakukan observasi peneliti dapat mulai melakukan analisis. Pada observasi deskriptif peneliti dapat mulai menarik kesimpulan sementara, dengan analisis domain, sehingga dapat mendeskripsikan semua yang diobservasi. Pada observasi terfokus, peneliti melakukan analisis taksonomi sehingga dapat menemukan fokus yang sebenarnya. Pada observasi terseleksi, peneliti melakukan analisis komponensial, sehingga dapat menemukan karakteristik, persamaan, perbedaan, hubungan dari yang diteliti sehingga mudah ditarik kesimpulan dan ditemukan makna sebenarnya dari apa yang diteliti setelah kemudian menggunakan analisis tema. Jika analisisnya menggunakan analisis interaktif, maka pada setiap tahapan observasi di atas peneliti, dapat melakukan reduksi data, tabulasi data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Observasi atau pengamatan dapat dilaksanakan dengan bantuan alat pengamatan yang berupa, daftar cek, tabel sosiometri, catatan lapangan, jurnal harian, alat perekam elektronik dan format lainnya. Pemilihan alat bantu menjadi sangat penting untuk mendapatkan data kualitatif yang penuh makna. misalnya perilaku, aktifitas, dan proses kegiatan lainnya. Catatan lapangan menjadi pilihan utama, karena memungkinkan peneliti memahami makna yang terkandung di lapang yang diamati kemudian mencatatnya, sementara format lainnya seperti daftar cek hanya sebagai pelengkap, karena daftar cek sering tidak dapat memuat semua apa yang diamati. Catatan lapangan terdiri dari catatan deskriptif yang berisi gambaran tempat, orang dan kegiatannya (termasuk pembicaraan dan ekspresinya). Dan catatan reflektif yang berisi pendapat, gagasan dan kesimpulan sementara peneliti serta rencana berikutnya. Seperti

yang dikemukakan Moleong (2005) Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

2. In-Depth Interview

Selain melalui observasi partisipatif, peneliti dapat mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Bahkan keduanya dapat dilakukan bersamaan, di mana wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam lagi data yang didapat dari observasi. Seperti yang dikemukakan Sugiyono (2006) yang mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada orang-orang yang ada di dalamnya.

Ada beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan, menurut Sudarwan (2002) berdasarkan strukturnya, pada penelitian kualitatif ada dua jenis wawancara yaitu; (1) wawancara relatif tertutup, di mana pertanyaan difokuskan pada topik khusus dan umum dan dibantu oleh panduan wawancara yang dibuat cukup rinci; (2) wawancara terbuka, di mana peneliti memberikan kebebasan diri untuk berbicara secara luas dan mendalam.

Kedua jenis wawancara ini dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. wawancara relatif tertutup digunakan jika peneliti telah memperkirakan tentang informasi yang akan didapatkan. Sedangkan wawancara terbuka digunakan dalam penelitian pendahuluan untuk mendapatkan informasi awal tentang permasalahan yang ada. Wawancara terbuka juga digunakan untuk mendapatkan informasi lebih dalam lagi. Pada awalnya yang dibicarakan hanya masalah yang sepele yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian, namun perlahan tapi pasti, mulai menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian sampai tuntas. Menurut Moleong (2005) ada dua jenis pertanyaan yaitu pertanyaan luaran dan pertanyaan pendalaman. Pertanyaan luaran adalah pertanyaan yang bersifat umum dan tidak menggali informasi secara

mendalam, sedangkan pertanyaan pendalaman digunakan untuk menggali informasi secara mendalam sampai ke makna yang terkandung dalam kasus yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data yang penuh makna, sebaiknya digunakan wawancara terbuka atau wawancara tak terstruktur yang dapat secara leluasa menggali data selengkap mungkin dan sedalam mungkin sehingga pemahaman peneliti terhadap fenomena yang ada sesuai dengan pemahaman para pelaku itu sendiri. Disinilah peran peneliti sebagai instrumen utama yang tidak selalu terpancang pada panduan wawancara.

Keberhasilan wawancara sangat tergantung pada keterampilan yang dimiliki peneliti dalam mendapat kepercayaan orang yang diwawancarai. keterampilan itu antara lain, cara mengajukan pertanyaan seperti sensitifitas pertanyaan dan urutan pertanyaan, cara mendengarkan dengan serius, cara berekspresi secara *verbal* seperti intonasi dan kecepatan suara, maupun berekspresi secara *nonverbal* seperti kontak mata, sabar dan perhatian dalam mengikuti jawaban serta mengkondisikan situasi yang nyaman.

Wawancara dapat dimulai dengan pertanyaan yang mudah sebagai pendahuluan atau pemanasan, baru mulai masuk ke pertanyaan informasi dan fakta, hindari pertanyaan bermakna ganda, hindari pertanyaan masalah privacy, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif, perdalam pertanyaan ke topik yang lebih spesifik, kemudian diakhiri dengan pertanyaan penutup. Masalah yang mungkin muncul dalam wawancara; adalah orang yang diwawancarai tidak konsentrasi, tidak kooperatif, menolak berbicara atau tidak suka berbicara dan masalah teknis (alat perekam, catatan).

3. Kajian Dokumen

Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis / gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa dan data lainnya yang tersimpan. Dokumen tak terbatas pada ruang

dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi untuk penguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, membuat interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Kajian dokumen dilakukan dengan cara menyelidiki data yang didapat dari dokumen, catatan, file, dan hal-hal lain yang sudah didokumentasikan. Metode ini relative mudah dilaksanakan dan apabila ada kekeliruan mudah diganti karena sumber datanya tetap. Dengan membuat panduan / pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar data yang akan dicari akan mempermudah kerja di lapangan dalam melacak data dari dokumen satu ke dokumen berikutnya.

4.4 Teknik Analisa Data

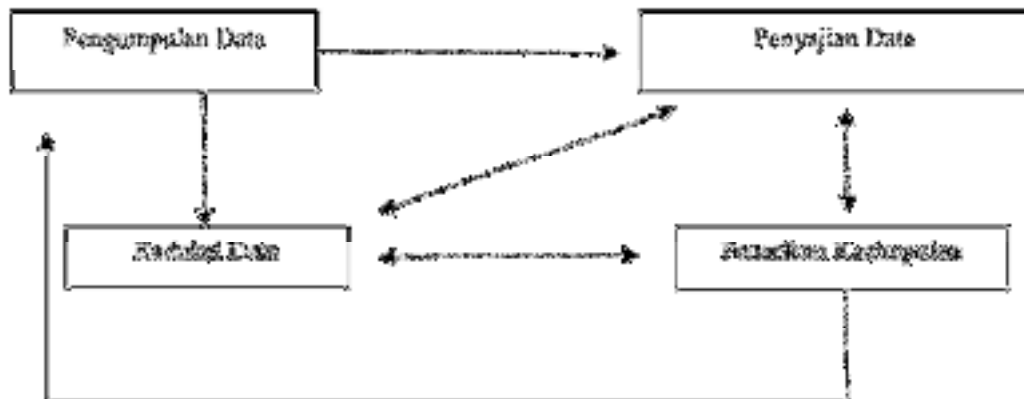
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2004:280-281), "Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel dan data".

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
- Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

- Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengaruh dan sebab akibat.

Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini.



Gambar 3 Komponen-komponen analisis data Model Deskriptif

4.5 Prosedur Kajian

Prosedur penelitian merupakan penjelasan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu penelitian. Menurut Moleong (2004:127-148), Langkah-langkah prosedur penelitian meliputi tiga hal yaitu:

a. Tahapan Pra-Lapangan

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti dengan pertimbangan etika penelitian lapangan melalui tahap pembuatan rancangan usulan penelitian hingga menyiapkan perlengkapan penelitian. Dalam tahap ini peneliti diharapkan mampu memahami latar belakang penelitian dengan persiapan-persiapan diri yang mantap untuk masuk dalam lapangan penelitian.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahap ini peneliti berusaha mempersiapkan diri untuk menggali dan mengumpulkan data-data untuk dibuat suatu analisis data mengenai kondisi yang

ditemukan di lapangan. Secara intensif setelah mengumpulkan data, selanjutnya data dikumpulkan dan disusun.

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini dilakukan kegiatan yang berupa mengolah data diperoleh dari narasumber maupun dokumen, kemudian akan disusun kedalam sebuah penelitian. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk laporan sementara sebelum menulis keputusan akhir.

BAB V

PEMBAHASAN



5.1 Isu Pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021

Dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah maka harus diawali dengan adanya perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek keberlanjutan. Perencanaan yang baik harus didukung dengan proses pemetaan kondisi daerahnya yang meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pembangunan di daerah, terdapat suatu dokumen penting yang digunakan sebagai sandaran pembangunan daerah. Dokumen tersebut merupakan hasil penggabungan dari kajian dan program yang dikampanyekan kepala daerah dalam proses pemilihan umum. Dokumen tersebut menjadi pedoman setiap perangkat daerah dalam menentukan program lembaga pemerintah. Dokumen tersebut juga menjadi bahan

evaluasi kinerja pemerintah oleh masyarakat. Dokumen tersebut lazim dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD.

Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 5 ayat (2), yang dimaksud dengan RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021, para penyusun mengkolaborasikan dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk dapat diakomodir ke dalam RPJMD 2016-2021. Hal ini sangat dibutuhkan dalam usaha menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan. Integrasi merupakan kata kunci dalam Sistem Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari skala lokal bahkan sampai skala global. Maka dari itu, dokumen rencana lima tahunan tersebut juga memuat hal-hal yang dianggap penting di dalam RPJPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 serta memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Selain berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Lampung Tengah, serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Lampung, penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021 juga memperhatikan: (a) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI); (b) Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goal* atau SDG Tahun 2030); (c) RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya; (d) RAD Pangan dan Gizi Tahun 2011-2015; (e) RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2010-2020; (f) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK); (g) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah

Kabupaten Lampung Tengah; dan (h) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021.

Dalam menyusun rencana ke depan, maka sudah seharusnya berpedoman pada kondisi kekinian yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Rencana pembangunan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat guna menemukan solusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam implementasinya, semua pihak harus mengetahui sumberdaya, kelemahan, peluang serta ancaman yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Pengetahuan akan hal ini merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan sebelum bergerak lebih jauh dalam tahap perencanaan. Proses pemetaan kondisi ini bertujuan untuk memudahkan pihak-pihak terkait dalam menentukan rencana dan mengambil keputusan.

Di dalam proses pemetaan ini, ditemukan beberapa permasalahan yang diperkirakan akan menghambat laju pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Permasalahan ini kemudian dijadikan isu strategis pembangunan yang tertuang ke dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah. Pada kajian ini akan dipaparkan beberapa sektor yang berkaitan dengan kata kunci yang relevan dengan penelitian diantaranya pembangunan drainase, partisipasi masyarakat, kearifan lokal (budaya) dan pembangunan berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa permasalahan pembangunan yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah:

1. Masih rendahnya partisipasi sektor swasta dalam turut serta meningkatkan kualitas infrastruktur. Padahal jumlah dan potensi perusahaan besar yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah sempat besar dan dapat dioptimalkan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur.
2. Masih banyak fasilitas perumahan pemukiman yang memerlukan perbaikan atau peningkatan kualitas, untuk itu diadakan kegiatan untuk perbaikan fasilitas perumahan seperti jalan lingkungan, drainase dan fasilitas lainnya.
3. Kawasan TERBAGUS yang akan berkembang menjadi kawasan terbangun atau perkotaan sangat rentan terjadi banjir, jika sistem drainasenya tidak disiapkan.

Pengembangan sistem drainase di kawasan TERBAGUS perlu membuat penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada salah satu saluran drainase yang dapat menyebabkan terjadi limpasan pada daerah sekitarnya.

4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Perlu upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, serta peningkatan pemahaman pengelolaan lingkungan hidup yang baik.
5. Kabupaten Lampung Tengah juga mempunyai obyek wisata lainnya seperti wisata budaya berupa pertunjukan seni dan budaya kesenian Bali di Kecamatan Seputih Banyak serta budaya khas adat daerah Kabupaten Lampung Tengah berupa Desa Tradisional Terbanggi di Kecamatan Terbanggi Besar. Secara keseluruhan pariwisata di Lampung Tengah belum berkembang, sehingga masih berupa potensi atau belum siap jual. Hal ini karena 4 aspek yang terkait dengan perkembangan pariwisata yaitu destinasi, ekonomi kreatif, pemasaran, dan kelembagaan belum dikelola dengan baik. Di sisi lain, pariwisata Lampung Tengah juga belum memenuhi 3 A yaitu kesiapan atraksi, aksesibilitas, dan amenities (hotel, restoran, cinderamata, biro perjalanan dan fasilitas pendukung lainnya).

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya, dalam hal tersebut tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi baik itu persoalan maupun peluang atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat

didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah, sedangkan secara populis, penetapan isu strategis dapat merupakan kesepakatan multipihak dari sekian banyak *stakeholders*.

Berdasarkan penggabungan dua jenis pendekatan tersebut di atas, di bawah ini akan diuraikan beberapa isu-isu strategis yang sesuai dengan tema kajian kali ini. Isu-isu ini merupakan hasil filtrasi dari isu yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021, yaitu:

1. Isu Ketentraman, Keamanan, Ketertiban Masyarakat

Sebenarnya isu ini lebih menegaskan untuk mewujudkan kondisi kondusif di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir amat sering terjadi konflik horizontal yang berujung kepada aksi anarkis. Fenomena ini muncul banyak didasari oleh ketersinggungan dalam hal sepele yang dibalut dengan perbedaan budaya. Keberagaman budaya yang dimiliki Kabupaten Lampung Tengah ibarat pisau bermata dua dimana hal ini bisa menjadi pendukung pembangunan atau menjadi penghambat pembangunan. Untuk itu, pemahaman terkait kondisi kebudayaan di suatu daerah yang heterogen merupakan suatu keharusan demi kelancaran proses pembangunan. Faktor budaya harus bisa diakomodir oleh pemerintah daerah sehingga layak dipertimbangkan menjadi lokomotif dalam menggerakkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan.

2. Isu Infrastruktur dan Ketimpangan Wilayah

Perkembangan kawasan terbangun TERBAGUS (Terbanggi Besar, Bandar Jaya dan Gunung Sugih) di sepanjang jalan Lintas Tengah yang berbentuk linier atau pita akan menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan seperti: kemacetan, kawasan kumuh dan persoalan lingkungan terutama persampahan dan sanitasi. Pada kawasan ini juga telah dibangun Jalan Lingkar Bandar Jaya Bagian Barat dan direncanakan akan dibangun Lingkar Timur untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di lintas tengah.

Pada aspek infrastruktur ini, isu strategis lainnya yang cukup penting adalah masih rendahnya partisipasi sektor swasta dalam turut serta meningkatkan kualitas

infrastruktur. Padahal, potensi perusahaan besar yang banyak terdapat di Kabupaten Lampung Tengah akan dapat dioptimalkan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur yang baik. Penyediaan prasarana dasar baik di kawasan perdesaan maupun kawasan perkotaan (Kawasan TERBAGUS), yang meliputi permukiman, pengelolaan sampah, jaringan air limbah dan drainase. Sistem drainase bertujuan untuk mengurangi banjir dan genangan air bagi kawasan permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, persawahan dan jalan meliputi jaringan drainase primer dan jaringan drainase sekunder.

3. Isu Pembangunan Berkelanjutan

Untuk menyelaraskan visi global sehingga memudahkan dalam mewujudkan dunia yang lebih baik, maka telah disepakati suatu program yang bernama *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Liu Zhenim (Dapartemen Ekonomi PBB) mengungkapkan bahwa sudah banyak negara-negara yang telah mengarusutamakan SDGs ke dalam dokumen perencanaan atau kebijakan pembangunan berkelanjutan di negara asalnya. Bahkan, pemerintah daerah telah mengambil inisiatif untuk mengimplementasikan SDG secara sistematis yang lebih cepat dan jauh dari pemerintah nasional.

Di era otonomi daerah seperti yang diterapkan di Indonesia maka sudah diketahui bersama bahwa leading sector dalam pembangunan akan jatuh kepada lembaga atau unit terkecil entitas yaitu desa. Untuk menjamin pemeretaan pembangunan ini maka pemerintah pusat telah menggelontorkan Dana Desa sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan desa.

Jika menilik lebih detil ke dalam dokumen rencana pembangunan Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021 maka konsep penyelarasan program SGDs ke dalam pembangunan daerah sudah dilakukan. Dalam isu ini, di dalam RPJMD 2016-2021 hanya menekankan kepada pengelolaan sumberdaya alam yang berlebihan sehingga mengakibatkan persoalan lingkungan seperti kemarau, pencemaran air sungai, polusi karena kemacetan dan pergeseran musim tanam karena perubahan iklim. Jika diperdalam kembali maka pembangunan berkelanjutan sejatinya membawa pesan kuat bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan harus melibatkan semua pihak tanpa

terkecuali. Pelibatan yang dimaksud adalah meliputi semluruh proses pembangunan dari mulai perencanaan sampai dengan perawatan/evaluasi.

Sebagai contoh, penyusunan program SDGs mengutamakan partisipasi masyarakat luas melalui voting yang diadakan online. Untuk mengakomodir aspirasi, saran, dan kritik masyarakat maka terdapat mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang diadakan menurut levelnya.

5.2 Arah Pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021, maka visi yang digaungkan dalam lima tahun pembangunan adalah “Lampung Tengah Sebagai Lumbung Pangan Yang Aman, Maju, Adil, Sejahter dan Berkelanjutan”. Sedangkan untuk misi memuat enam poin sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan dan kergaman budaya.
2. Meningkatkan pelayanan prasarana dasar melalui penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik
3. Membangun ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan ekonomi kreatif dengan melibatkan partisipasi industri.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sesuai potensi dan kearifan lokal
5. Mengelola fungsi sumberdaya alam dan lingkungan berbasis pertanian berkelanjutan
6. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat

Dari keenam misi tersebut, setelah melalui proses pengkajian lebih lanjut maka ditemukan bahwa setidaknya ada empat misi yang berkaitan langsung dengan tema kajian kali ini. Selain *mission statement*, pada tabel berikut juga memuat sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan capaian kinerja untuk memudahkan proses evaluasi kegiatan.

Misi pertama, gagasan besar yang dibawa oleh pemimpin daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah untuk menciptakan suasana aman dan nyaman di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini didasari oleh maraknya kasus kriminalitas baik yang merugikan atau tidak merugikan khalayak umum. Untuk menurunkan *crime rate* di wilayah ini maka diluncurkan salah satu program unggulan bupati saat itu yaitu Program Ronda. Untuk menjalankan program ini maka setiap wilayah harus membangun posko keamanan. Bersama dengan masyarakat bupati melakukan ronda rutin guna tiap malan. Program ronda juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan *engagement* masyarakat.

Selain itu, pada misi pertama ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan konsolidasi demokrasi. Sasaran utamanya adalah segenap unsur organisasi masyarakat, lembaga masyarakat, partai politik dan masyarakat itu sendiri. Diharapkan kelompok tersebut tidak hanya menjadi “penikmat” hasil pembangunan namun juga turut serta secara aktif proses berlangsungnya pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini merupakan bagian dari sistem demokrasi yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat. Baik itu peran dalam proses memberikan pendapat maupun proses pengawasan kinerja pemerintah.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka pemerintah memusatkan kegiatan ini pada tataran kampung/desa. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengorganisasian masyarakat, pendanaan dan pemantauan. Jika mengacu kepada Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana disebutkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur keperluannya sendiri demi berlangsungnya proses pemerintahan. Namun untuk tetap menjaga keberlanjutan pembangunan, desa harus tetap sejalan dengan prioritas pembangunan dari pusat. Untuk mendukung keberlangsungan pembangunan tersebut pula maka sudah triliunan (72 triliun pada 2020) dana desa yang dukucurkan demi menjamin pemerataan pembangunan sampai pelosok desa.

Dengan adanya dana desa maka kegiatan pembangunan di pedesaan akan semakin tumbuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat di desa tersebut. Peningkatan ekonomi masyarakat desa didasari pada arahan presiden mengenai

Program Padat Karya Tunai di Desa (PDKT). Dengan konsep PDKT tersebut maka pembangunan di desa harus melibatkan warga desa tersebut. Sehingga perputaran uang dari dana desa terjadi hanya di dalam desa itu saja. Berputar di dalam lingkaran warga yang tidak mampu bukan segelintir warga luar yang mengambil keuntungan semata.

Dana desa yang digunakan untuk berlangsungnya kegiatan di desa akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Kegiatan perawatan wilayah desa misalnya, juga bisa menggunakan dana desa dengan sistem gotong royong. Sebelum adanya dana desa pun sebenarnya budaya gotong-royong sudah tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Dana desa ibarat menjadi "*trigger*" untuk meningkatkan budaya ini terus berkembang luas di masyarakat. Melihat potensi penggabungan budaya dan *resource* berupa dana desa maka pemerintah daerah menjadikan program bulan bakti gotong-royong dan jumat bersih di tiap kampung sebagai indikator keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Lampung Tengah.

Kabupaten Lampung Tengah disusun oleh beragam etnik dan budaya. Munculnya diversitas ini merupakan hasil dari program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Selain adat asli Lampung, budaya lain yang dapat ditemukan di Kabupaten Lampung Tengah adalah Jawa, Sunda dan Bali. Perbedaan budaya tersebut kemudian berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi proses akulturasi. Menurut Koentjaraningrat, akulturasi adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya itu sendiri.

Potensi budaya yang ada di Kabupaten Lampung Tengah bisa menjadi kunci utama dalam menyukseskan pembangunan. Hal ini juga yang menjadi strategi pemerintah daerah dalam mencapai misi-misinya yaitu dengan optimasi budaya dan kearifan lokal dalam mewujudkan kemananan, ketertiban dan kenyamanan di Lampung Tengah. Dalam *engagement* budaya ini pemerintah sadar bahwa proses ini menantang dan membutuhkan waktu yang relative lama. Hukum alam akan skema "*take and give*" sangat relevan untuk diterapkan. Dan jika melihat indikator kinerja Pemerintah

Kabupaten Lampung Tengah dalam pelestarian kebudayaan maka proses ini jelas diawali dengan “give”. Pada Tabel 18 tentang misi pertama jelas dipaparkan indikator kesuksesan adalah dalam bentuk pembuatan sanggar budaya, apresiasi budayawan, pentas seni dan budaya, dan seremonial kegiatan upacara kebudayaan.

Misi kedua, yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah kaitannya dengan pembentukan wilayah terpadu berbasis kekuatan pangan (Tabel 19). Untuk mendukung kegiatan operasional wilayah tersebut maka akan dibangun infrastruktur seperti jalan, jembatan dan drainase. Selanjutnya, pada tujuan keenam isu layanan dasar berupa pemukiman, akses air bersih dan sanitasi di permukiman menjadi prioritas. Dalam mencapai tujuan ini, pemerintah daerah sangat mengandalkan partisipasi masyarakat. Program-program pemberdayaan masyarakat baik dari level nasional maupun daerah akan menjadi *tools* dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Program sanitasi perdesaan padat karya, program bantuan stimulan untuk perbaikan rumah dan juga Pamsimas menjadi motor penggerak tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat.

Misi keempat, merupakan salah satu upaya fundamental untuk melibatkan para pemuda dalam pembangunan di Lampung Tengah. Dengan perkembangan teknologi yang cepat maka diharapkan para pemuda dapat mengakses pengetahuan untuk diterapkan di Lampung Tengah. Sifat dasar para pemuda yang memiliki hasrat untuk belajar dan bekerja yang tinggi akan menjadi tenaga tersendiri dalam mendukung pemerintah. Kesempatan dan kemampuan yang dimiliki pemuda untuk mencari informasi akan memunculkan inisiatif untuk membuat gerakan lokal yang memiliki dampak bagi lingkungannya.

Menurut Yoris Sebastian, generasi langgas ini memiliki karakteristik saling terhubung satu sama lain, bertindak secara lokal dan memiliki inisiatif yang tinggi. Bermodal dengan karakteristik tersebut, maka pemerintah daerah sebaiknya mempertimbangkan untuk memberdayakan pemuda ke dalam pembangunan daerah. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan pemuda maka akan terbentuk wadah berkreasi ke arah yang positif.

Misi keenam, merupakan upaya internal pemerintah daerah untuk memberikan perencanaan pembangunan yang optimal kepada masyarakat Kabupaten Lampung

Tengah. Dengan adanya organisasi kuat yang didukung oleh sumberdaya manusia yang mumpuni maka perencanaan akan semakin matang dan holistik. Pada misi keenam ini disebutkan bahwa aspek sosial budaya merupakan unsur penting dalam keberlangsungan Kabupaten Lampung Tengah. Untuk itu pemerintah daerah melihat bahwa perlu adanya perencanaan berbasis aspek sosial budaya yang melibatkan berbagai *stakeholder*. Penjelasan dari misi ini semakin menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah menyadari pentingnya perencanaan pembangunan berbasis kearifan lokal.

Table 18 Misi 1: Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga dalam kehidupan sosial yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan keragaman budaya

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah
						Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)		
Tujuan 2: Meningkatkan konsolidasi demokrasi									
Meningkatnya peran lembaga demokrasi, organisasi masyarakat sipil, partai politik, dan masyarakat dalam pembangunan demokrasi lokal	Mengoptimalkan konsolidasi demokrasi lokal	Mengoptimalkan keberdayaan masyarakat desa melalui pemberdayaan dan pembinaan lembaga-lembaga masyarakat desa	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah lembaga masyarakat desa yang diberdayakan	Persentase	30	80	Pemerintahan Umum	
		Berkontribusi aktif mewujudkan partisipasi masyarakat dalam desa membangun dan terimplementasinya dengan baik undang-undang desa	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasif dalam membangun desa	Kategori	baik	Baik	Pemerintahan Umum	
				Jumlah dana swadaya masyarakat	Rupiah	295,43	295,44		
				Jumlah pembiayaan program pemberdayaan masyarakat	Rupiah	5064,6	5.064,6		
				Terlaksananya bulan bakti gotong royong di setiap kampung	Persentase	100	100		
				Terlaksananya	Persentase	100	100		

				Jumat bersih diseluruh kampung						
Tujuan 3: Meningkatkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal										
Meningkatnya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal	Mengoptimalkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya dan kearifan lokal dalam mewujudkan kemandirian, ketertiban, dan ketentraman	Melaksanakan aktualisasi nilai-nilai budaya melalui pembinaan dan penyelenggaraan upacara-upacara adat	Program pengembangan nilai budaya	Jumlah sanggar seni budaya	Unit	696	696	Kebudayaan		
				Jumlah pentas seni yang difasilitasi Pemerintah Daerah	Unit	4	4			
				Apresiasi pemerintah terhadap seniman dan budayawan	Orang	0	600			
				Jumlah pelaksanaan upacara adat budaya	Jumlah	0	12			
	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan budaya	Program pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah	26	156	Kebudayaan			
			Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan keragaman budaya	Program pengelolaan keragaman budaya	Jumlah festival budaya daerah	Jumlah	2	12	Kebudayaan	
					Perlindungan bangunan cagar budaya	Unit	0	5		
			Pagelaran dan festival seni budaya	Event	2	3				

Table 19 Misi 2: Membangun dan meningkatkan infrastruktur strategis berbasis pengembangan wilayah yang terpadu

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah
						Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)		
Tujuan 1: Meningkatkan sistem transportasi wilayah untuk mendukung pengembangan lumbung pangan									
Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan ke sentra-sentra produksi pangan	Penyediaan prasarana dan sarana transportasi wilayah yang terpadu dan terkoneksi dengan sistem transportasi nasional	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase	50	70	Pekerjaan Umum	
Tujuan 6: Meningkatkan pelayanan prasarana dasar melalui penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik									
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perbaikian lingkungan permukiman	Peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan perumahan	Pemberdayaan masyarakat permukiman kumuh	Program pemberdayaan komunitas perumahan	Jumlah partisipasi masyarakat dlm pengelolaan permukiman	Persentase	10	25	Perumahan	

Tabel 20 Misi 4: Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan sesuai Potensi dan Kearifan Lokal

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah
						Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)		
Tujuan 4. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan meningkatkan prestasi olahraga									
Meningkat-nya peran pemuda dalam pembangunan dan meningkat-nya prestasi olahraga	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan masyarakat dan kegiatan olahraga menuju generasi sehat dan produktif	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pembinaan kepemudaan	Orang	140	2400	Pemuda dan Olahraga	

Table 21 Misi 6: Menyelenggarakan tatakelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan	Perangkat Daerah
						Kondisi Awal (2015)	Kondisi Akhir (2021)		
Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik									
Meningkatnya kapasitas organisasi pemerintah daerah	Memaksimal-kan internalisasi paradigma, prinsip, dan praktek tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah	Mengembangkan perencanaan sosial budaya yang melibatkan berbagai stakeholder	Program perencanaan sosial budaya	Masuk 5 besar nominasi anugerah pangripta	Peringkat	0	5	Perencanaan	
		Meningkatkan kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan masyarakat paling depan	Program peningkatan kinerja Kecamatan	Jumlah kecamatan yang telah dievaluasi kinerjanya	Jumlah	28	28	Fungsi lain	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	0	80	Fungsi lain	

5.3 Potensi Budaya di Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Lampung yang memiliki kekayaan alam dan memiliki berbagai potensi di sektor kepariwisataan baik wisata alam, budaya, petualangan maupun wisata sejarah yang belum dioptimalkan manfaatnya. Perayaan seni budaya Lampung yang berlangsung setiap dua tahun sekali di Kabupaten Lampung Tengah masih perlu mengalami revitalisasi atau terus dilestarikan dan dipertahankan. Dalam hal ini, sukses atau tidaknya pelaksanaan perayaan seni 4 tari adat di kabupaten Lampung Tengah ini tergantung dari semangat masyarakat Lampung Tengah bersinergi dengan pemerintah daerah bersama sama dalam menggali berbagai seni budaya daerah Lampung Tengah yang perlu dilestarikan, dipertahankan. Semua pihak dari masyarakat kabupaten Lampung Tengah telah berpartisipasi dalam pembangunan dalam hal ikut berpartisipasi serta membantu dalam memberikan informasi maupun data demi terwujudnya pembangunan kabupaten Lampung Tengah ke arah kesejahteraan masyarakat kabupaten Lampung Tengah.

Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Kebudayaan Lampung menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengupayakan pemeliharaan adat Lampung secara lestari, oleh karena itu masyarakat Lampung Tengah dan pemerintah daerah kabupaten Lampung Tengah sangat berperan dalam menjaga dan melestarikan seni budaya daerah Lampung Tengah yang berkelanjutan ke arah pengembangan pembangunan pada wisata di kabupaten Lampung Tengah khususnya kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi seni tari adat Lampung Pepadun.

Selain potensi budaya dilihat dari kesenian, potensi dasar lainnya adalah keberagaman budaya dengan falsafah kehidupannya masing-masing. Keberagaman ini bisa menjadi sebuah modal dasar untuk menggabungkan dan menyatukan suku-suku yang ada di Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah dihuni oleh masyarakat suku Lampung. Agama yang dianut mayoritas Islam dan sebagian lagi agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha dan Hindu.

Masyarakat dominan lain yang bermukim di Lampung Tengah adalah penduduk suku bali. Sebagian besar mendiami di beberapa kecamatan di wilayah timur dan sisanya berada di kecamatan lain di Lampung Tengah. Agama yang di anut mayoritas memeluk agama hindu-bali. Kampung-kampung Bali akan terasa bila saat berada di lingkungan setempat. Sama halnya dengan masyarakat suku Jawa dan Sunda, masyarakat suku Bali bermula dari transmigran yang ditempatkan di daerah ini. Penempatan itu terdiri dari beberapa tahapan. Sehari-harinya, penduduk setempat menuturkan bahasa bali.

Table 22 Sensus penduduk menurut suku bangsa di Lampung (BPS, 2011)

No	Etnis	Persentase
1	Jawa	63.84%
2	Lampung	13.51 %
3	Sunda	9.58 %
4	Banten	2.27 %
5	Sumatera Selatan	5.47 %
6	Bali	1.38 %
7	Minangkabau	0.92 %
8	China	0.53 %
9	Bugis	0.28 %
10	Batak	0.69 %
11	Etnis lain seperti Aceh, Jambi, Sumatra lainnya, Betawi, Papua, NTT, NTB dan Kalimantan	1.21 %

Program transmigrasi yang dilakukan pemerintah maupun perpindahan spontan yang dilakukan sekelompok masyarakat menjadikan suku-suku tersebut tersebar di seluruh Provinsi Lampung. Bambang Sumitro dalam Sudjarwo (2005: 3), dalam penelitiannya pada tahun 1993 menemukan keberadaan etnis-etnis yang ada di Lampung (Tabel 22).

Table 23 Sebaran Penduduk Lampung atas Dasar Suku Bangsa Pendatang

No	Suku Bangsa	Keberadaan Wilayah
1	Jawa	Tersebar di seluruh daerah tingkat II
2	Sunda	Tersebar di seluruh daerah tingkat II
3	Banten	Tersebar di seluruh daerah tingkat II
4	Bugis	Tersebar di daerah pantai
5	Bali	Tersebar di daerah Lampung Tengah,

		Lampung Utara dan Lampung Selatan
6	Padang	Di kota-kota kecamatan
7	Batak	Di kota-kota kecamatan
8	Semendo	Tersebar di daerah Lampung Tengah, Lampung Utara dan Lampung Selatan
9	Ogan	Tersebar di daerah Lampung Tengah, Lampung Utara dan Lampung Selatan

Setiap suku memiliki falsafah hidup yang bersumber dari kearifan lokal yang nilai-nilainya diakui oleh masyarakat adatnya. Falsafah hidup masyarakat ini merupakan idiologi tradisional sebagai hasil kebudayaan suatu masyarakat yang telah hidup bersama dalam jangka waktu yang lama. Kearifan lokal ini dibelajarkan secara turun temurun dan memuat sejumlah dasar dan aturan/ hak dan kewajiban untuk ditaati masyarakat didalamnya. Walaupun bersifat intern, namun dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dan agama, falsafah ini dapat menjadi dasar integrasi sosial di masyarakat yang majemuk. Karena pada hakekatnya setiap pedoman hidup antar suku mengajarkan tentang nilai-nilai kebenaran dan kebaikan baik yang berlandaskan atas hukum agama maupun kebiasaan hidup bermasyarakat, namun dengan cara yang berbeda. Menurut Rudiyanto (2016), orang Jawa memiliki pedoman hidup berupa Pitutur yang berupa wejangan bersajak. Nilai dalam Pitutur inilah yang dijadikan pedoman hidup orang Jawa. Pitutur jawa ini memiliki persamaan nilai dengan *Piil Pesenggiri* orang Lampung”, *Trihita Karana* orang Bali, dan *Tri Tangtu* orang Sunda.

Setidaknya terdapat sepuluh sajak pitutur ini yang familiar didengar dalam kehidupan masyarakat Jawa. Walaupun sebatas wejangan, pitutur ini memiliki sanksi sosial di masyarakat mulai dari celaan, dikucilkan hingga diasingkan. Kesepuluh Pitutur itu antara lain:

- 1) *Urip iku urup*. Artinya hidup itu harus seperti api (penerangan), menyala dan memberikan penerangan (kebermanfaatan) bagi sesama.
- 2) *Guyub Agawe Sentosa*. Artinya hidup rukun dan melakukan segala sesuatu dengan tolong menolong akan membuat suatu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

- 3) *Memayu hayuning bawono, ambrasto dur hangkoro.* Artinya kehidupan manusia harus mengusahakan kesejahteraan, keselamatan dan kebahagiaan, namun semua itu tidak boleh dilandasi dengan hawa nafsu angkara murka.
- 4) *Suro diro joyoningrat, lebur denging pangastuti.* Artinya hawa nafsu angkara murka, keras hati, dan kelicikan tidak bisa/ boleh dibalas dengan hal yang sama.
- 5) *Ngluruk tanpa bolo, menang tanpo ngasorakke, sekti tanpo aji-aji, sugih tanpo bondo.* Artinya berjuang tanpa bantuan orang banyak (mandiri), menanggung segala akibat yang telah diperbuat diri sendiri dan tidak mengkambing hitamkan orang lain. Jika senang/ menang tanpa memermalukan, mengolok-olok dan merendahkan orang lain, berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan, kekayaan atau kekuasaan.
- 6) *Datan serik lamun ketaman, datan susah lamu kelangan.* Artinya jangan sakit hati kala musibah datang, jangan mudah menyerah bila menemui kegagalan, jangan sedih kala kehilangan, dan tetap bersyukur atas kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa.
- 7) *Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, lan ojo aleman.* Artinya jangan gampang terheran-heran atas sesuatu hal yang bukan menjadi haknya, jangan mudah menyesal atas segala sesuatu yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Jangan mudah terkejut atas kelebihan dan kekurangan orang lain, dan jangan mudah manja atas apa yang telah dimiliki.
- 8) *Ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemareman.* Artinya jangan terlalu terobsesi atas godaan duniawi (harta, tahta dan wanita) dan kepuasan duniawi lainnya.
- 9) *Ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko.* Artinya jangan merasa pintar dan cukup agar tidak berhenti belajar, dan jangan licik/ curang agar tidak celaka, karena karma itu selalu ada.
- 10) *Ojo milik barang kang melok, ojo mangro mundak kendho.* Artinya jangan tergiur oleh hal-hal yang nampak mewah, cantik atau indah, dan jangan mendua agar tidak mengganggu niat dan tujuan.

- 11) *Ojo adigang, adigung, adiguna*. Artinya jangan sok kuasa karena tinggi jabatan, banyak uang dan memiliki segalanya. Jangan sok besar hati atas apa yang telah diperbuat, karena apa yang kita perbuat belum tentu bermanfaat untuk orang lain. Dan jangan sok sakti atas ilmu yang dimiliki, karena tuntutan ilmu itu tidak akan pernah berhenti selama nyawamasih dikandung badan.

Selanjutnya, suku Lampung sendiri terikat oleh kearifan lokal berupa falsafah/ pandangan hidup Piil Pesenggiri yaitu falsafah hidup suku Lampung dalam menjalani hidup mereka yang tertuang dalam kitab Kuntjara Radja Niti yang merupakan warisan sejarah peradaban suku Lampung. Falsafah hidup Piil Pesenggiri pada masyarakat suku Lampung terdiri dari empat pilar utama yaitu:

- 1) *Juluk-adok* yang berarti bahwa selain memiliki nama secara umum, suku Lampung juga memiliki nama/gelar dalam kehidupan adatnya. Dalam pergaulan masyarakat adat sehari-hari, nama/ gelar adat itulah yang digunakan sebagai panggilan. Dalam memberikan Adek/ Adok, Suku Lampung memberikan nama-nama/ gelar adat kebesaran/ kebangsawanan yang bermakna baik/ positif dan diharapkan menjadi identitas utama yang melekat pada pribadi yang bersangkutan yang telah ditetapkan berdasarkan hirarki status keluarganya dalam struktur kepemimpinan adat. Juluk-adok merupakan asas identitas dan sebagai sumber motivasi bagi anggota suku Lampung untuk dapat menempatkan hak dan kewajibannya, kata dan perbuatannya dalam setiap perilaku dan karyanya.
- 2) *Nemui-nyimah* yang berarti bahwa suku Lampung sangat gemar bersilaturahmi dan menerima tamu dengan baik. Bahkan suatu keharusan bagi mereka untuk memperlakukan tamu dengan sangat baik, karena seorang tamu yang berkunjung kerumah merupakan suatu kehormatan dan penghargaan yang harus dibalas dengan sebuah kehormatan pula.
- 3) *Nengah-nyampur* yang berarti bahwa suku Lampung sangat membuka diri dalam pergaulan sehari-hari. Mereka juga tidak segan untuk mengangkat saudara (Angkon Muakhi), untuk menunjukkan ketulusan mereka dalam bergaul.

- 4) *Sakai-sambaian* yang berarti bahwa suku Lampung suka bergotong-royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya.

Lampung memang terkenal kasar dengan nada/ intonasi bicara yang tinggi, namun itu yang menjadi watak/ karakter mereka layaknya suku di wilayah sumatera lainnya. Walaupun demikian mereka memiliki budaya dan tradisi yang baik dan sangat menerima pendatang. Dari falsafah hidup mereka juga dapat diketahui bahwa pada hakekatnya mereka cinta damai, toleran, dan senang bergaul.

Suku Sunda memiliki falsafah hidup Tri Tangtu, adapun falsafah ini setidaknya terdiri dari:

- 1) *Gusti anu asih, alam anu ngasah, manusa anu ngasuh (silih asah, silih asih, silih asuh)* yang artinya bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang maha mengasihi manusia dengan memberikan segala kenikmatan dan kebutuhannya. Alam yang mengasah kehidupan manusia yang dalam rangka memenuhi kebutuhannya manusia harus memanfaatkan alam disekitarnya. Hal ini, membuat manusia harus mengasah pikiran sebagai salah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa dalam memanfaatkannya. Manusia harus pandai-pandai bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa serta memelihara alam sekitarnya agar dapat terus dimanfaatkan dan tidak menjadi musibah.
- 2) *Wenang, Kala, Wening* yang artinya bahwa segala sesuatu hanya dimiliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini adalah kehendak-Nya, oleh karena itu sebagai manusia kita harus bertauhid atas segala ketetapan-Nya.
- 3) *Resi, rama, raja* yang artinya berlaku sederhana dengan memiliki niat dan tekad yang teguh, mempunyai idealisme dalam memperjuangkan kebenaran, dan mampu menjaga wibawa serta amanah atas kekuasaan yang dimilikinya.
- 4) *Naluri, nurani, nalar* yang artinya menyelaraskan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilaksanakan.
- 5) *Dasa kerta, Dasa Prebakti*, yang artinya bahwa kesejahteraan hidup dapat dicapai dengan menjaga sepuluh bagian tubuh manusia dan menggunakan

kedudukan, jabatan dan kekuasaannya untuk kebermanfaatannya kepada orang lain.

- 6) *Panca aksara, guruning janma* yang artinya pengalaman harus dijadikan pelajaran kehidupan, dan jangan terjebak dalam kesalahan/ kegagalan yang sama
- 7) *Ngawakan tapa di nagara* yang artinya seseorang harus memiliki kemampuan atau keahlian. Akal pikiran, perasaan harus mampu menumbuhkan semangat kreatifitas untuk menciptakan sesuatu yang memiliki daya guna, daya beli, daya saing serta berguna bagi orang lain.

Falsafah kehidupan ini menunjukkan bahwa orang Sunda berpedoman pada apa yang telah ditentukan dari Gusti Nu Murbeg Alam (Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa). Ketaatan kepada-Nya menjadi suatu hal yang mutlak harus dilaksanakan, karena semua bersumber dan akan kembali hanya pada-Nya.

Suku Bali memiliki falsafah hidup Trihita Karana. Nilai Trihita Karana bersumber pada dharma manusia sebagai ciptaan Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa sehingga harus beriman kepada-Nya, menghargai dan menjaga sesama ciptaannya, dan saling bantu-membantu dan bertoleransi dengan sesama manusia. Hal ini bermakna bahwa sumber kebahagiaan hidup masyarakat Bali terdiri dari tiga hal yaitu:

- 1) *Parahyangan* yang artinya hubungan manusia dengan Sang Hyang Widi Wasa (Tuhan Yang Maha Kuasa). Karena segala sesuatu berjalan atas ketetapan dan izin-Nya.
- 2) *Palemahan* yang artinya hubungan manusia dengan alam. Alam harus tetap dijaga agar tetap lestari karena menjadi sumber penghidupan bagi manusia.
- 3) *Pawongan* yang artinya hubungan manusia dengan sesama. Sesuai sifat dasar manusia yang tidakbisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maka antar manusia harus saling menghargai dan menghormati satu dengan lainnya.

Semua falsafah hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah yang majemuk tersebut memiliki keterkaitan dan keterdukungan satu sama lain. Hal tersebut dijabarkan dalam tabel berikut (Modifikasi Kesuma, 2017) :

Piil Pesenggiri	Piturur	Tri Tangtu	Trihita Karana
Bejuluk Baedek / Juluk Adok	<ul style="list-style-type: none"> • Urip iku urup • Memayu hayuning bawono, ambrasto dur hangkoro • Suro diru joyo joyoningrat, lebur denging pangastuti • Nglunuk tanpa belo, menang tanpa ngasorakke, sekti tanpo aji-aji, sugih tanpa bondo 	<ul style="list-style-type: none"> • Wenang, Kala, Wening • Resi, Rama, Raja • Dasa karta, Dasa Prebakti 	<ul style="list-style-type: none"> • Parahyangan • Palemahan • Pawongan
Nemui Nylmah	<ul style="list-style-type: none"> • Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, lan ojo aleman • Ojo milik barang kang melok, ojo mangro mundak kendho 	<ul style="list-style-type: none"> • silih asah, silih asih, silih asuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Parahyangan • Palemahan • Pawongan
Nengah Nyappur	<ul style="list-style-type: none"> • Urip iku urup • Datan serik lamun ketaman, datan susah lamu kelangan • Ojo adigang, adigung, adiguna 	<ul style="list-style-type: none"> • silih asah, silih asih, silih asuh • Naluri, nurani, nalar • Panca aksara, guruning janma 	<ul style="list-style-type: none"> • Parahyangan • Palemahan • Pawongan
Sakai Sambayan	<ul style="list-style-type: none"> • Urip iku urup • Ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko 	<ul style="list-style-type: none"> • silih asah, silih asih, silih asuh • Ngawakan tapa di nagara 	<ul style="list-style-type: none"> • Parahyangan • Palemahan • Pawongan

Table 24 Potensi budaya dilihat dari kedekatan nilai kesukuan (Modifikasi Kesuma, 2017)

Falsafah yang menjunjung kebersamaan atau gotong-royong

Interaksi adat dan kebudayaan yang dibawa pendatang maupun penduduk asli mendorong terjadinya asimilasi dan akulturasi kebudayaan sekaligus merupakan potensi untuk perubahan dan kemajuan pembangunan tanpa harus meninggalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang telah dimiliki. Interaksi tersebut menghasilkan kearifan-kearifan lokal yang terbagi ke dalam dua jenis yaitu yang berwujud (*tangible*) dan yang tidak berwujud (*intangible*). Kearifan lokal yang ada pada masyarakat merupakan pedoman dalam kehidupan masyarakat kampung yang majemuk, dilaksanakan dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun dengan tujuan menciptakan hubungan masyarakat yang harmonis serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Kearifan lokal yang terbentuk di masyarakat Lampung Tengah adalah hasil dari penggabungan antara kebijakan setempat (*local wisdom*) dan kecerdasan setempat (*local genius*). Kedua hal tersebut disepakati dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik tanpa ada gesekan. Mufidah (2017) menyebutkan bahwa setidaknya ada beberapa kearifan lokal dalam wujud kegiatan seperti *rewangan*, *layatan*, gotong-royong dan doa bersama.

Kegiatan *rewangan* dapat dimaknai sebagai aktifitas yang dilakukan bersama untuk menolong warga lainnya yang sedang memiliki hajat. Kegiatan ini sejatinya sudah sedari dulu dilakukan secara turun temurun. Hal yang mendasari kegiatan *rewangan* adalah kesadaran bahwa setiap warga pada suatu waktu akan mempunyai hajat baik itu berupa; pernikahan, sunatan, acara tasyakuran rumah dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut selain menguras waktu dan biaya, juga menguras tenaga. Untuk menjamin kelancaran acara tersebut dibutuhkan bantuan tenaga dari banyak orang. Kekurangan tenaga inilah yang nantinya akan dibantu oleh warga sekitar.

Sedangkan *layatan* atau *ngelayat* adalah kegiatan yang dikhususkan ketika ada salah satu keluarga dari warga yang meninggal dunia. Hal ini dilakukan sebagai bukti rasa solidaritas dan juga upaya untuk menghibur keluarga yang ditinggal kerabatnya. Kearifan lokal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempererat *horizontal relation* tanpa membedakan budaya dan agama. Proses penguatan realisasi inilah yang membuat integrasi sosial yang ada pada masyarakat dapat terjaga dan terjalin. Selain itu, kegiatan

layatan juga bisa menjadi *tools* untuk mencegah konflik di tengah-tengah masyarakat. Efek dari *layatan* juga dapat menghilangkan eksklusifisme yang merupakan sikap membeda-bedakan golongan, suku, maupun agama. Jika muncul di tengah-tengah masyarakat, sikap eksklusifisme ini dapat menyebabkan prasangka sosial sebagai awal mula tumbuhnya konflik. Namun, dengan adanya kecerdasan masyarakat setempat maka dapat membuat prasangk-prasangka sosial dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Bentuk kecerdasan masyarakat itu tak lain adalah dalam bentuk *layatan*.

Kearifan lokal lainnya adalah dalam bentuk gotong-royong. Gotong-royong merupakan adat istiadat yang dilakukan ketika ada salah satu masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti ketika membangun rumah, membersihkan balai, membersihkan drainase atau kegiatan lainnya yang berfungsi untuk meringankan beban pekerjaan. Selain untuk meringankan beban warga lainnya, kegiatan gotong-royong juga bisa dilakukan dalam bentuk kerja bakti membersihkan fasilitas umum di sekitar warga.

5.4 Pembangunan Drainase di Kabupaten Lampung Tengah

Pembangunan fisik yang sering dilakukan adalah pembangunan drainase. Masalah yg terjadi adalah ersumbatnya saluran air (drainase) kerap mengakibatkan genangan air di sepanjang jalan Lingkungan III Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah (Lampung Tengah). Hal ini selalu menjadi keluhan warga sekitar. Bupati Lampung Tengah telah mendengar keluhan dari beberapa warga yang berada di sekitar lokasi maupun yang melintas di jalan tersebut langsung bertindak untuk membersihkan drainase.

Beberapa waktu lalu banyak drainase yang terjadi genangan air yang cukup tinggi, karena itu masyarakat menghendaki supaya draenase nya diperbaiki, dan pemerintah kabupaten mengerahkan masyarakat untuk memperbaiki kondisi draenase yang mampet disana-sini. Dengan begitu, dengan kegiatan membersihkan genangan air yang terjadi disini dapat di selesaikan. Pebersihan saluran drainase dilakukan dengan dengan pemerintah kabupaten yang turut membaur bersama masyarakat, membersihkan saluran drainase menggunakan alat-alat yang ada.

Pembangunan drainase sepanjang 128 meter di Bandarjaya Plaza Kabupaten Lampung Tengah, Pembangunan itu harus bermanfaat bagi para pedagang yang ada di sekitar Bandarjaya Plaza. banyak manfaat yang dapat dirasakan masyarakat ketika adanya penataan di Bandarjaya Plaza. Salah satunya dengan pembangunan drainase sangat bermanfaat, pasalnya selama ini jika memasuki musim penghujan, pada akses jalan yang ada disekitar Bandarjaya Plaza pasti tergenang air. Dan itu salah satu pemicunya adalah mampetnya drainase disana.

Puluhan tahun tak mendapatkan sentuhan renovasi, Pasar Bandarjaya Kabupaten Lampung Tengah akhirnya mulai dibenahi. Tahap perbaikan dimulai dari pembangunan drainase sepanjang 128 meter yang membentang di halaman pasar tersebut. Dengan di bangkunya irigasi ini, satu persoalan genangan air hujan yang selalu menghiasi wajah Lampung Tengah sudah terpecahkan. Namun pembangunan ini akan sia-sia ketika drainase yang sedang di bangun ini nantinya justru malah dijadikan tempat pembuangan sampah.

Perbaikan pasar menjadi wujud komitmen Pemkab dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebagai akses perputaran uang, Lampung Tengah harus memiliki pasar yang nyaman, bersih dan tertata. Pembenahan dilakukan secara bertahap. Banyak sekali yang harus kita benahi dari Pasar Bandarjaya, mulai dari penataan pedagang, kebersihan, kemacetan dan drainase. Pembangunan drainase merupakan respon atas viralnya kondisi Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, yang rusak dan diklaim sudah menelan korban jiwa sebagai perbaikan jalan yang berstatus milik Provinsi Lampung.

Pembangunan drainase sengaja dibuat berdasarkan keutuhan di mana drainase sengaja dibuat terbuka untuk mengedukasi masyarakat terutama pedagang agar tidak membuang sampah sembarangan di saluran air yang akhirnya menyumbat saluran dan membuat genangan air. Untuk pembuangan sampah, pihaknya telah menyiapkan TPS di belakang pasar. "Untuk itu pemerintah kabupaten Lampung Tengah minta kepada pedagang maupun Dinas Pasar, jika ingin membuang sampah, langsung saja ke TPS yang kami sediakan. Selanjutnya kami yang akan bertanggung jawab mengangkut ke TPA.

Kebiasaan ini harus diciptakan jika ingin pasar bersih. Dengan terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, seharusnya dapat diimbangi dengan budaya gotong royong di tengah masyarakat, untuk memelihara infrastruktur yang ada. Mindset-nya hari ini harus kita sepakati berubah, tidak dengan mengandalkan pemerintah.

Hal yang perlu menjadi fokus perhatian adalah keberadaan drainase di sekitar jalan ini. Sekalipun dibangun berkali-kali, jika tidak ada drainase yang baik, jalan ini akan selalu rusak. Karena air hujan, akan menggenangi badan jalan. Sebab itu, dari analisa tim di lapangan hari ini, akan kita rumuskan bersama pihak berkompeten lainnya, untuk membangun drainase di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Bandarjaya ini. Bupati meninjau pelaksanaan perbaikan Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, dengan didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Umum, dan Sekretaris Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah yang turut bersinergi dalam pembangunan drainase.

5.5 Strategi Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pendekatan Budaya Gotong Royong

Dalam pernyataannya dalam kegiatan Lampung Fair 2019, Bupati Loekman telah menyadari keterbatasan yang dihadapi Kabupaten Lampung Tengah dalam pembangunan. Menurut beliau, Kabupaten Lampung Tengah memiliki wilayah yang sangat luas namun tidak didukung dengan pendanaan yang sesuai. Dengan memperhatikan kondisi ini maka dia menyadari bahwa perlu adanya pelibatan semua unsur masyarakat. Dengan hadirnya hal tersebut diharapkan kurangnya pendanaan dapat diantisipasi dengan bantuan tenaga dari masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut dalam bentuk kegiatan gotong royong. Masih menurut Loekman, dengan mengaktifkan gotong-royong pembangunan yang sulit akan menjadi mudah, berat akan menjadi ringan dan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kegiatan gotong-royong sejatinya telah terbentuk sejak lama di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Gotong royong adalah nilai luhur yang selalu dijunjung sebagai upaya memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

Pemerintah kabupaten Lampung Tengah telah mencoba membangun kembali budaya gotong royong di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya di masing-masing kecamatan untuk dapat terus menjaga kekompakan, mempererat persatuan dan berperan aktif mendukung pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Untuk mengembangkan program gotong royong ini maka setidaknya terdapat 7 elemen penting yang perlu diperhatikan dan menjadi evaluasi program sejauh ini:



Gambar 4. Tujuh elemen yang dibutuhkan dalam pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat

a. Dukungan Kebijakan

Hal mendasar yang perlu dilakukan dalam melegalkan sebuah kebijakan adalah dengan membuat produk hukum terkait. Produk hukum tersebut akan menjadi landasan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Dengan adanya peraturan yang jelas maka tiap *stakeholder* tidak bingung dan berani mengambil tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena setiap tindakan yang diambil oleh mereka tidak bertentangan dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Begitu juga dengan gerakan gotong royong yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dimana membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

Kegiatan gotong royong yang merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah guna mempercepat

pembangunan. Selain itu, gotong royong juga menjadi wadah untuk memberdayakan potensi budaya yang sangat besar yang ada di wilayah ini. Program ini telah berlangsung sejak tahun 2018 dan mendapat apresiasi dari pemerintah nasional. Untuk itu, program ini perlu dilakukan *scale up* sehingga lebih masif dan mengakar di masyarakat. Peraturan yang sudah ada saat ini yaitu Peraturan Bupati No 14 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kegiatan Gerakan Gotong Royong Di Kabupaten Lampung Tengah sudah dirasa cukup menjadi landasan kegiatan gotong royong. Namun, terdapat beberapa poin yang menurut peneliti perlu untuk ditambah sehingga program ini bisa meluas dan semakin berdampak.

Dalam peraturan tersebut hendaknya memuat prioritas kegiatan gotong royong. Misalnya dalam hal pembangunan fasilitas umum, pembangunan ruang terbuka hijau, perawatan drainase, pembanguan sarana sanitas dan air dan lain sebagainya. Dengan adanya prioritas ini maka memudahkan untuk pelaksanaan dan monitoring kegiatan. Selain itu, di dalam peraturan tersebut peneliti mengusulkan adanya *repackaging* program yang lebih menarik dan mudah untuk diingat oleh masyarakat. Misalnya adalah dengan menamakan program ini menjadi Gong Kampung yang merupakan singkatan dari Gotong Royong Kampung dan sebagainya. Selain adanya peraturan bupati ini, jika dalam pelaksanaannya membutuhkan kebijakan lebih lanjut maka bisa dibuat dalam bentuk instruksi bupati.

Program ini sangat bersinggungan dengan masyarakat bahkan menjadikan mereka sebagai pelaku utama kegiatan. Dalam implementasi ini akan ditemukan upaya untuk mengubah *behavior* masyarakat. Hal ini membutuhkan *power* dan *effort* yang sangat besar dari pemerintah. Dalam proses penerapan peraturan ini sebaiknya pemerintah daerah menggunakan metode *smart enforcement*. Dalam penerapan metode ini menitikberatkan kepada pencerdasan masyarakat yang diajak untuk berfikir dalam menyelesaikan permasalahan.

b. Kelembagaan

Kelembagaan berkaitan erat dengan dukungan dari *top level stakeholder* dan juga lembaga yang bertanggungjawab dalam program gotong royong. Mengingat program ini adalah program unggulan dari kepala daerah maka sudah pasti memiliki dukungan yang

kuat. Kepala daerah harus terus mengkampanyekan program gotong royong ini ke setiap daerah yang dia tuju baik dalam *event* daerah maupun nasional. Pesan gotong yang disampaikan di setiap kesempatan merupakan indikator bahwa program ini mendapat dukungan dan keseriusan dalam penerapannya. Dengan adanya arahan dari kepala daerah secara langsung maka akan diikuti oleh pejabat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Lampung Tengah.

Selain bentuk komitmen kepala daerah, kelembagaan juga perlu disiapkan untuk menjalankan program ini. Sebagaimana yang peneliti sampaikan bahwa perlu hal yang menjadi prioritas dalam program gotong royong. Hal ini dimaksudkan agar pendelegasian tugas dalam mengawal prioritas gotong royong bisa diberikan ke organisasi perangkat daerah yang membidangi prioritas tersebut. Misalnya dalam prioritas gotong royong terkait perawatan drainase maka program seharusnya berada di bawah Dinas Perumahan dan Permukiman. Contoh lainnya adalah program jambanisasi dimana nantinya akan berada di bawah Dinas Kesehatan. Skema ini juga bisa diterapkan dengan langsung mendelegasikan tugas kepada kepala kampung.

Program lintas organisasi seperti ini akan menemukan hambatan berupa koordinasi dan komunikasi. Untuk mengantisipasi hal ini maka perlu adanya organisasi yang ditudjuk sebagai *leading sector* guna menghimpun tiap organisasi. Peran ini diemban oleh Bappeda yang mengakomodir tiap organisasi dalam lingkup Kelompok Kerja (Pokja). Dalam kaitannya dengan isu kebersihan lingkungan dan pengadaan air bersih maka Bappeda melalui Pokja AMPL harus aktif meningkatkan koordinasi tiap organisasi. Hal ini dapat dimulai dengan mengadakan rapat rutin yang bertujuan untuk persiapan dan evaluasi kegiatan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan ego sektoral. Perlu dipahami oleh tiap perwakilan OPD bahwa tiap organisasi mempunyai peran yang sama dalam pembangunan. Tidak ada organisasi yang lebih hebat dibandingkan organisasi lainnya. Semuanya saling bekerja sama dalam melaksanakan program gotong royong ini.

c. Sosial Komunikasi

Dengan melihat potensi budaya yang ada di Kabupaten Lampung Tengah maka hal tersebut dapat digunakan sebagai kekuatan yang dapat mempercepat pembangunan. Pembangunan drainase yang telah dilakukan di Kabupaten Lampung Tengah sejatinya membutuhkan perawatan yang berkala. Pola pikir pembangunan fisik yang hanya mengutamakan hasil secara fisik perlu diubah secara perlahan. Karena sejatinya keberhasilan pembangunan berkelanjutan bukan hanya dilihat dari bentuk fisik saja namun dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Untuk itu, inklusifitas di dalam pembangunan perlu dihadirkan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat.

Adanya inklusifitas akan memunculkan proses pembelajaran sehingga kapasitas masyarakat pun ikut meningkat. Proses pelibatan ini menjadi bukti bahwa masyarakat berperan sebagai “subjek” di dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan semangat yang tertuang di dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang dikenal dengan “*leaving no one behind*”, bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan. Pembangunan tidak mengenal jabatan atau status sosial. Semuanya harus terlibat dan merasakan proses pembangunan sehingga hasilnya dapat bertahan lama. Misalnya dalam hal pembangunan drainase, pelibatan masyarakat dalam konteks ini setidaknya dapat dibagi menjadi tiga fase; perencanaan, aksi, dan perawatan.

Dalam fase perencanaan, keterlibatan masyarakat dapat berupa usulan dalam menentukan lokasi. Agar hasil pembangunan optimal maka perlu memenuhi kebutuhan warga, termasuk dalam penentuan lokasi. Masyarakat yang sejatinya hidup di wilayahnya maka akan lebih paham kondisi wilayah tersebut. Untuk itu, informasi dari masyarakat perlu digali guna memverifikasi permasalahan yang terjadi. Dalam metode *Design Thinking*, proses ini lazim dikenal dengan istilah *empathy*. Proses ini bertujuan untuk memahami permasalahan apa yang terjadi di masyarakat. Baik itu yang berwujud maupun tidak berwujud berupa perasaan dan opini. Semuanya harus digali secara mendalam sebelum menawarkan solusi. Proses ini akan meningkatkan pembangunan yang tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat. Proses penggalan kebutuhan

masyarakat ini akan berlangsung dengan baik dikarenakan adanya budaya untuk mengemukakan pendapat. Budaya ini pun sudah tertanam sejak lama. Pendapat yang muncul ini akan membawa ke tahap selanjutnya yaitu musyawarah. Musyawarah merupakan kegiatan yang mengumpulkan pendapat khalayak untuk mencari pilihan terbaik. Untuk mengakomodir proses ini, pemerintah telah menyediakan wadah yang luas dalam bentuk Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan rembug desa.

Dalam fase aksi, keterlibatan masyarakat disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan namun dengan tetap memprioritaskan warga sekitar. Masyarakat dapat dilibatkan secara langsung dalam pembangunan fisik dengan menjadikan mereka sebagai pekerja, penyuplai material atau bisa juga sebagai penyuplai makanan. Namun, hal ini dibatasi dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Dalam pembangunan skala besar, terkadang pekerja atau tukang sudah merupakan tim dari pihak ketiga sehingga pelibatan masyarakat menjadi berkurang.

Dalam fase perawatan atau paska pembangunan drainase, masyarakat memiliki peran yang sangat luas. Perawatan drainase khususnya drainase permukiman sangat bertumpu kepada partisipasi masyarakat. Sebagai subjek pembangunan, masyarakat juga mempunyai tanggungjawab untuk memastikan drainase berfungsi secara normal. Drainase yang telah dibangun harus dijaga baik bentuknya maupun fungsinya. Bentuk drainase yang sudah dibangun jangan sampai dikurangi atau diubah. Sedangkan berdasarkan fungsinya, drainase harus bisa mengalirkan air tanpa ada hambatan. Sejalan dengan waktu, drainase akan mengalami proses sedimentasi dari material lepas yang ada di permukaan. Tingginya tingkat sedimentasi mampu menghambat kemampuan drainase mengalirkan air. Akibatnya adalah air yang seharusnya mengalir melalui drainase akan meluap ke jalanan sehingga menimbulkan genangan atau bahkan banjir. Untuk merawat fungsi drainase inilah peran masyarakat sangat penting. Selain menjadi tanggungjawab pemerintah, drainase di suatu wilayah juga merupakan tanggungjawab masyarakat di wilayah itu. Inilah salah satu bentuk partisipasi masyarakat untuk keberlangsungan pembangunan. Untuk menjaga drainase bisa dilakukan dengan cara perawatan individual dan perawatan kolektif. Perawatan

individual dilakukan masyarakat pada drainase yang ada di depan rumah masing-masing. Sedangkan perawatan kolektif dilakukan terhadap drainase-drainase sekunder atau primer. Dengan melihat potensi budaya yang ada di masyarakat, bentuk perawatan kolektif dapat dilakukan dengan cara gotong-royong.

d. Pendanaan

Elemen selanjutnya yang perlu dilakukan adalah persiapan dalam hal pendanaan. Saat ini pemerintah pusat terus mempercepat pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya dana desa yang menjadi salah satu sumber keuangan desa. Selain itu, terdapat juga sumber lainnya dalam bentuk alokasi dana desa serta sumber keuangan lainnya. Dalam memanfaatkan sumber-sumber dana ini maka kepala desa harus mengikuti peraturan yang berlaku. Khususnya dalam hal administrasi dan prosedural. Dengan memahami kedua hal tersebut mampu meminimalisir kepala desa terjerumus ke dalam ranah hukum. Untuk itu kebijakan yang mengatur program gotong royong perlu membahas detail sumber dana yang bisa digunakan untuk kegiatan gotong royong. Hal penting lainnya adalah tentang bagaimana prosedur pencairan dan pemanfaatan dana tersebut.

Sebagai bentuk komitmen keberlangsungan program ini maka pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah menyalurkan dana stimulant sebesar 20 juta per kampung. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk membeli material yang dibutuhkan. Pemerintah daerah mendukung dengan memberikan stimulant dan alat berat sedangkan masyarakat membantu dalam tenaga kerja. Kolaborasi ini diharapkan mampu memicu lahirnya kegiatan gotong-royong di tiap kampung.

Kaitannya dengan perawatan saluran drainase, peneliti melihat bahwa masih diperlukan adanya dana stimulan. Berbeda dengan dana stimulan sebelumnya, dana ini memang dikhususkan kepada kampung atau kelurahan yang memiliki saluran drainase sekunder. Pemerintah daerah melalui OPD terkait harus memetakan lokasi saluran drainase yang memerlukan perawatan berbasis masyarakat. Setelah data ini terhimpun kemudian mengalokasikan dana stimulan yang digunakan untuk gotong royong merawat saluran drainase.

e. Sentuhan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi yang cepat juga perlu diadopsi ke dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan hadirnya internet sampai ke pelosok desa maka bisa menjadi acuan bahwa masyarakat desa pun sudah familiar dengan penggunaan teknologi dan informasi. Bentuk teknologi yang dapat digunakan dapat berupa aplikasi yang memuat sistem saluran drainase yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Pada sistem aplikasi tersebut juga mampu menampilkan lokasi drainase yang tidak berfungsi. Berdasarkan lokasi inilah kemudian penentuan lokasi gotong royong dilakukan. Selain itu, untuk memluas kampanye gotong royong dan kesadara masyarakat untuk merawat drainase maka perlu juga dibuat media sosial yang memuat kegiatan-kegiatan gotong royong.

f. Infrastruktur

Elemen ini bersifat pendukung. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang menggunakan budaya gotong royong adalah kegiatan yang mudah dan tidak membutuhkan peralatan khusus. Peralatan kebersihan seperti cangkul, sapu ijuk, dan angkong hampir dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat. Namun, jika gotong royong membutuhkan alat berat seperti truk sampah, eskavator dan lainnya maka pemerintah daerah juga harus mempersiapkannya. Persiapan infrastruktur ini diperlukan sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah daerah guna menjaga semangat gotong royong tumbuh di masyarakat.

g. Sumber Daya

Hal terakhir yang perlu dipersiapkan adalah terkait kesiapan sumber daya manusia. Sebagai pelaksana kegiatan gotong royong, baik kepala kampung maupun OPD terkait harus memiliki pemahaman dan semangat yang sama dalam melaksanakan kegiatan gotong royong. Kesiapan mereka dalam mengkonsolidasi tim sangat menentukan. Selain itu, peran tokoh agama dan budaya juga perlu dilibatkan sehingga sisi emosional masyarakat juga bisa disentuh. Sejauh ini pelibatan pemuda dalam kegiatan gotong royong sudah dikutkan dengan dibentuknya Forum Pemuda Gotong Royong.

BAB VI

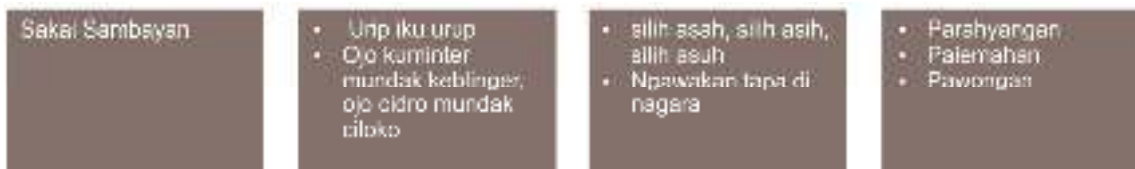
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat maka terdapat beberapa strategi yang perlu diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Pada bagian ini peneliti akan merangkum beberapa kesimpulan yang didapat selama melaksanakan kajian ini. Selain itu, peneliti juga akan memparkan beberapa rekomendasi sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan khususnya dalam perawatan drainase yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

6.1 Kesimpulan

1. Kabupaten Lampung Tengah disusun oleh beragam budaya yang saling mengisi. Terdapat empat suku besar di Kabupaten Lampung Tengah yang setiap suku memiliki karakter atau falsafah kehidupan. Jika dikaji lebih mendalam maka falsafah kehidupan tersebut saling beririsan satu sama lain. Suku Jawa memiliki falsafah hidup yang dikenal dengan nama *Pitutur*. Falsafah ini memiliki persamaan nilai dengan *Piil Pesenggiri* orang Lampung, *Trihita Karana* Suku Bali, dan *Tri Tangtu* Suku Sunda. Untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya perawatan drainase, maka terdapat irisan budaya yang dapat diberdayakan yaitu:



2. Optimasi budaya sudah diterapkan dalam proses pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah dengan melakukan kegiatan siskamling, ronda dan juga gotong royong. Kegiatan terakhir bahkan sudah mendapat penghargaan dari level nasional. Kegiatan yang melibatkan masyarakat menjadi isu yang diangkat dalam pembangunan jangka menengah 2016-2021. Strategi yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan langsung menyentuh wilayah desa. Baik itu berupa kegiatan dan dukungan dana stimulan untuk mengaktifkan gotong royong.
3. Program gotong royong yang diterapkan di Kabupaten Lampung Tengah sedang berada dalam tahap pengembangan. Di beberapa tempat yang sudah dilaksanakan berjalan dengan sukses sesuai dengan harapan. Pada tahun 2019, skema dana stimulan yang dikucurkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah terbukti berhasil mempercepat pembangunan. Program gotong royong ini meliputi aspek pembangunan yang sangat luas. Untuk itu, peneliti melihat perlu adanya prioritas pembangunan yang akan menggunakan pendekatan gotong royong. Sejauh ini, kegiatan gotong royong berupa pembangunan fisik berlangsung dengan efektif. Namun, kegiatan perawatan infrastruktur, misalnya drainase, yang mengedepankan

keberlanjutan masih perlu ditingkatkan. Program yang berkelanjutan inilah yang nantinya bisa dijadikan tolak ukur *behaviour changing* dan dampak gotong royong di masyarakat.

4. Program yang mengutamakan partisipasi masyarakat mendapat respon sangat baik di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan langsung kepala daerah di setiap pelaksanaannya. Misalnya dalam program ronda yang hampir di setiap malam selalu diikuti oleh kepala daerah. Atmosfir ini terus terjaga sampai dengan hadirnya pogram gotong royong yang juga melibatkan peran masyarakat secara langsung. Dalam praktiknya, kepala daerah sangat serius dalam melaksanakan program ini. Ini juga ditunjukkan dengan hadirnya kepala daerah dan jajarannya dalam kegiatan-kegiatan gotong royong. Inilah yang disebut sebagai *leading by example*. Dengan adanya contoh dari pemimpinnya maka masyarakat pun akan tergerak untuk turut serta menyukseskan kegiatan gotong royong.

5. Untuk mengembangkan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat, maka peneliti mengajukan beberapa poin penting agar program gotong royong ini berjalan dengan lancar. Usulan ini berlandaskan pada tujuan kajian yaitu memberikan panduan agar masyarakat terlibat dan sadar dalam perawatan infrastruktur (dalam hal ini drainase). Usulan ini peneliti sebut dengan Tujuh Elemen Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi: dukungan kebijakan, kelembagaan, sosial komunikasi, pendanaan, sentuhan teknologi dan infrastruktur.

6.2 Rekomendasi

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga infrsatruktur yang dibangun dan juga mengembangkan program gotong royong, maka terdapat beberapa rekomendasi yang bisa dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, diantaranya:

Rekomendasi	Penanggungjawab	Anggaran
Menambahkan sektor yang menjadi prioritas pembangunan berbasis gotong royong di	Bappeda, Dinas Perumahan dan	

dalam Peraturan Bupati No 14 Tahun 2019	Permukiman	
Mengalokasikan dana stimulan gotong royong kepada desa atau kelurahan yang dilewati saluran drainase utama dan melegalkan kebijakan ini.	Bappeda dan Dinas Perumahan dan Permukiman	
Memetakan dan memantau saluran drainase dengan dukungan aplikasi online untuk memudahkan pelaksanaan perawatan drainase	Dinas Perumahan dan Permukiman	Rp. 90.000.000,00
Memperkuat koordinasi di dalam Pokja AMPL dalam pendistribusian kegiatan.	Bappeda	
Mendelegasikan program gotong royong kepada OPD terkait. Hal ini dilakukan setelah adanya penentuan prioritas kegiatan gotong royong.	Bappeda	

REFERENSI

- Aeman, Hendra, Alizar Hasan. Manajemen Strategi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Drainase Studi Kasus : Nagari Salido, Pesisir Selatan (Sumatera Barat) . Sinmag: 2017
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Lampung Tengah in Figures*. Gunung Sugih: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Lampung Tengah in Figures*. Gunung Sugih: Badan Pusat Statistik.
- Bappeda Kabupaten Lampung Tengah. (2011). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031*. Gunung Sugih: Kabupaten Lampung Tengah.
- BPIW Kementerian PUPR.2011. Materi Teknis Pengembangan Infrastruktur Terpadu Antar Kawasan Strategis. Jakarta: Kementrian Pupr
- Djoht, Djekky R. Penerapan Ilmu Antropologi Kesehatan Dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat Papua
- Hall, Anthony & James Midgley. 2004. "Social Policy For Development". London: Sage Publications.
- Irawan, Rahmat. Kajian Penataan Sistem Drainase Perkotaan Berdasarkan Rencana Pola Ruang
- Kasnyiah, Naniek. Antropologi Pasca Pembangunan: Antropologi Terapan. Humaniora: 2005
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Edisi Revisi 2009. Rineka Cipta. Jakarta.Offset
- Prapti, Lulus Sr. Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang. J Dinamika Sosbud: 2015
- Purwanto, Hari. 2000. Kebudayaan Dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi. Pustaka Belajar. Yogyakarta

- Rachmawati, A. 2010. Aplikasi Sig Untuk Evaluasi Sistem Jaringan Drainase Di Sub Das Lowokwaru Kota Malang. Jurnal Rekayasa Sipil Volume 4 Universitas Islam Malang.
- Sudarwin Danim. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancangan Metodologi, presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan humaniora*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Suharto, Edi. 2005. "Analisis Kebijakan Publik". Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Suradi, Dkk. 2013. "Kebijakan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil". Jakarta : P3ks.
- Suradi. 2012. "Studi Evaluasi Dampak Kebijakan Sosial : Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Miskin Di Kota Banjarmasin". Sosiokonsepia. Vol. 17 No. 02.
- Suripin. 2004 . Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan. Yogyakarta : Andi
- Spradley James.P.(1980). *The Ethnographic Interview*. New York: Holt Renehart and Winston.
- Syafawi, Ahmad. Studi Permasalahan Drainase Jalan (Saluran Samping) Dilokasi Jalan Demang Lebar Daun Sepanjang ± 3900 M (Lingkaran Sma Negeri 10 S.D Simpang Polda). Pilar Jurnal Tekni Sipil: 2013
- Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam berbagai prespektif*, cetakan pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014

LAMPIRAN

Nama : G.C Aji Dewangga
 Usia : 30 TH
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Profesi : Buruh harian lepas
 Suku : LAMPUNG
 Alamat Domisili : Dusun I Rt/Rw 003/001 kel. Bumi ratu, Kec. Bumi Ratu Nuban

No	Respon	Keterangan
1	Penting	
2	Aktif, ikut serta dalam pelaksanaan dan rangkaian adat istiadat sosial dan budaya	
3	Sebagai sistem tatanan dalam lingkungan masyarakat tertentu yang terwujud dalam nilai nilai budaya lokal pada masyarakat	
4	Adat Budaya lampung sangat diterapkan dan masih banyak pelaksanaan adat tradisi	
5	Begawi, Mepadun, Cuwak Mengan, Pineng Grabung Sanggah, Ngettar mulie, Cekermo, Punggahan	
6	Jawa dan Lampung	
7	Adanya acara adat yang melibatkan sanggar sanggar seni sehingga dapat meningkatkan penghasilan seniman/i	
8	Iya	
9	Iya	
10	Iya	
11	Iya , Dalam bidang pelestariaN adat budaya lampung	
12	Baik	
13	Lampung	
14	Baik, Melakukan pembersihan secara rutin agar aliran lancar dan	

	tidak tersumbat	
15	Awal mula baik.....karna sudah ada pembangunan drainase yg ada di seputaran pasar bandar jaya, tapi akhir akhir ini agak memburuk karena pembanguna senelumnya tidak di lanjutkan dan kurang perawatan	
16	Dulu sebelumnya banjir Setelah ada pembangunan drainase mulai berkurang...tetapi saat ini harus butuh pembanguan lanjutan dan perawatan kembali.	
17	Dampaknya sangat baik,,mencegah adanya genangan air yg dapat mengembang biakkan jintik jintik nyamuk demam berdarah	
18	Akan mengakibatkan banjir dan sumber dari berbagai macam penyakit	
19	Tidak	
20	Tidak	
21	Tidak	
22	Belum	
23	Tidak Tidak Tidak Tidak Menjawab	
24	Baik Ya Tidak Kurang Sosialisasi	
25	Berharaf Lampung Tengah lebih bersih, aman, nyaman dan sejahtera	
26	Ikut menjaga dan merawat hasil pembangunan di kab. Lampung Tengah	

Nama : **DESRIO AREF YUGA SAPUTRA, Amd. LLAJ, S.SiT, MT.**
 Usia : 40 TH
 Pendidikan Terakhir : S-2
 Profesi : Kabid LALU LINTAS
 Suku : Lampung
 Alamat Domisili : Lingkungan III RT 005 / Rw 03 Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar –
 Kabupaten Lampung Tengah

No	Respon	Keterangan
1	Penting	
2	Aktif	
3	Karena budaya lokal dan norma - norma dalam kehidupan bermasyarakat maka adat berperan penting dalam kehidupan kita , sebagai falsafah kehidupan dan fungsi filterisasi dalam mengontrol masuknya budaya asing	
4	Adat Budaya lampung sangat diterapkan dan masih banyak pelaksanaan adat tradisi .	
5	Begawi, Mepadun, Cuwak Mengan, Pineng Grabung Sanggah, Ngettar muley.	
6	Jawa dan Lampung	
7	Adanya acara adat yang melibatkan sanggar sanggar seni sehingga dapat meningkatkan penghasilan seniman/i	
8	Iya	
9	Iya	
10	Iya	
11	Iya , Dalam bidang pelestarian pengembangan dan pemanfaatan Potensi seni budaya daerah	
12	Baik	

13	Jawa & lampung	
14	Baik Yang membangun Gotong royong Setiap minggu mengadakan gotong royong	
15	Masih kurang krn posisi di belakang pasar bandarjaya kalau kondisi hujan becek	
16	Dulu sebelumnya banjir tpi sekarang becek, dan Tempat pembuangan sampahnya nggak rapi	
17	Tidak Menjawab	Tidak ada respon
18	Pasar becek dan bau	
19	Tidak	
20	Tidak	
21	Tidak	
22	Belum	
23	Tidak Tidak Tidak No komen	
24	Sangat Bagus Tahu Efektif Sangat Intensif	
25	Berharaf Lampung Tengah lebih nyaman lebih bersih dan rapi	
26	Ikut Bergotong royong menjaga kebersihan	

IDENTITAS

Nama : Sugiono
Usia : 27 tahun
Pendidikan : SLTA
Profesi : Pegawai swasta
Suku : Jawa
Alamat : Dusun IV Marga Mulya, Terbanggi Besar, Lampung Tengah

REKAP KUESIONER

No.	Respon	Keterangan
1.	Penting	
2.	Aktif. Karena budaya warisan turun temurun yang harus dijaga	
3.	Peranan adat bagi kehidupan. Menurut saya sangat penting karena menyatukan masyarakat luas dan mengandung nilai kehidupan	
4.	Contoh penerapan ada di kehidupan sehari-hari: Berlaku sopan santun dalam pergaulan teman, warga, dan lingkungan Hormat pada aparat penegak hukum, ketua RT, ketua dusun, dll Membantu membersihkan irigasi pinggir jalan	
5.	Contoh kegiatan sosial budaya di tempat tinggal saya: Pentas seni kuda lumping dan reog Ponorogo Menanamkan kepada anak cinta budaya sendiri	
6.	Jawa dan Lampung	
7.	Pentas seni kuda lumping dan reog	
8.	Iya	
9.	Iya	
10.	Iya	
11.	Iya dilibatkan, yang terbaru pembangun tugu selamat datang Dusun IV Terb. Besar	
12.	Baik-baik saja, tetap jaga sopan santun dan lebih menghormati kepada yang lebih tua	

13.	Adat budaya yang dominan seperti: Kendurian	
14.	Kondisi drainase sekitar rumah sangat bagus, air mengalir lancar, dan untuk yang membangun warga secara gotong royong	
15.	Perubahan di drainase sangat bagus, sudah digali pakai alat berat sehingga air lancar tidak tersumbat lagi	
16.	Sebelum penggalian drainase, jalan di sekitaran pasar banyak tergenang air	
17.	Dampak dari pembangunan drainase, jalan tidak tergenang air dan sangat enak untuk dilewati	
18.	Drainase jika tidak berfungsi dengan baik, dapat menyebabkan banjir, air tergenang di jalanan	
19.	Tidak	
20.	Tidak	
21.	Tidak	
22.	Menurut saya sudah efektif, tetapi masih banyak daerah yang belum merasakan, karena tinggal saya masih dekat dengan pemda dan kota jadi mudah terlihat jika ada yang belum diperbaiki dll	
23.	Belum mengetahui, dikarenakan sosialisasi ke masyarakat kurang	
24.	Iya tahu, tapi saya kurang yakin efektif, karena masyarakat sekitar yang kurang merasakan	
25.	Saya ingin Lamteng semakin banyak lapangan pekerjaan dan lebih aman	
26.	Dengan cara mengawasi dan menjaga fasilitas-fasilitas umum yang telah dibangun pemda Lamteng	

IDENTITAS

Nama : Enes Triyani
Usia : 22 tahun
Pendidikan : SLTA
Profesi : Karyawan swasta
Suku : Jawa
Alamat : Poncowati, Lampung Tengah

REKAP KUESIONER

No.	Respon	Keterangan
1.	Penting	
2.	Tidak aktif, karena lebih banyak waktu di kantor	
3.	Sebagai tradisi dalam kehidupan sehari-hari	
4.	Menjalin tali persaudaraan antar tetangga	
5.	Ronda	
6.	Jawa dan Sunda	
7.	Usaha membuat guci	
8.	Tidak	
9.	Tidak	
10.	Tidak	
11.	Iuran membangun jembatan dan siring	
12.	Kurang dekat	
13.	Syukuran saat 17 Agustusan	
14.	Kondisi drainase baik, tidak mampet, tidak membuang sampah sembarangan	
15.	Telah dibangun drainase mengelilingi pasar	
16.	Sudah tidak ada genangan air di jalan saat hujan	
17.	Mengurangi genangan air	
18.	Banjir	
19.	Tidak	

20.	Tidak	
21.	Tidak	
22.	Kurang efektif	
23.	Belum Tidak Kurang Belum pernah mengikuti	
24.	Tidak Kurang Tidak pernah mengikuti	
25.	Lebih ditingkatkan	
26.	Membangun gapura	

IDENTITAS

Nama : Ana Chairunnisa
Usia : 24 tahun
Pendidikan : SLTA
Profesi : Karyawan swasta
Suku : Jawa
Alamat : Poncowati, Lampung Tengah

REKAP KUESIONER

No.	Respon	Keterangan
1.	Penting	
2.	Tidak aktif, karena lebih banyak waktu di kantor	
3.	Tradisi yang harus diikuti	
4.	Menjalin tali persaudaraan	
5.	Syukuran bangun rumah	
6.	Jawa	
7.	Usaha menganyam tikar	
8.	Tidak	
9.	Iya	
10.	Tidak	
11.	Ya, misalnya iuran membangun gapura	
12.	Tidak terlalu terdekat	
13.	Adat syukuran rumah	
14.	Kondisi drainase tidak mampet, warga setempat yang membangun	
15.	Dibangunnya siring di pasar	
16.	Sekarang jika hujan tidak banjir	
17.	Tidak ada genangan air di jalan	
18.	Banjir	
19.	Tidak	
20.	Tidak	

21.	Tidak	
22.	Kurang efektif	
23.	Tidak Tidak Kurang Belum pernah mengikuti	
24.	Tidak Kurang Tidak pernah mengikuti	
25.	Lebih diperluas lagi	
26.	Membersihkan jembatan	

Nama : LINGGAR NUNIK KISWARI, S Sn,MM
 Usia : 43 TH
 Pendidikan Terakhir : S -2
 Profesi : Kabid Kebudayaan (Seniman)
 Suku : Jawa
 Alamat Domisili : Lingkungan Vi RT 32 Rw 12 Yukumjaya Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah

No.	Respon	Keterangan
1.		
2.		
3.	Sebagai sistem tatanan dalam lingkungan masyarakat tertentu yang terwujud dalam nilai nilai budaya lokal pada masyarakat	
4.	Adat Budaya lampung sangat diterapkan dan masih banyak pelaksanaan adat tradisi	
5.	Begawi, Mepadun, Cuwak Mengan, Pineng Grabung Sanggah, Ngettar mulie, Cekermo, Punggahan	
6.	Jawa dan Lampung	
7.	Adanya acara adat yang melibatkan sanggar sanggar seni sehingga dapat meningkatkan penghasilan seniman/i	
8.	iya	
9.	iya	
10.	Iya	
11.	Iya , Dalam bidang pelestarian pengembangan dan pemanfaatan Potensi seni budaya daerah	
12.	Baik	
13.	Jawa	
14.	Yang membangun Gotong royong Setiap minggu mengadakan gotong royong	
15.	Masih kurang krn posisi di belakang pasar bandarjaya kalau kondisi hujan becek	
16.	Dulu sebelumnya banjir tpi sekarang becek, dan Tempat pembuangan sampahnya nggak rapi	
17.		Tidak

		menjawab
18.	Pasar becek dan bau	
19.	Tidak	
20.	Tidak	
21.	Tidak	
22.	Belum	
23.	Tidak Tidak Tidak Tidak menjawab	
24.	Sangat bagus Tahu Efektif Sangat intensif	
25.	Berharaf Lampung Tengah lebih nyaman lebih bersih dan rapi	
26.	Ikut Bergotong royong menjaga kebersihan	

Nama : **Evie Damayanti,S.P.**
 Usia : 42 TH
 Pendidikan Terakhir : S I
 Profesi : PPL Pertanian
 Suku : Jawa
 Alamat Domisili : Perumahan GMP Jl. R I No.15 RT 32 RW 1 Lingk. VI C kel. Yukum
 Jaya
 Kec Terb. Besar Kab Lampung Tengah

No.	Respon	Keterangan
1.	Penting	
2.	Aktif. Sering berperan aktif di kegiatan lingkungan, karena kegiatan – kegiatan tersebut sangat memberi manfaat dalam hal nilai agama, hubungan sosial dll. apabila kita mencerminkan norma dan nilai sosial yang baik di sekitar kita, maka kenyamanan hidup dalam lingkungan akan baik juga.	
3.	Serangkaian tingkah laku byang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari - hari	
4.	Penerapan adat budaya dalam kehidupan saya selama ini cukup baik dan berwarna , artinya saya melihat itu dilakukan sesuai dengan adat atau kebiasaan masing – masing kelompok orang yang berbeda dengan aturan tertentu. Misalnya pernikahan orang suku lampung dengan sebutan begawi atau adat pernikahan suku jawa ada bagiannya yang di sebut midodareni, dan masih banyak lainnya.	
5.	<p>a. Bidang Pendidikan Dalam berkegiatan sosial di harapkan dapat menggunakan bahasa indonesia sebagai bentuk pelestarian agar bahasa indonesia tidak terkikis zaman.</p> <p>b. Bidang Budaya - Adanya sanggar tari di lingkungan, untuk melestarikan budaya dan juga wujud interaksi antara anggotanya yg beragam suku atau daerah asalnya. - Acara pernikahan menggunakan adat Lampung, Jawa, Palembang. Bidang Pertanian adanya organisasi Kelompok Tani, adanya organisasi Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A).</p>	
6.	Jawa ,Lampung, Palembang	
7.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengerajin Khas Lampung, antara lain : Perajin Tapis Perajin Sulam Jalin Kepang (khas Lampung Tengah) - Sanggar Tari Melatih remaja – remaja untuk bisa menari khas daerah 	

	(lampung, Jawa, Palembag) Sehingga bisa memperoleh pendapatan. - Remaja Masjid Menjual lukisan kaligrafi	
8.	Iya	
9.	Iya	
10.	Iya	
11.	Iya, dalam kegiatan ibu – ibu PKK mensosialisasikan tentang sulam jalin kepang (kerajinan sulam khas lampung Tengah)	
12.	Baik	
13.	Jawa	
14.	Yang membangun adalah pribadi masing – masing rumah, tetapi ada yang di bangun oleh pemerintah. Perawatan di lakukan bersama – sama dengan masyarakat lingkungan (gotong royong) dengan waktu sesuai yang di jadwalkan di masing-masing RT.	
15.	Semakin Baik , tetapi masih banyak yang harus di buat lebih baik lagi.karena ada pembangunan jalan atau siring (gorong – gorong) yang belum selesai sehingga belum sempurna pemanfaatannya.	
16.	Semakin baik menurut saya, namun masih banyak yang harus diperbaiki lagi, Saluran air masih ada yang belum selesai. Kemudian Jalan sudah ada yang rusak lagi sehingga sangat menghambat transportasi pedagang ataupun pembeli. Tempat pengolahan sampah pasar sudah dibangun lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya namun dalam perawatan yang masih belum optimal.	
17.	Dampak lebih ke arah positif, karena lancar dalam berkendara di pasar walaupun sekarang sudah banyak sisi – sisi bagian pasar yang harus segera di perbaiki lagi.	Tidak menjawab
18.	Banyak genangan air yang besar dan dalam, sehingga menyulitkan para pedagang atau petani dalam usahanya membawa hasil tani nya ke pasar untuk di jual. Seyogyanya pemerintah lebih memberi perhatian pada pembangunan pasar karena untuk pasar bandar jaya merupakan penyokong perekonomian untuk wilayah lampung tengah.	
19.	Tidak	
20.	Tidak	
21.	Tidak	
22.	Pemkab Lamteng harus lebih memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Bahkan dengan tindakan yang	

	real. Karena untuk terwujudnya kenyamanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat lamteng	
23.	Belum, harapannya segera di bentuk ruang pengaduan tersebut. Sehingga lebih cepat tersampaikan hal – hal yang harus di benahi. Belum Sangat efektif kalau memang ada Di segala Lini masyarakat juga memanfaatkan media on line seperti sekarang ini.	
24.	Sangat bagus Tahu Efektif Sangat Intensif	
25.	Lampung Tengah lebih nyaman, lebih bersih dan rapi lebih indah dan membawa kemajuan masyarakat lamteng.	
26.	Ikut berpartisipasi dalam mendukung program – program pemkab lamteng, misalnya gotong royong yang sering di lakukan secara intens oleh pemkab lamteng sekarang ini	

Nama : **Ikmaluddin Ghani**
 Usia : 52 TH
 Pendidikan Terakhir : S I
 Profesi : Karyawan swasta
 Suku : Lampung
 Alamat Domisili : Rt 08 Rw 03 Seputih Jaya, Gunung Sugih, Kab Lampung Tengah

No.	Respon	Keterangan
1.	Penting	
2.	Aktif, pada saat ada kegiatan saja	
3.	Penting	
4.	Sesering mungkin	
5.	Gawi Adat	
6.	Lampung	
7.	Peternakan	
8.	Tidak	
9.	Tidak	
10.	Tidak	
11.	Tidak menjawab	
12.	Aktif	
13.	Tidak menjawab	
14.	Negara, Gotong royong	
15.	Drainase belum maksimal dan masing sering tergenang	
16.	Masih saja terjadi genangan	
17.	Sedikit lebih baik	Tidak menjawab
18.	Sedikit banjir atau tergenang	
19.	Tidak. Karyawan swasta dan tidak sempat	
20.	Tidak	
21.	Tidak	
22.	Belum efektif	
23.	Iya Iya	

	Efektif Belum efektif	
24.	Cukup menjanjikan Baru dengar Arahnya efektif Belum kelihatan	
25.	Harus ada progress	
26.	Masyarakat mengikuti apa kata yang di atas. Siap saja	